

**WALHI**  
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

**PULIHKAN INDONESIA**

*Jurnal*  
**TANAH AIR**  
2021



**Penanggung Jawab:**

Nur Hidayati

**Dewan Redaksi:**

Nur Hidayati, Khalisa Khalid, Ahmad (Pelor),  
Zenzi Suhadi, Oslan Purba, M. Islah

**Redaktur Pelaksana & Editor:**

Nuzulul Ichwal Moidady

**Reviewer:**

Torry Kuswardono

**Design dan lay out:**

Ariestyan Putra

**Ilustrasi cover:**

Ariestyan Putra

**Ilustrasi isi:**

Ariestyan Putra

**Penerbit:**

Eksekutif Nasional WALHI

**Distributor:**

Harno

**Wahana Lingkungan Hidup Indonesia**

Jln. Tegal Parang Utara No. 14  
Mampang-Jakarta Selatan 12790  
T/F: +6221 79193363/7941673  
E: informasi[at]walhi.or.id  
W: <http://www.walhi.or.id>

## Daftar Isi

<b>Editorial Redaksi</b>	i
<b>Bagian I</b>	
Kritik Kapitalisme	1
<i>COVID-19 dan Kapitalisme</i>	2
<b>Zaki Hussein</b>	
<i>Pembangunan Perkotaan, Kerentanan</i>	
<i>dan Bencana Banjir</i>	16
<b>Rita Padawangi</b>	
<b>Bagian II</b>	
Ekonomi-Politik	37
<i>Memahami Ekonomi-Politik Ekologi China</i>	38
<b>Muhammad Ridha</b>	
<i>Ekonomi Nusantara: Narasi Tanding</i>	
<i>Ekonomi Pertumbuhan Kapitalistik</i>	54
<b>Boy Sembiring &amp; Abdul Ghofar</b>	
<b>Review Buku</b>	
<i>Ecocide</i>	74
<b>Aip Saifullah</b>	
<b>Profil Penulis</b>	



## Editorial Redaksi

Salam Adil & Lestari.  
Pulihkan Indonesia!!!

Senang bisa menyapa lagi kawan-kawan pembaca Jurnal Tanah Air. Setelah lama tidak hadir, redaksi kembali dengan menyajikan artikel-artikel yang ditulis oleh penulis yang aktif bergiat baik di WALHI maupun aktivis cum intelektual. Artikel yang dihasilkan tersebut ditulis dengan pendekatan konseptual berbasis riset lapangan maupun literatur, terjemahan artikel ilmiah, dan review buku. Redaksi kali ini menempatkan “kapitalisme” sebagai latar belakang utama yang kami anggap menjadi penyebab dari krisis multidimensi yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, semua artikel yang ditulis memuat kritik dan upaya jalan keluarnya.

Sebagai satu sistem sosial yang paling dominan saat ini, kapitalisme menjadi pangkal dari merebaknya pandemi COVID-19 baik di Indonesia maupun dunia. Mengapa demikian, di dalam Bagian I artikel pembuka jurnal ini, Zaki Hussein menyebut “ Wabah bukanlah satu fenomena yang murni biologis. Kemunculan dan perkembangannya banyak dipengaruhi oleh aktivitas sosial manusia, khususnya aktivitas ekonomi dan politik. Ini terlihat jelas jika kita menilik wabah-wabah yang pernah terjadi dalam sejarah manusia (h.3).” Pembangunan perkotaan pun demikian, dalam bentuk paling kontemporerne kapitalisme-neoliberal telah merubah lanskap sosial-ekonomi kota menjadi sangat rentan terhadap warga. Menyoal reklamasi tanah di Teluk Banoa, Bali dan Teluk Jakarta relasinya dengan gerakan sosial, Rita Padawangi menunjukkan keadilan sosial jarang menjadi agenda pembangunan perkotaan. Tujuan dari proyek-proyek reklamasi diantaranya adalah untuk membangun kantong-kantong baru perumahan, areal perdagangan, dan bangunan serba guna mengikuti norma pembangunan perkotaan yang ditetapkan (pembangunanisme).

Bagian II jurnal ini, khusus mendiskusikan perkembangan ekonomi-politik plus implikasi pembangunan yang dilakukan terhadap “lingkungan hidup” di China yang ditulis oleh Muhammad Ridha. Artikel ini berupaya untuk memberikan cara pandang yang lain dalam memahami sosialisme yang berlaku di China, atau bisa disebut sebagai “sosialisme dengan karakteristik China.” Dengan data-data sekunder yang ditampilkan dengan menggunakan analisa Marxis membuat artikel ini menjadi menarik untuk didiskusikan dan diperdebatkan.

Tidak kalah penting juga, artikel dibagian II ini yang menyajikan “ekonomi nusantara” sebagai jalan keluar dari ekonomi kapitalis. Hasil riset lapangan WALHI ini ditulis oleh Boy Sembiring dan Abdul Ghofar. Sebagai narasi tanding, konsep “ekonomi nusantara” dianggap menjadi lawan dari ekonomi yang berorientasi pertumbuhan (kapitalisme). Tentu saja, akan ada perdebatan terkait konsep “ekonomi nusantara”, ini yang kami harapkan agar tercipta satu diskusi produktif terkait diskursus ekonomi alternatif di Indonesia.

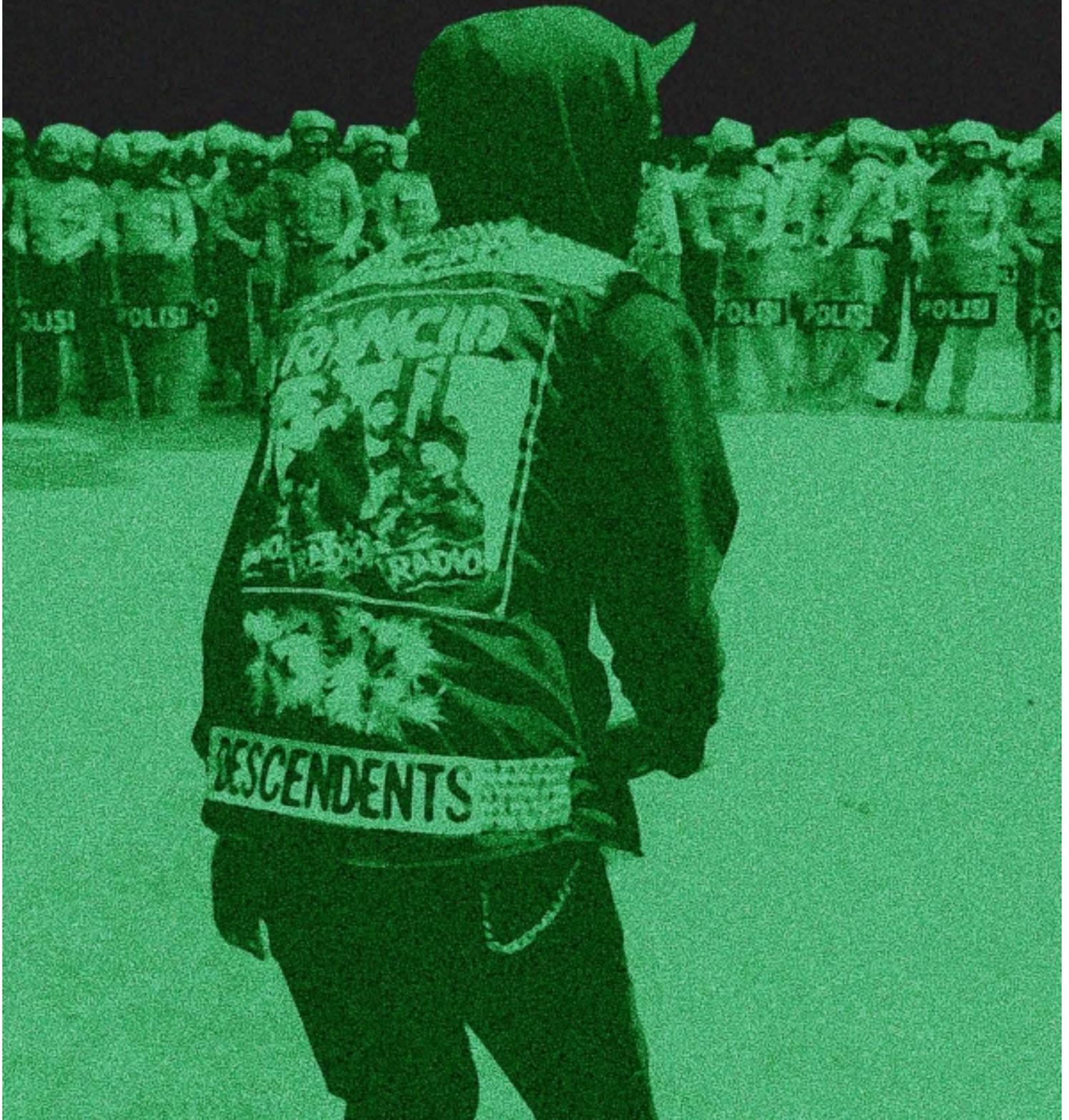
Di bagian akhir jurnal ini, redaksi mengajak Aip Saifullah untuk mereview buku “Ecocide: Melawan Pelanggaran Berat HAM di Indonesia” dari sudut pandang pembaca. Buku ini sebelumnya telah diterbitkan dan telah menjadi percakapan para sarjana hukum lingkungan dan aktivis baik di Indonesia maupun global. Karena memang ditunjukan sebagai satu seri kampanye oleh WALHI, review buku ini kami masukkan di dalam Jurnal Tanah Air 2021.

Kami ucapkan selamat membaca dan berdiskusi untuk kemajuan pengetahuan di Indonesia. Besar harapan kami artikel dalam jurnal ini dapat menjadi rujukan baik gerakan sosial maupun di lingkungan akademis.

Redaksi Jurnal Tanah Air  
Jakarta, Juni 2021

# BAGIAN 1

## Kritik Kapitalisme



# COVID-19 DAN KAPITALISME

Oleh Zaki Hussein



# Wabah Covid-19, Ekonomi Makanan Hewan Eksotis dan Kapitalisme

Mohamad Zaki Hussein<sup>1</sup>

Saat ini, dunia sedang dihantam oleh wabah COVID-19. Bermula di Wuhan pada akhir Desember 2019, penyakit ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di Indonesia, kasus pertamanya menimpa warga Depok dan ditemukan pada awal Maret 2020. Dari situ, penyakit COVID-19 menyebar ke berbagai daerah di Indonesia.

Meski kurva kasus harian beberapa negara sudah turun seperti Cina, Vietnam, Spanyol, Italia, dan Selandia Baru, tetapi kurva kasus harian dunia masih cenderung naik. Di dunia, per 26 Juni 2020, secara kumulatif terdapat 9.413.289 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi dengan 482.730 orang meninggal dunia.<sup>2</sup> Sementara di Indonesia, per 26 Juni 2020, secara kumulatif terdapat 49.009 kasus yang terkonfirmasi dengan 2.573 orang meninggal dunia.<sup>3</sup>

Secara umum tulisan ini hendak membahas penyebab wabah COVID-19. Bagian pertama membahas bagaimana aktivitas ekonomi dan politik mengakibatkan beberapa wabah yang pernah ada dalam sejarah manusia. Bagian kedua membahas bagaimana lompatan virus SARS-CoV-2 dari hewan ke manusia disebabkan oleh aktivitas ekonomi makanan hewan eksotis di Cina. Bagian ketiga membahas motor pendorong ekonomi makanan hewan eksotis di Cina, yang mana adalah kapitalisme dan bukan budaya Cina.

## Ekonomi-Politik Wabah

Wabah bukanlah suatu fenomena yang murni biologis. Kemunculan dan

perkembangannya banyak dipengaruhi oleh aktivitas sosial manusia, khususnya aktivitas ekonomi dan politik. Ini terlihat jelas jika kita menilik wabah-wabah yang pernah terjadi dalam sejarah manusia.

Wabah Kematian Hitam (Black Death) yang terjadi pada pertengahan abad ke-14, misalnya.<sup>4</sup> Wabah ini merupakan wabah pes atau sampar yang disebabkan oleh bakteri *Yersinia pestis*. Bakteri ini berasal dari hewan pengerat, khususnya tikus, dan kutunya. Ketika seekor hewan pengerat yang terinfeksi mati, dan kutunya pindah ke manusia, maka manusia bisa terinfeksi.

Setelah menginfeksi manusia, penularan bisa terjadi melalui kutu yang berpindah dari manusia ke manusia. Jika penyakit pes sampai menyebabkan pneumonia, maka penularan melalui udara (tanpa perantara kutu) juga bisa terjadi. Namun, yang terakhir ini jarang terjadi. Cara penularan yang utama adalah dengan perantara kutu.

Wabah Kematian Hitam bermula pada 1338-1339 di sekitar Danau Issyk-Kul, di bagian selatan Rusia, dekat Krimea. Di daerah itu, kulit marmut dijual oleh para pemburu ke pedagang yang kemudian menjualnya lagi di tempat lain. Para pemburu senang jika menemukan marmut yang sakit atau sekarat, karena lebih mudah ditangkap daripada marmut yang sehat.

Pada masa itu, banyak kulit marmut berasal dari marmut yang sudah mati. Kulit marmut ini berisikan kutu-kutu yang kemudian melompat ke manusia dan menularkan bakteri *Yersinia pestis*. Kulit marmut beserta kutu-kutu ini dibawa oleh para pedagang melalui jalur karavan ke arah barat. Penyakit pes pun pada akhirnya sampai di Krimea.

Di Krimea, terdapat pelabuhan-pelabuhan yang digunakan oleh para pedagang Genoa

1 Editor Indoprogress dan Anggota Partai Rakyat Pekerja

2 "WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard," World Health Organization, diakses 26 Juni 2020, <https://covid19.who.int/>.

3 "Indonesia: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard," World Health Organization, diakses 26 Juni 2020, <https://covid19.who.int/region/searo/country/id>.

4 Pembahasan ketiga wabah—Kematian Hitam, Flu Spanyol dan SARS—yang menjadi ilustrasi untuk menunjukkan pengaruh aktivitas ekonomi-politik pada wabah, sebagian besar didasarkan pada Alfred Jay Bollet, M.D., *Plagues and Poxes: The Impact of Human History on Epidemic Diseases*, (New York: Demos Medical Publishing, 2004), 17-29, 103-115 dan 221-230.

dan Venesia yang saling bersaing. Sementara itu, daerah sebelah utara Krimea dikuasai bangsa Mongol. Masing-masing pedagang Genoa dan Venesia bersekutu dengan bangsawan Mongol yang berbeda dan saling bersaing juga.

Pada tahun 1340, para pedagang Venesia bersekutu dengan Pangeran Janiberg Khan yang menguasai daerah Kipchak Barat. Mereka lalu menggempur para pedagang Genoa dan sekutunya. Para pedagang Genoa pun terdesak dan bertahan di kota pelabuhan Kaffa (sekarang bernama Feodosia dan berada di bawah Ukraina).

Saat pengepungan kota Kaffa, pasukan Janiberg Khan terjangkiti penyakit pes. Sang pangeran tidak berhasil menduduki Kaffa, tetapi ia sempat menggunakan mayat pasukannya yang terinfeksi sebagai "senjata biologi." Mayat-mayat ini dilontarkan oleh katapel-katapel tempur ke dalam kota Kaffa.

Wabah pes pun berkecamuk di Kaffa. Kutu-kutu yang ada di mayat-mayat yang dikatapel tampaknya telah menulari penduduk kota. Penularan juga mungkin terjadi melalui tikus-tikus yang keluar-masuk kota Kaffa saat pengepungan. Pada 1347-1348, kota Kaffa ditinggalkan oleh para penduduknya yang masih hidup.

Para penyintas dari Kaffa ini pergi menggunakan kapal dan sampai di berbagai kota lain, seperti Konstantinopel (sekarang Istanbul di Turki), Marseille (Prancis), Genoa, Venesia, dan Messina (sekarang di bawah Italia). Dari sini, wabah menyebar ke Spanyol, Portugal, Bavaria (sekarang Jerman), Swiss, Inggris dan negara-negara Balkan.

Penyebaran lebih lanjut di Eropa banyak difasilitasi oleh aktivitas perdagangan yang menggunakan kapal. Misalnya, wabah sampai di Inggris pada 1348 dengan kapal yang membawa anggur merah dari

Bordeaux. Kemudian, wabah sampai di Norwegia dengan kapal yang membawa kain wol dari London. Dari Norwegia, wabah juga menyebar ke negara-negara Skandinavia lainnya dengan kapal.

Wabah sampai di Polandia pada 1351, kemudian masuk ke pedalaman Rusia pada 1351 atau 1352. Kenyataan bahwa wabah ini tidak menyebar langsung dari bagian selatan Rusia—tempat asal usul wabah—ke pedalaman Rusia, tetapi memutar melalui Swedia dan Polandia, menunjukkan peran besar jalur perdagangan dalam penyebaran wabah Kematian Hitam.

Jika wabah sampai di Eropa melalui Krimea, wabah sampai di Timur Tengah melalui jalur yang berbeda. Wabah dibawa ke Bagdad dan Damaskus oleh karavan-karavan dagang dari Samarkand (sekarang di bawah Uzbekistan) melalui jalur sutra dan rempah di sebelah selatan Laut Kaspia. Pada 1347, wabah sudah sampai di Aleksandria (Mesir) dengan kapal-kapal yang membawa sutra, budak dan kulit. Dari Aleksandria, wabah menyebar ke Kairo, Gaza dan Beirut.

Selama 1348-1350, korban meninggal akibat wabah Kematian Hitam diperkirakan berjumlah 25 juta orang. Pada tahun 1350an, wabah Kematian Hitam mulai surut. Tetapi, wabah pes yang bersifat terbatas masih sering muncul sampai dengan abad ke-19. Pada 1890an, wabah pes yang agak besar kembali terjadi, tetapi kondisi ilmu pengetahuan manusia sudah berbeda. Pada 1894, bakteri *Yersinia pestis* ditemukan, yang membuka jalan bagi penemuan vaksinnya.

Selain wabah Kematian Hitam, contoh lain yang memperlihatkan peran aktivitas ekonomi dan politik manusia dalam penyebaran wabah adalah wabah "Influenza Spanyol" atau "Flu Spanyol." Wabah ini terjadi selama 1918-1920, di sekitar akhir Perang Dunia I, dan aktivitas perang ikut

berperan dalam penyebaran wabah.

Wabah influenza ini disebut “Flu Spanyol” bukan karena asalnya dari Spanyol, tetapi karena Spanyol adalah negara yang pertama kali memberitakan dampak wabah ini secara luas. Ini karena Spanyol tidak terlibat dalam perang dan tidak menerapkan sensor berita.

Ada perbedaan pendapat soal dari mana persisnya asal Flu Spanyol, tetapi ledakan wabah pertama yang tercatat muncul di Amerika Serikat (AS). Pada suatu hari di bulan Maret 1918, di pangkalan militer Fort Riley di Kansas, 107 orang mengalami sakit dengan gejala demam dan radang tenggorokan.

Lima minggu kemudian, jumlah yang sakit menjadi 1.127 tentara dan 46 orang meninggal dunia. Yang sakit didiagnosa terkena influenza, sementara yang meninggal didiagnosa karena pneumonia yang disebabkan oleh bakteri.

Pada Mei 1918, Divisi 89 dan 92 yang menyelesaikan latihan mereka di Fort Riley dikirim ke Prancis. Tidak lama kemudian, muncul kasus-kasus orang sakit influenza di Prancis. Selanjutnya, penyakit Flu Spanyol muncul di Inggris, Jerman, India, dan negara-negara Asia serta Timur Jauh.

Sampai sekarang, masih ada perbedaan pendapat tentang asal-usul virus penyebab Flu Spanyol. Ada yang mengatakan dari babi, tetapi ada juga yang mengatakan dari burung.<sup>5</sup> Yang cukup pasti, virus ini berasal dari hewan. Adapun setelah melompat ke manusia, virus ini menyebar dari manusia ke manusia melalui butiran ludah (droplet) yang keluar saat bersin atau batuk.

Gelombang utama Flu Spanyol menyusut setelah terjadi kesepakatan gencatan

senjata antara sekutu dengan Jerman pada November 1918. Gelombang tambahan terjadi selama 1919-1920. Lebih dari 21 juta orang meninggal akibat wabah Flu Spanyol dan sebagian besar meninggal di 4 bulan sebelum gencatan senjata terjadi.<sup>6</sup>

Contoh terakhir yang penting untuk dibahas di sini karena merupakan “saudara tua” COVID-19 adalah wabah Severe Acute Respiratory Syndrome (Sindrom Pernapasan Akut Berat), disingkat SARS. Wabah SARS terjadi pada akhir 2002 sampai dengan 2003.

Kasus-kasus awal SARS muncul pada November 2002 di sekitar Kota Foshan, Provinsi Guangdong, Cina. Banyak dari mereka yang terkena ini adalah pekerja restoran yang pekerjaannya menyiapkan makanan dari hewan langka. Provinsi Guangdong memang terkenal dengan makanan eksotis yang menggunakan hewan segar yang baru dibunuh setelah dipilih oleh pembeli.

Pada Desember 2002, salah satu kasus awal ini—seorang penjual ular dan burung—meninggal dunia. Di sekitar waktu yang sama, seorang koki terkena SARS dan masuk ke Rumah Sakit Rakyat di Kota Heyuan, sebelah utara Foshan. Delapan dokter di RS itu pun tertular. Pada awal Januari 2003, kota Heyuan dan Zhongshan di Provinsi Guangdong melaporkan adanya sekumpulan kasus pneumonia yang tidak biasa.

Pada Februari 2003, seorang dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Zhongshan, Dr. Liu Jianlun, pergi ke Hong Kong untuk menghadiri pernikahan keponakannya. Ia pergi dalam keadaan sakit demam. Ia tampaknya tidak menyadari bahwa penyakitnya itu adalah SARS—SARS memang baru diketahui dunia sebagai

5 Alfred Jay Bollet dalam *Plagues and Poxes* menyatakan virus Flu Spanyol berasal dari babi. Tetapi, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention, disingkat CDC) AS mengatakan belum ada konsensus universal tentang asal-usul virus Flu Spanyol. Mereka juga mengatakan, virus Flu Spanyol memiliki gen yang berasal dari burung. Lihat “1918 Pandemic (H1N1 virus),” Centers for Disease Control and Prevention, 20 Maret 2019, <https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/1918-pandemic-h1n1.html>.

6 Ini merupakan estimasi Alfred Jay Bollet dalam *Plagues and Poxes*. Adapun CDC AS dalam “1918 Pandemic (H1N1 virus)” mengestimasi korban meninggal di seluruh dunia akibat Flu Spanyol berjumlah setidaknya 50 juta orang.

penyakit baru pada Maret 2003.

Saat di Hongkong, Dr. Liu Jianlun menginap di Hotel Metropole. Ia pun menularkan beberapa tamu lain di hotel itu. Diantaranya dua orang Kanada, seorang pebisnis Amerika yang hendak menuju Hanoi, tiga perempuan dari Singapura, dan seorang penduduk Hong Kong. Tidak lama kemudian, SARS menyebar di Hong Kong dan muncul di Hanoi, Singapura serta Toronto. Dr. Liu Jianlun sendiri pada akhirnya meninggal dunia di Hong Kong.

Patogen penyebab SARS adalah virus corona, tetapi yang jenisnya berbeda dengan penyebab COVID-19. Para mikrobiolog dari Universitas Hong Kong menemukan virus ini di beberapa hewan yang dijual di pasar makanan di Guangdong, seperti musang bulan dan anjing rakun. Virus corona penyebab SARS tampaknya melompat ke manusia dari hewan-hewan ini.

Penularan SARS dari manusia ke manusia terjadi melalui butiran ludah (droplet) yang keluar saat bersin atau batuk. Penyebarannya ke berbagai negara banyak difasilitasi oleh perjalanan wisata dan bisnis antar-negara dengan pesawat terbang. Secara global wabah SARS menginfeksi 8.098 orang dan yang meninggal berjumlah 774 orang.<sup>7</sup>

Berdasarkan pembahasan ketiga wabah di atas, kita bisa melihat bagaimana aktivitas ekonomi dan politik manusia memfasilitasi penyebaran wabah. Dalam kasus wabah Kematian Hitam, aktivitas perdagangan memfasilitasi penyebaran wabah. Dalam kasus Flu Spanyol, aktivitas perang memfasilitasi penyebaran wabah. Dalam kasus SARS, aktivitas wisata dan perjalanan bisnis antar-negara memfasilitasi penyebaran wabah.

Begitu pula, lompatan patogen penyebab wabah dari hewan ke manusia juga difasilitasi oleh aktivitas ekonomi manusia. Dalam kasus wabah Kematian Hitam, lompatan bakteri *Yersinia pestis* dari marmut ke manusia difasilitasi oleh aktivitas bisnis kulit marmut. Dalam kasus SARS, lompatan virus corona dari hewan ke manusia difasilitasi oleh aktivitas bisnis makanan dari hewan langka atau eksotis.

### Menelusuri Asal-Usul COVID-19

Ledakan pertama wabah COVID-19 terjadi pada akhir 2019 di Kota Wuhan, Cina. Pada 31 Desember 2019, Komisi Kesehatan Daerah Wuhan mengumumkan adanya sekumpulan kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya.<sup>8</sup> Pemerintah Cina juga memberitahukan WHO tentang kasus ini. Pada 7 Januari 2020, sebuah virus corona tipe baru ditemukan sebagai penyebabnya.<sup>9</sup>

Tidak sampai sebulan kemudian, penyakit ini sudah menyebar cukup luas. Pada 30 Januari, terdapat 7.818 kasus yang terkonfirmasi di seluruh dunia. Sebagian besar berada di Cina, tetapi ada 82 kasus yang tersebar di 18 negara. Penyakit ini kemudian diberi nama resmi Corona Virus Disease 2019 (Penyakit Virus Corona 2019), disingkat COVID-19. Sementara virusnya diberi nama SARS-CoV-2. Pada 11 Maret, WHO menyatakan COVID-19 sebagai sebuah pandemi.<sup>10</sup>

Karena sebagian besar kasus awal di Wuhan adalah pekerja dan pelanggan Pasar Grosir Makanan Laut Huanan, maka pasar itu dianggap sebagai tempat asal wabah. Pemerintah Cina sendiri menutup pasar itu pada 1 Januari 2020.<sup>11</sup>

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Cina juga mengambil

7 "SARS Basics Fact Sheet," Centers for Disease Control and Prevention, 6 Desember 2017, <https://www.cdc.gov/sars/about/fs-sars.html>.

8 "WHO Timeline - COVID-19," World Health Organization, 27 April 2020, <https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19>.

9 "Novel Coronavirus – China," World Health Organization, 12 Januari 2020, <https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/en/>.

10 "WHO Timeline - COVID-19."

11 "Novel Coronavirus – China."

sampel lingkungan dari pasar Huanan untuk dianalisis. Hasilnya, 33 dari 585 sampel yang dikumpulkan, mengandung asam nukleat virus SARS-CoV-2. Adapun 31 dari 33 sampel positif itu berasal dari bagian barat pasar Huanan, di mana banyak terdapat stan penjualan hewan liar.<sup>12</sup>

Namun, riset yang dilakukan sekumpulan ilmuwan Cina terhadap fitur-fitur klinis dari 41 pasien awal di Wuhan menemukan hal lain. Dari ke-41 pasien itu, 27 orang memang terpapar secara langsung dengan pasar Huanan. Tetapi, pasien yang pertama kali menunjukkan gejala COVID-19—gejalanya muncul pada 1 Desember 2019—ternyata tidak terpapar oleh pasar Huanan. Dia juga tidak memiliki hubungan epidemiologis apapun dengan pasien-pasien yang menunjukkan gejala COVID-19 setelah dia.<sup>13</sup>

Temuan ini menimbulkan pertanyaan, dari mana pasien pertama itu tertular penyakit COVID-19? Temuan ini juga membuat teori yang menyatakan asal wabah adalah pasar Huanan menjadi meragukan. Berdasarkan temuan ini, ahli penyakit menular Dr. Daniel Lucey berhipotesis bahwa virus SARS-CoV-2 muncul di luar pasar Huanan dan sudah menyebar sejak Oktober-November 2019 atau lebih awal lagi.<sup>14</sup>

Dalam perkembangannya, muncul "teori konspirasi" yang menyatakan virus SARS-CoV-2 berasal dari laboratorium. Variannya ada banyak, tetapi bisa dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu teori yang menyatakan virus ini sengaja dibuat sebagai "senjata biologi" dan yang menyatakan virus ini tidak sengaja tersebar karena kebocoran di laboratorium.

Penyebaran teori konspirasi tidak terlepas dari urusan politik. Di antara mereka yang gemar menyebar teori konspirasi adalah

para politisi. Mereka saling menuduh lawan politiknya sebagai pembuat virus SARS-CoV-2. Adapun AS dan Cina adalah negara yang paling sering dituduh sebagai pembuat virus ini.

Presiden Trump sendiri cukup agresif dalam menyebar teori konspirasi yang menyalahkan Cina. Ia menyebar teori bahwa virus SARS-CoV-2 berasal dari sebuah laboratorium di Wuhan. Pada 14 April 2020, ia menghentikan kontribusi dana AS ke WHO karena menganggap WHO gagal merespons wabah COVID-19. Ia pun menuduh WHO sebagai boneka Cina.<sup>15</sup>

Teori konspirasi ini kemudian mendapatkan bantahan dari berbagai ilmuwan. Salah satu bantahan yang cukup sering dirujuk karena ketajaman argumennya adalah artikel Kristian G. Andersen dkk. di *Jurnal Nature*. Berdasarkan analisis komparatif terhadap genom atau materi genetik virus SARS-CoV-2 dan virus-virus sejenis, mereka menyatakan bahwa sangat kecil kemungkinan virus SARS-CoV-2 dibuat di laboratorium.<sup>16</sup>

Ada beberapa alasan mereka. Pertama, komponen RBD (receptor binding-domain atau domain pengikat reseptor) virus SARS-CoV-2 lebih sesuai untuk mengikat reseptor ACE2 (Angiotensin-converting enzyme 2 atau enzim pengubah Angiotensin 2) di manusia daripada RBD virus SARS-CoV (penyebab SARS). Ini kenapa COVID-19 lebih menular daripada SARS.

Namun, susunan RBD virus SARS-CoV-2 bukanlah yang ideal untuk mengikat ACE2. Begitu pula, ada susunan RBD yang optimal dan bisa dibuat berdasarkan RBD virus SARS-CoV, tetapi bukan ini yang terdapat di virus SARS-CoV-2. Selain itu, RBD virus SARS-CoV-2 punya kesamaan yang kuat

12 "China detects large quantity of novel coronavirus at Wuhan seafood market," Xinhuanet, 27 Januari 2020,

[http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/27/c\\_138735677.htm](http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/27/c_138735677.htm).

13 Chaolin Huang et al., "Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China," *The Lancet* 395, No. 10223 (2020): 497-500, doi:10.1016/S0140-6736(20)30183-5.

14 Daniel Lucey, "UPDATE Wuhan coronavirus – 2019-nCoV Q&A #6: An evidence-based hypothesis," wawancara dengan Science Speaks, Science Speaks, 25 Januari 2020, <https://sciencespeaksblog.org/2020/01/25/wuhan-coronavirus-2019-ncov-qa-6-an-evidence-based-hypothesis/>.

15 "Coronavirus: Trump accuses WHO of being a 'puppet of China'," BBC, 19 Mei 2020, <https://www.bbc.com/news/health-52679329>.

16 Kristian G. Andersen et al., "The proximal origin of SARS-CoV-2," *Nature* 26 (2020): 450-452, doi:10.1038/s41591-020-0820-9.

dengan RBD beberapa virus corona di tenggiling. Ini adalah tanda-tanda bahwa virus ini bukan buatan manusia, tetapi hasil mutasi alami.

Kemudian, jika virus ini dibuat dengan rekayasa genetika, maka salah satu sistem genetika arah-balik yang tersedia untuk virus corona beta kemungkinan akan digunakan. Tetapi, data genetiknya menunjukkan bahwa virus SARS-CoV-2 tidak diturunkan dari backbone virus apapun yang sebelumnya pernah digunakan.

Bagaimana dengan kemungkinan virus SARS-CoV-2 terbuat secara tidak sengaja dalam proses pembiakan sel di suatu riset virus corona lain di laboratorium? Menurut Andersen dkk., secara teoritik mutasi RBD virus SARS-CoV-2 bisa terjadi dalam proses pembiakan sel. Tetapi, ada bagian lain dari virus ini yang sulit terbentuk melalui proses pembiakan sel. Komponen glikan terkait-O (O-linked glycans) dari virus SARS-CoV-2, misalnya, mensyaratkan keterlibatan sebuah sistem imun untuk pembentukannya.

Jadi, kemungkinan virus SARS-CoV-2 dibuat secara sengaja atau terbuat tidak sengaja di laboratorium sangat kecil. Penjelasan yang lebih sesuai dengan bukti-bukti empiris yang ada ialah virus ini melompat dari hewan.

Pada 19 Februari 2020, saat Cina lagi dihantam keras oleh wabah COVID-19, sekumpulan ilmuwan dari berbagai negara mengirimkan pernyataan sikap mereka ke jurnal *The Lancet*. Mereka menyatakan solidaritas dan dukungan mereka terhadap para ilmuwan dan pekerja kesehatan di Cina yang sedang berjuang melawan wabah COVID-19.<sup>17</sup>

Mereka juga mengecam keras teori konspirasi, yang menurut mereka,

menciptakan ketakutan, rumor dan prasangka yang bisa merusak kerjasama global dalam melawan penyakit COVID-19. Dengan merujuk ke 8 tulisan lain yang sebagian besar diterbitkan di jurnal ilmiah, mereka menyatakan bahwa analisa ilmuwan dari berbagai negara menyimpulkan virus SARS-CoV-2 berasal dari hewan.

Adapun penulis sejauh ini juga berposisi bahwa virus SARS-CoV-2 berasal dari hewan. Meskipun penelusuran terhadap asal-usul virus ini sekarang masih berjalan, dan belum ada kesimpulan yang betul-betul konklusif, tetapi bukti-bukti empiris yang ada sejauh ini mengarah pada kesimpulan bahwa virus ini berasal dari hewan.

Ini bukan berarti virus SARS-CoV-2 berasal dari pasar Huanan, mengingat pasien yang pertama kali menunjukkan gejala COVID-19 di Wuhan tidak terpapar oleh pasar Huanan. Virus ini bisa berasal dari pasar makanan hewan eksotis lain di Wuhan atau di luar Wuhan. Bahkan virus ini bisa bukan berasal dari pasar makanan hewan eksotis, tetapi dari jenis usaha lain dalam rantai pasokan bisnis makanan hewan eksotis, seperti peternakannya.

### **Ekonomi Makanan Hewan Eksotis dan Kapitalisme**

Adanya indikasi bahwa virus SARS-CoV-2 berasal dari pasar makanan hewan eksotis di Cina mengakibatkan anggapan yang keliru dan berkecenderungan rasis bahwa penyakit COVID-19 disebabkan oleh budaya makan orang Cina.

Senator AS untuk Texas, John Cornyn, misalnya, menyatakan bahwa "Cina harus disalahkan karena budaya orang-orangnya yang memakan kelelawar dan ular dan anjing dan hal-hal semacam itu." Ia juga menyatakan "Itulah kenapa Cina selama ini

17 Charles Calisher et al., "Statement in support of the scientists, public health professionals, and medical professionals of China combatting COVID-19," *The Lancet* 395, No. 10226 (2020): E42-E43, doi:10.1016/S0140-6736(20)30418-9.

menjadi sumber dari banyak virus ini seperti SARS, seperti MERS, flu babi, dan sekarang virus corona."<sup>18</sup>

Selain berkecenderungan rasis, pernyataan Cornyn juga keliru secara faktual. Pertama, MERS yang merupakan singkatan dari Middle East Respiratory Syndrome (Sindrom Pernapasan Timur Tengah) bukan berasal dari Cina, tetapi Arab Saudi. Begitu pula, flu babi—jika yang dimaksud adalah flu babi yang mewabah pada 2009—bukan berasal dari Cina, tapi Amerika Serikat. Terakhir, dua hewan yang disebut Cornyn, yaitu ular dan anjing, tidak ada hubungannya dengan penyakit-penyakit yang ia sebut.

Mengenai apakah praktik memakan daging hewan eksotis merupakan budaya Cina, riset yang dilakukan oleh Li Zhang, Ning Hua dan Shan Sun di beberapa daerah di Cina, seperti Shanghai, Guangzhou, Beijing, Chengdu dan Kunming, menunjukkan bahwa dari 1.352 responden yang disurvei, 932 atau 68,9% tidak pernah mengonsumsi hewan liar. Hanya 420 atau 31,1% yang mengonsumsi hewan liar, meski angka ini bisa lebih besar, mengingat responden bisa saja menyembunyikan perilaku konsumsi mereka ketika menjawab survei.<sup>19</sup>

Adapun dari 420 responden yang mengonsumsi hewan liar, 326 mengonsumsi spesies yang ditanyakan dalam survei dan menyadari frekuensi konsumsi mereka. Dari 326 responden ini, 59,8% merupakan konsumen kelas ringan (2 kali atau kurang dalam setahun); 28,7% konsumen kelas tengah (3-9 kali per tahun), dan hanya 11,5% yang merupakan konsumen kelas berat (10 kali atau lebih dalam setahun).<sup>20</sup>

Yang menarik adalah data karakteristik

mereka yang mengonsumsi hewan liar. Mereka yang masuk dalam kelompok konsumen kelas berat kebanyakan adalah laki-laki muda berusia di bawah 35 tahun dengan latar belakang pendidikan yang baik dan pendapatan rumah tangga bulanan yang cukup tinggi—mayoritas berpendapatan di atas 3.001 Renmibi atau Yuan.<sup>21</sup>

Tempat di mana hewan liar ini dikonsumsi juga tampak terkait dengan latar belakang sosial-ekonomi konsumennya. 41% konsumsi terjadi di restoran, baik yang mewah maupun biasa, dan 34% terjadi di hotel. Sementara, pembelian di pasar dan supermarket masing-masing adalah 32,8% dan 24%.<sup>22</sup>

Sementara itu, riset serupa oleh organisasi lingkungan hidup, Traffic, di 6 kota besar di Cina, yakni Beijing, Shanghai, Guangzhou, Kunming, Harbin dan Chengdu, memperlihatkan bahwa dari 969 responden yang mereka wawancara, 44% mengonsumsi hewan liar selama 12 bulan terakhir; sekitar 18% mengonsumsi hewan liar lebih dari setahun yang lalu tapi tidak dalam 12 bulan terakhir, dan 38% belum pernah mengonsumsi hewan liar.<sup>23</sup>

Meski yang pernah mengonsumsi hewan liar—baik dalam setahun terakhir atau sebelumnya—lebih banyak dari yang tidak pernah mengonsumsi hewan liar, tapi 38% adalah angka yang cukup signifikan. Begitu pula, kalau kita lihat rincian datanya, praktik memakan hewan liar terkonsentrasi hanya di beberapa jenis hewan liar saja.

Dalam kuesioner Traffic, ada 21 jenis hewan yang dikelompokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan hukum negara Cina. Kelompok 1 berisikan hewan yang mendapat

18 Pembahasan tentang pernyataan John Cornyn ini didasarkan pada Katie Shepherd, "John Cornyn criticized Chinese for eating snakes. He forgot about the rattlesnake roundups back in Texas," *The Washington Post*, 19 Maret 2020, <https://www.washingtonpost.com/nation/2020/03/19/coronavirus-china-cornyn-blame/>.

19 Li Zhang, Ning Hua dan Shan Sun, "Wildlife trade, consumption and conservation awareness in southwest China," *Biodiversity and Conservation* 17 (2008): 1506, 1509 dan 1511, doi:10.1007/s10531-008-9358-8.

20 Ibid, 1503 dan 1509-1510.

21 Ibid, 1510.

22 Ibid, 1503.

23 Rachel M. Wasser dan Priscilla Bei Jiao, ed., *Understanding the Motivations: The First Step Toward Influencing China's Unsustainable Wildlife Consumption* (Cina: Traffic East Asia, 2010), 12 dan 16, <https://www.traffic.org/site/assets/files/6267/china-motivations-study.pdf>.

perlindungan kelas 1; kelompok 2 berisikan hewan yang mendapat perlindungan kelas 2; kelompok 3 berisikan hewan yang dilindungi karena memiliki nilai sosial, ekonomi dan ilmu pengetahuan; kelompok 4 berisikan hewan yang tidak dilindungi oleh hukum Cina. Kebanyakan hewan di kelompok 4 adalah hewan laut yang oleh hampir setengah responden dianggap bukan "hewan liar."<sup>24</sup>

Dari ke-21 jenis hewan yang ditanyakan, yang cukup banyak dimakan dalam 12 bulan terakhir oleh responden hanyalah teripang (19,8% responden memakannya), kura-kura air tawar (11,8%), kerang abalon (10,9%), burung liar (10,8%) dan ular (10,5%). Semua hewan itu berada di kelompok 3 dan 4.<sup>25</sup>

Adapun responden yang memakan hewan lain di luar ke-5 hewan itu dalam 12 bulan terakhir jumlahnya sangat sedikit. Responden yang memakan hewan mamalia kecil seperti musang bulan yang terkait dengan virus penyebab SARS, misalnya, hanya 0,8%. Kemudian, responden yang pernah memakan tenggiling yang diduga terkait dengan virus penyebab Covid-19, misalnya, hanya 0,6%.<sup>26</sup>

Yang juga penting dicatat, riset Traffic menemukan bahwa karakteristik mereka yang mengkonsumsi hewan liar mirip dengan yang ditemukan oleh riset Li Zhang dkk., yakni cenderung berpendidikan dan berpendapatan tinggi.

Diantara mereka yang berpendapatan tinggi, 50,3% pernah memakan hewan liar dalam setahun terakhir dan hanya 29,2% yang tidak pernah memakan hewan liar. Sementara,

diantara mereka yang berpendapatan rendah, 46,5% tidak pernah memakan hewan liar dan hanya 29,7% yang pernah memakannya dalam setahun terakhir.<sup>27</sup>

Dari sisi latar belakang pendidikan, polanya juga mirip. Diantara mereka yang sampai kuliah 2 atau 4 tahun, 41% pernah memakan hewan liar dalam setahun terakhir dan hanya 36,2% yang tidak pernah memakannya. Sementara, diantara mereka yang hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama atau di bawahnya, 50,5% tidak pernah memakan hewan liar dan hanya 26,6% yang pernah memakan hewan liar dalam setahun terakhir.<sup>28</sup>

Fenomena ini tidak begitu mengherankan jika kita melihat harga daging hewan eksotis yang cukup mahal. Harga rata-rata kerang abalon pada 2016, misalnya, adalah sekitar US\$26 per kg.<sup>29</sup> Sementara, tenggiling yang merupakan hewan yang sebenarnya ilegal untuk diperdagangkan di Cina, harganya pada 2016 adalah sekitar US\$600 per kg. Adapun di restoran-restoran di Cina bagian selatan, harga tenggiling bisa mencapai US\$1.000 per ekor.<sup>30</sup>

Terkait motivasi konsumen hewan liar, hampir setengah responden menyatakan bahwa daging hewan liar lebih bergizi (49%), lebih sehat dan alamiah (40%), serta lebih memberikan manfaat pengobatan dan perawatan bagi tubuh (53%) dibandingkan daging hewan konvensional. Gagasan bahwa daging hewan liar menyehatkan dipengaruhi oleh dunia pengobatan tradisional Cina dan juga ide modern tentang "makanan hijau" (green foods).<sup>31</sup>

24 Hewan yang ada di kelompok 1 dan 2 dilarang untuk diburu dengan tujuan komersial di Cina, sementara hewan di kelompok 3 dapat diburu dengan izin pemerintahan provinsi. Lihat Ibid, 6 dan 14.

25 Ibid, 20.

26 Ibid.

27 Dalam riset Traffic, angka pendapatan tinggi, menengah dan rendah bergantung pada kotanya. Riset ini membagi 6 kota tempat riset ini dilakukan menjadi 2 kelompok. Beijing, Shanghai dan Guangzhou dikelompokkan sebagai "kota tingkat pertama," sementara Kunming, Harbin dan Chengdu dikelompokkan sebagai "kota tingkat kedua." Di kota tingkat pertama, angka pendapatan rendah adalah US\$209-836, sementara angka pendapatan tinggi adalah US\$1.253 atau lebih. Di kota tingkat kedua, angka pendapatan rendah adalah US\$139-418, sementara angka pendapatan tinggi adalah US\$696 atau lebih. Lihat ibid, 12-13 dan 18.

28 Ibid, 18.

29 "Abalone production continues to grow, coupled with continuing demand, prices high and stable," Food and Agriculture Organization of the United Nations, 3 Juli 2017, <http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/resource-detail/en/c/902597/>.

30 Neha Thirani Bagri, "China's insatiable thirst for pangolin scales is fed by an international black market," Quartz, 31 Desember 2016, <https://qz.com/874854/chinas-insatiable-thirst-for-pangolin-scales-is-fed-by-an-international-black-market/>.

31 Rachel M. Wasser dan Priscilla Bei Jiao, ed., op. cit., 23.

Sementara itu, lebih dari seperempat responden menganggap makanan daging hewan liar merepresentasikan status sosial dan merupakan suguhan istimewa untuk tamu atau diri mereka sendiri. Sekitar 40% responden juga menyatakan bahwa makanan daging hewan liar tidak mungkin dihindari di dunia bisnis.

Terkait di momen apa konsumsi hewan liar terjadi, riset Traffic menemukan dua momen kunci, yaitu di acara bisnis (khususnya untuk hewan liar di kelompok 1 dan 2) dan festival-festival tradisional (kebanyakan makanan laut). Namun, diantara responden yang memakan hewan liar di kelompok 3, setengahnya menyatakan mereka memakan hewan liar tersebut sebagai makanan biasa. Ada sepersepuluh dari mereka yang mengonsumsi hewan liar selama setahun terakhir, mengonsumsi hewan di kelompok 3 dan 4 setidaknya sebulan sekali.

Jadi, apakah praktik memakan hewan eksotis merupakan budaya Cina? Jika yang dimaksud dengan "budaya Cina" adalah bahwa daging hewan eksotis itu merupakan makanan harian masyarakat Cina, tampaknya hal itu tidaklah demikian. Jumlah yang tidak pernah memakan hewan eksotis cukup banyak. Yang menjadi konsumen kelas berat juga hanya sedikit. Dan jenis hewan eksotis yang dimakan pun terkonsentrasi hanya di beberapa jenis hewan saja.

Melihat bahwa mereka yang mengonsumsi hewan eksotis cenderung berpendidikan dan berpendapatan tinggi; lalu sebagian konsumen mempersepsi makanan daging hewan eksotis merepresentasikan status sosial, dan bahwa praktik ini cukup marak di dunia bisnis, penulis berpendapat bahwa praktik ini sepertinya lebih merupakan praktik kelas

sosial tertentu, dalam hal ini kelas menengah ke atas di Cina, daripada praktik umum masyarakat Cina.

Ini bukan berarti praktik itu sama sekali tidak dipengaruhi oleh "budaya tradisional" Cina. Misalnya, di atas sudah disebutkan pengaruh gagasan pengobatan tradisional Cina terhadap kepercayaan sebagian konsumen bahwa daging hewan liar itu menyehatkan. Tapi, praktik memakan hewan eksotis itu memiliki "karakter kelas" yang kuat. Mungkin bisa dikatakan bahwa praktik ini merupakan budaya kelas menengah ke atas di Cina, tapi bukan budaya masyarakat Cina secara umum.

Pertumbuhan pesat kelas menengah Cina dipicu oleh peluncuran ulang berbagai pembaharuan pada 1990an.<sup>34</sup> Berbagai pembaharuan ini merupakan kelanjutan dari penerapan "ekonomi pasar sosialis" yang dimulai sejak akhir 1970an, yang sebenarnya merupakan perjalanan kembali ke kapitalisme. Langkah ini tampaknya diambil karena problem kemacetan perkembangan kekuatan produktif, yang biasa terjadi pada negara-negara sosialis yang belum maju dan hendak menjalani transformasi sosialis di tengah keputungan sistem ekonomi dunia yang masih kapitalistik.

Standar kehidupan di Cina pun meningkat pesat. Selama 1978-1990, konsumsi material per kapita riil meningkat rata-rata 7% per tahun. Sementara, selama 1992-2012, pendapatan rumah tangga tahunan yang siap dibelanjakan (pendapatan dikurangi pajak langsung) per kapita meningkat sekitar 10 kali lipat dari 784 ke 7.917 Yuan di pedesaan, dan meningkat 13 kali lipat dari 1.826 ke 24.565 Yuan di perkotaan. Perbedaan tingkat kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan sosial. Tampaknya inilah

34 Pembahasan tentang pertumbuhan kelas menengah Cina sebagian besar didasarkan pada Jean-Louis Rocca, *The Making of the Chinese Middle Class: Small Comfort and Great Expectations* (New York: Palgrave Macmillan, 2017), 21-30.

ongkos dari kemajuan ala kapitalis.

Pada awal tahun 2000an, konsumen tingkat menengah dari barang-barang yang tidak habis sekali pakai (seperti mobil, kulkas, dlsb.) berjumlah 56,9% dari total penduduk. Ini menunjukkan, pada tahun itu sudah terbentuk kelas menengah dengan jumlah yang signifikan. Sebagian besar, yakni 77%, berada di perkotaan, sementara hanya 43,7% yang berada di pedesaan. Adapun salah satu cara kelas menengah ini menegaskan status sosialnya adalah dengan konsumsi.

Konsumsi makanan hewan eksotis oleh sebagian kelas menengah ke atas di Cina tidak akan bisa terwujud jika tidak ada aktivitas bisnis (produksi dan perdagangan) yang menyediakannya. Dan pelaku bisnis makanan hewan eksotis tidak hanya berasal dari Cina. Negara penghasil kerang abalon, misalnya, terdiri dari (selain Cina) Korea Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Meksiko, Chili dan AS. Pada 2015, Australia yang merupakan negara barat adalah penghasil kerang abalon ketiga terbesar di dunia.<sup>35</sup>

Begitu pula dengan teripang, ada berbagai negara yang menjadi penghasil teripang. Indonesia yang masyarakatnya jarang memakan teripang, sudah menjadi penghasil teripang sejak zaman VOC. Pada tahun 2000, Indonesia menjadi penghasil teripang terbesar di dunia dengan tujuan utama ekspor ke Cina, Singapura dan Taiwan. Saat ini, teripang tampak semakin langka di Indonesia dan ini bisa berdampak buruk pada ekosistem laut.<sup>36</sup>

Sementara itu, tenggiling yang dilarang diperdagangkan di Cina dan banyak negara lain karena merupakan hewan langka, perdagangan ilegalnya melibatkan pelaku di

berbagai negara. Selama 2010-2015, sepuluh negara yang paling banyak terlibat dalam perdagangan ilegal tenggiling, baik sebagai asal, transit, atau tujuan, adalah Cina, AS, Vietnam, Malaysia, Hongkong, Thailand, Laos, Nigeria, Indonesia dan Jerman. Tidak semua tenggiling ini dikonsumsi sebagai makanan. Di AS, misalnya, tenggiling dipakai kulitnya untuk membuat sepatu bot, ikat pinggang, dlsb.<sup>37</sup>

Bisnis hewan eksotis (tidak terbatas hanya pada yang digunakan untuk makanan) tampaknya merupakan bisnis yang cukup menguntungkan. Pada 2005, Traffic Eropa memperkirakan perdagangan satwa liar legal (tidak termasuk ikan) bernilai US\$22,8 milyar. Estimasi lain memperkirakan perdagangan satwa liar yang legal bernilai US\$25 milyar, sementara yang ilegal sekitar US\$7,6-8,3 milyar. Adapun Koalisi Melawan Perdagangan Satwa Liar (Coalition Against Wildlife Trafficking, disingkat CAWT) perdagangan satwa liar ilegal bernilai \$10 milyar.<sup>38</sup>

Jadi, jika kita abstraksikan lebih jauh lagi, motor pendorong aktivitas di sektor ekonomi makanan hewan eksotis bukanlah budaya Cina, tetapi kapitalisme. Di sisi konsumsi, maraknya praktik ini didorong oleh pertumbuhan kelas menengah ke atas di Cina yang dipicu oleh berbagai pembaharuan ekonomi, yang sebenarnya adalah perjalanan kembali ke kapitalisme. Di sisi persediaan, terdapat jaringan bisnis hewan eksotis yang berwatak global dan beroperasi dengan logika pencarian laba tanpa memperhitungkan kelestarian lingkungan hidup.

35 "Abalone production continues to grow."

36 Jerome Wirawan, "Indonesia 'penghasil teripang terbesar dunia', tapi teripang kini 'sulit ditemukan', BBC Indonesia, 11 Maret 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-43207713>.

37 Sarah Heinrich et al., The Global Trafficking of Pangolins: A comprehensive summary of seizures and trafficking routes from 2010-2015 (Petaling Jaya: Traffic, 2017), 10-11 dan 25, <https://www.traffic.org/site/assets/files/1606/global-pangolin-assessment.pdf>.

38 Jeremy Haken, Transnational Crime in the Developing World (Global Financial Integrity, 2011), 11, [https://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2014/05/gfi\\_transnational\\_crime\\_high-res.pdf](https://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2014/05/gfi_transnational_crime_high-res.pdf).

39 Bryony A. Jones et al., "Zoonosis emergence linked to agricultural intensification and environmental change," Proceedings of the National Academy of Sciences 110, No. 21 (2013): 8400, doi:10.1073/pnas.1208059110.

## Catatan Penutup

Berdasarkan uraian di atas, kita mendapatkan kesimpulan berikut. Bahwa sama seperti banyak wabah sebelumnya dalam sejarah manusia, wabah COVID-19 bukanlah sebuah fenomena yang murni biologis. Virus SARS-CoV-2 melompat ke manusia akibat aktivitas manusia di sektor ekonomi makanan hewan eksotis.

Motor pendorong aktivitas ini bukanlah budaya Cina, tetapi kapitalisme. Di sisi konsumsi, maraknya praktik ini didorong oleh pertumbuhan kelas menengah ke atas di Cina yang dipicu oleh berbagai pembaharuan ekonomi yang berwatak kapitalistik—membuka diri terhadap investasi asing, privatisasi, dekollektivisasi di pedesaan, dlsb. Di sisi persediaan, terdapat jaringan bisnis hewan eksotis yang berwatak global dan beroperasi dengan logika pencarian laba. Wabah COVID-19, dengan demikian, adalah produk kapitalisme.

Lompatan patogen dari hewan ke manusia akibat aktivitas ekonomi manusia sudah berkali-kali terjadi sebelum wabah COVID-19. Selain SARS dan flu Spanyol yang telah dibahas di atas, ada banyak patogen lain yang muncul di zaman modern ini akibat aktivitas ekonomi manusia. Sebagai contoh, berbagai virus terkait kelelawar yang muncul di Australia, seperti virus Hendra, lyssavirus kelelawar Australia dan virus Menangle, terkait dengan hancurnya habitat kelelawar akibat deforestasi dan ekspansi pertanian.

Dengan adanya wabah COVID-19, sudah saatnya kita berpikir ulang tentang sistem ekonomi tempat kita hidup, yaitu kapitalisme. Wabah ini merupakan salah satu dari sekian banyak bukti bahwa sistem kapitalisme—yang motornya adalah akumulasi laba dan kompetisi pasar—tidak cocok dengan kemaslahatan manusia. Kita membutuhkan sebuah sistem ekonomi baru yang benar-benar berorientasi pada kemaslahatan manusia, yang tentu saja memerlukan dukungan lingkungan hidup yang sehat.

## Daftar Pustaka

"Abalone production continues to grow, coupled with continuing demand, prices high and stable." Food and Agriculture Organization of the United Nations. 3 Juli 2017.

<http://www.fao.org/in-action/globefish/market-reports/resource-detail/en/c/902597/>.

Andersen, Kristian G. et al. "The proximal origin of SARS-CoV-2." *Nature* 26 (2020): 450-452. doi:10.1038/s41591-020-0820-9.

Bagri, Neha Thirani. "China's insatiable thirst for pangolin scales is fed by an international black market." *Quartz*. 31 Desember 2016. <https://qz.com/874854/chinas-insatiable-thirst-for-pangolin-scales-is-fed-by-an-international-black-market/>.

Bollet, Alfred Jay, M.D. *Plagues and Poxes: The Impact of Human History on Epidemic Diseases*. New York: Demos Medical Publishing, 2004.

Calisher, Charles et al. "Statement in support of the scientists, public health professionals, and medical professionals of China combatting COVID-19." *The Lancet* 395, No. 10226 (2020): E42-E43. doi:10.1016/S0140-6736(20)30418-9.

"China detects large quantity of novel coronavirus at Wuhan seafood market." *Xinhuanet*. 27 Januari 2020. [http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/27/c\\_138735677.htm](http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/27/c_138735677.htm).

"Coronavirus: Trump accuses WHO of being a 'puppet of China'." *BBC*. 19 Mei 2020. <https://www.bbc.com/news/health-52679329>.

Haken, Jeremy. *Transnational Crime in the Developing World*. Global Financial Integrity, 2011. [https://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2014/05/gfi\\_transnational\\_crime\\_high-res.pdf](https://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2014/05/gfi_transnational_crime_high-res.pdf).

Heinrich, Sarah et al. *The Global Trafficking of Pangolins: A comprehensive summary of seizures and trafficking routes from 2010-2015*. Petaling Jaya: Traffic, 2017. <https://www.traffic.org/site/assets/files/1606/global-pangolin-assessment.pdf>.

Huang, Chaolin et al. "Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China." *The Lancet* 395, No. 10223 (2020): 497-506. doi:10.1016/S0140-6736(20)30183-5.

"Indonesia: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard." World Health Organization. Diakses 26 Juni 2020. <https://covid19.who.int/region/searo/country/id>.

Jones, Bryony A. et al. "Zoonosis emergence linked to agricultural intensification and environmental change." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 110, No. 21 (2013): 8399-8404. doi:10.1073/pnas.1208059110.

Lucey, Daniel. "UPDATE Wuhan coronavirus – 2019-nCoV Q&A #6: An evidence-based hypothesis." *Wawancara dengan Science Speaks*. *Science Speaks*, 25 Januari 2020. <https://sciencespeaksblog.org/2020/01/25/wuhan-coronavirus-2019-ncov-qa-6-an-evidence-based-hypothesis/>.

"Novel Coronavirus – China." World Health Organization. 12 Januari 2020. <https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/en/>.

"1918 Pandemic (H1N1 virus)." Centers for Disease Control and Prevention. 20 Maret 2019. <https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/1918-pandemic-h1n1.html>.

Rocca, Jean-Louis. *The Making of the Chinese Middle Class: Small Comfort and Great Expectations*. New York: Palgrave Macmillan, 2017.

"SARS Basics Fact Sheet." Centers for Disease Control and Prevention. 6 Desember 2017. <https://www.cdc.gov/sars/about/fs-sars.html>.

Shepherd, Katie. "John Cornyn criticized Chinese for eating snakes. He forgot about the rattlesnake roundups back in Texas." The Washington Post. 19 Maret 2020.

<https://www.washingtonpost.com/nation/2020/03/19/coronavirus-china-cornyn-blame/>.

Wasser, Rachel M., dan Priscilla Bei Jiao, ed. Understanding the Motivations: The First Step Toward Influencing China's Unsustainable Wildlife Consumption. Cina: Traffic East Asia, 2010. <https://www.traffic.org/site/assets/files/6267/china-motivations-study.pdf>.

"WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard." World Health Organization. Diakses 26 Juni 2020. <https://covid19.who.int/>.

"WHO Timeline - COVID-19." World Health Organization. 27 April 2020.

<https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19>.

Wirawan, Jerome. "Indonesia 'penghasil teripang terbesar dunia', tapi teripang kini 'sulit ditemukan.' BBC Indonesia. 11 Maret 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-43207713>.

Zhang, Li, Ning Hua dan Shan Sun. "Wildlife trade, consumption and conservation awareness in southwest China." Biodiversity and Conservation 17 (2008): 1493–1516. doi:10.1007/s10531-008-9358-8.



**PEMBANGUNAN PERKOTAAN,  
KERENTANAN, DAN BENCANA DI PESISIR**

Oleh Rita Padawangi

## **Pembangunan Perkotaan, Kerentanan, dan Bencana di Pesisir Indonesia**

### **Reklamasi Lahan: Apakah Pentingnya Keadilan Sosial?<sup>1</sup>**

Rita Padawangi<sup>2</sup>

*Pembangunan perkotaan mendistribusikan kembali dampak lingkungan, menggeser kerentanan bencana, dan mengubah lanskap sosial-ekonomi kota. Apakah keadilan sosial penting dalam wacana pembangunan kota? Jika demikian, untuk siapa? Dan apa implikasinya terhadap pembangunan kota?*

*Bab ini membahas dua studi kasus di Indonesia-proyek reklamasi tanah di Jakarta dan Bali-sebagai representasi dari tekanan pembangunan dengan dampak yang cukup besar terhadap lingkungan. Tulisan ini meninjau literatur keadilan sosial dan spasial dan penerapannya ke Asia Tenggara; menganalisis data dari wawancara, artikel berita, dan dokumen kebijakan untuk mengidentifikasi elemen keadilan sosial dalam wacana pembangunan yang ada; dan diakhiri dengan diskusi tentang bagaimana keadilan sosial digunakan oleh aktor masyarakat sipil tetapi tidak ada dalam dokumen kebijakan dan praktik pembangunan resmi. Akibatnya, solusi kebijakan resmi merencanakan penyebab dan tanggapan terhadap degradasi lingkungan dan terus menormalkan ketidakadilan distribusi dampak lingkungan dan pembangunan. Implementasi keadilan sosial dalam kebijakan, yang mencakup suara kelompok-kelompok yang terpinggirkan melalui gerakan sosial anti-reklamasi, memberikan kemungkinan saran kebijakan untuk masa depan yang lebih adil.*

### **Latar belakang**

Terlepas dari berbagai diskusi ilmiah tentang dampak buruk pembangunan perkotaan terhadap kelestarian lingkungan, degradasi lingkungan dari industrialisasi, urbanisasi dan perambahan lainnya di kawasan alami terus terjadi secara global. Pembangunan perkotaan juga menimbulkan kerentanan pada populasi yang mata pencahariannya bergantung pada lingkungan dan sumber daya lingkungan terdampak. Karakteristik umum dari pembangunan tersebut termasuk polusi industri, penggundulan hutan, dan permukaan tanah penuh bangunan yang menyebabkan banjir. Ketika hal ini menjadi terlalu besar bagi kapasitas masyarakat untuk mengatasinya, degradasi lingkungan ini bisa menjadi bencana.

Proyek mitigasi bencana cenderung mengikuti lintasan pembangunan perkotaan berjalan, tunduk pada norma-norma dan ideologi yang berada di belakang program pembangunan berjalan. Oleh karena itu, proyek dan strategi mitigasi untuk memperbaiki dampak lingkungan dari pembangunan perkotaan tidak mungkin menantang wacana pembangunan berjalan yang menyebabkan degradasi lingkungan. Agar proyek mitigasi bencana dapat mengurangi ketidakadilan sosial yang diakibatkan oleh degradasi lingkungan, perhatian harus diberikan pada keadilan sosial dalam ruang lingkup pembangunan kota yang lebih luas.

Oleh karena itu, sangatlah penting bahwa usulan solusi mengandung pemahaman akan distribusi yang tidak adil atas degradasi dan bencana lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan; jika tidak, usulan ini berisiko melanggengkan-bukannya meringankan-ketidakadilan sosial. Misalnya, masyarakat yang dipindahkan dari area yang terdegradasi

1 Artikel ini pertama kali diterbitkan dengan judul Padawangi, Rita (2019) "Urban Development, Vulnerabilities, and Disasters in Indonesia's Coastal Land Reclamations: Does Social Justice Matter?" In *People and Climate Change: Vulnerability, Adaptation, and Social Justice* (eds. Lisa Reyes Mason and Jonathan Rigg). New York: Oxford University Press. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Ken Budha Kusumandaru dan diterbitkan kembali atas izin penerbit.

2 Pengajar Urban Social Movement di Singapore University of Social Sciences.

lingkungan mungkin tidak dapat membangun kembali mata pencaharian mereka di rumah baru mereka. Selain itu, proyek-proyek mitigasi banjir perkotaan dengan kriteria pendanaan spesifik yang besar mungkin melibatkan lebih banyak pembangunan berskala besar yang selanjutnya mengubah bentang alam.

Dalam bab ini, saya membahas pertanyaan-pertanyaan berikut: Apakah keadilan sosial penting dalam wacana pembangunan perkotaan? Jika demikian, bagi siapa keadilan sosial itu penting, dan apa implikasinya bagi pembangunan kota? Tertanam dalam pertanyaan terkait ini adalah pertanyaan yang lebih luas tentang dampak lingkungan, yang selalu tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kota itu sendiri.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya menggunakan dua studi kasus dari Indonesia: proyek reklamasi lahan di Teluk Utara Jakarta dan Teluk Benoa di Bali. Rencana pengembangan pulau-pulau buatan sebagai tanah reklamasi di ibu kota Jakarta dan pulau Bali mewakili tekanan pembangunan yang lebih luas dengan dampak lingkungan yang cukup besar. Untuk membangun argumen saya, saya mengandalkan data yang dikumpulkan<sup>3</sup> antara 2013 dan 2016 melalui pengamatan dan wawancara dengan aktor masyarakat sipil yang terlibat dalam gerakan perlawanan terhadap proyek-proyek ini.

### **Keadilan Sosial, Keadilan Tata Ruang, dan Keadilan Lingkungan**

Disiplin keilmuan keadilan sosial adalah bentuk penyelidikan kritis terhadap cara-cara struktur sosial membentuk hasil, dengan perspektif normatif tentang manfaat dan kerugian yang dialami oleh para pelaku dalam struktur sosial tersebut. Sebagai kelanjutan dari urbanisme Marxis,

penelitian keadilan sosial terkait dengan analisis dampak perkembangan kota kapitalis pada kelas ekonomi yang berbeda di perkotaan (Harvey, 1973). Oleh karena itu, dalam menganalisis keadilan sosial di kota, penting untuk mempertimbangkan segregasi kelas ekonomi sebagai manifestasi kapitalisme dalam lanskap perkotaan. Terkait padanya adalah berbagai bentuk segregasi, seperti segregasi ras dan etnis, dengan dampak ekonomi yang merugikan pada kelompok-kelompok yang terpinggirkan. *Keadilan spasial* merupakan referensi khusus untuk dimensi spasial dari keadilan dan distribusi sumber daya spasial (Dikeç, 2001; Soja, 2010), tetapi tidak terbatas pada keadilan distributif. Keadilan spasial juga mencakup *keadilan prosedural*, yang menjadi saluran perhatian pada perjuangan kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk mencapai keadilan sosial (Soja, 2010).

*Keadilan lingkungan* berfokus pada dampak tidak setara dari degradasi lingkungan pada berbagai kelas politik, ekonomi, dan sosial (Dobson, 1998; Walker & Bulkeley, 2006). Selain memiliki aspek spasial yang kuat melalui lokasi geografis spesifik dari masalah lingkungan yang dialami populasi terdampak, telaah keadilan lingkungan terkait pula dengan kelompok perlawanan dan gerakan sosial yang menantang ketidakadilan ini. Kedua prinsip dan hasil akhir proses keadilan dimasukkan dalam keadilan lingkungan, tercermin dalam perhatian yang diberikan terhadap keadilan antar generasi dan inter generasi di antara berbagai kelompok yang terlibat dalam eksploitasi dan konservasi sumber daya (Blaikie & Muldavin, 2014).

*Dengan demikian, keadilan lingkungan dapat memberikan lensa tajam untuk memahami pergulatan lingkungan dan sumber daya alam di seluruh dunia,*

<sup>3</sup> Beberapa wawancara dan pengamatan saya lakukan selama proyek penelitian *Governing Compound Disasters in Urbanizing Asia*. Wawancara dengan nelayan di Jakarta dan Bali diperoleh dari WatchDoc (pembuat film dokumenter yang berbasis di Jakarta), yang dilakukan selama Ekspedisi Indonesia Biru (Ekspedisi Biru Indonesia) pada tahun 2015.

*menyediakan hubungan antara literatur di Utara tentang keadilan lingkungan dan penelitian tentang lingkungan di selatan, dan antara 'perjuangan lingkungan oleh kaum miskin', ekologi pembebasan dan ekologi politik global (Geoforum, 2014).*

Literatur keadilan lingkungan, terlepas dari fokus pada perjuangan berlokasi spesifik, secara historis menghubungkan praktik dan teori dan berpotensi memperkuat mobilisasi sosial global, karena perjuangan keadilan lingkungan memiliki masalah inti yang sama secara global (Geoforum, 2014; Schroeder, Martin, Wilson, & Sen, 2008; Walker & Bulkeley, 2006).

Tantangan utama dalam menguji keadilan sosial dalam kondisi perkotaan kontemporer, seperti di Jakarta dan Bali, adalah situasi di mana ketidakadilan sosial dinormalisasi sebagai persyaratan kemajuan melalui pembangunan perkotaan. Normalisasi semacam itu terjadi melalui proses lokal dan global bertahap yang menggambarkan pengorbanan beberapa kelompok masyarakat sebagai jaminan yang diperlukan untuk mencapai pembangunan, "harga yang harus dibayar," seolah-olah. "Normalitas" ini mungkin merupakan produk dari kelembagaan kuat dan wacana tentang pembangunan-berupa-modernisasi, tetapi dalam praktiknya ini mungkin juga menjadi produk dari demokrasi populer, di mana mayoritas memberikan dukungan dan kepercayaan pada wacana pembangunan semacam itu. Dalam situasi seperti itu, agar keadilan sosial tercapai dibutuhkan pembongkaran norma, struktur, dan hubungan sosial yang ada, sebuah proses yang bermasalah dan tidak nyaman karena menantang norma dan kebijaksanaan yang diterima umum.

Mempertanyakan keadilan sosial dalam pembangunan perkotaan dan bencana yang

disebabkan oleh pembangunan, oleh karena itu, memerlukan perhatian atas perjuangan sosial untuk mengubah lintasan; dengan kata lain, mengubah arah "normal". "Normalitas" mencerminkan situasi yang secara sosial dibangun oleh institusi dan aktor di kota-kota besar, yang mungkin berbeda makna di berbagai wilayah geografis. Amartya Sen (2009, p. Xii) berpendapat bahwa kelembagaan memegang "tempat yang sangat penting dalam usaha meningkatkan keadilan." Distribusi dampak bencana dan manfaat pembangunan perlu dianalisis bersamaan dengan peran berbagai aktor sosial dalam membangun dan menantang status quo. Meskipun kelembagaan penting dalam konteks Indonesia, peran para aktor adalah kunci mengingat prevalensi ekonomi relasional di mana transaksi bergantung pada dan sekaligus mempengaruhi berbagai aspek kehidupan aktor dan hubungan sosial – di dalam dan di seluruh kelompok sosial (Simone, 2009).

Warisan telaah keadilan lingkungan juga menerapkan riset aksi yang mempertemukan praktik dan teori dalam kontak dan dialog. Dalam bab ini, saya berpendapat bahwa riset aksi adalah satu-satunya cara untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang kondisi sosial yang ada, karena pembangunan kota terus berkembang seiring dengan perjuangan dan negosiasi yang terus-menerus.

### **Reklamasi Tanah di Jakarta dan Bali**

Reklamasi lahan telah menjadi fitur pembangunan di banyak kota besar di Asia Tenggara. Beberapa ibu kota di Asia Tenggara, seperti Phnom Penh, Kamboja; Metro Manila, Filipina; Jakarta, Indonesia; dan Singapura telah menunjukkan kemampuan mereka untuk memperluas wilayah daratan melalui reklamasi pantai. Di Phnom Penh, proyek Pulau Berlian (Koh

Pich) direncanakan untuk mencakup 100 hektar lahan di lepas pantai “ibu kota” di Sungai Mekong. Dalam rencananya, pulau ini akan menampung lebih dari 1.000 kondominium juga “ratusan villa, dua sekolah internasional, replika Arc de Triomphe, sebuah salinan nyaris persis dari Marina Bay Sands Singapura dan salah satu bangunan tertinggi di dunia” (Horton, 2014). Singapura, yang menginspirasi beberapa bangunan di Pulau Berlian, telah mereklamasi tanah sejak 1822 “di daerah berawa yang sekarang dikenal sebagai South Boat Quay” (HistorySG, n.d.). Hal ini telah menghasilkan peningkatan luas lahan negara-kota sekitar 23%, atau 130 kilometer persegi. Seluas 360 hektar di sisi selatan pulau, reklamasi Marina Bay selesai pada tahun 1992, satu dekade sebelum bangunan utama dikembangkan, tetapi itu bukan proyek reklamasi terakhir di Singapura. Tahun 2015, sebuah proyek besar di Pantai Timur mulai “membangun lebih banyak rumah, sekolah, taman dan fasilitas komunitas lainnya untuk populasi yang terus bertambah” dan menyediakan ruang dan fasilitas untuk 200.000 orang (Tan, 2015).

Proyek Reklamasi telah menyebar di Indonesia sejak kebijakan desentralisasi diperkenalkan pada tahun 2001, yang memberikan pemerintah tingkat kota wewenang untuk menyusun rencana tata ruang mereka sendiri. Otonomi untuk menyusun rencana tata ruang telah membuka jalan bagi semakin kuatnya pendekatan kewirausahaan dalam pembangunan perkotaan, khususnya kesempatan untuk menghadirkan diri sebagai kota kompetitif di tingkat nasional dan kawasan (Susilo, 2015). Wilayah pesisir telah menjadi peluang untuk investasi, karena perluasan lahan ke arah laut membuat lebih banyak tanah tersedia untuk pembangunan.

Manado, kota terbesar di Indonesia Timur, menjadi kota pesisir pertama yang melakukan reklamasi, awalnya 114 hektar pada tahun 1998 dan berpotensi menyebar hingga mencakup 700 hektar lebih (Ikanubun, 2016). Diimplementasikan oleh konsorsium enam pengembang swasta, bulevar komersial di atas tanah reklamasi adalah lambang pembangunan perkotaan modern yang mencerminkan citra komersial Jakarta di Manado (Susilo, 2015). Sejak itu, banyak reklamasi telah terjadi pula di kota-kota pesisir lainnya, meskipun proyek-proyek ini adalah untuk infrastruktur publik seperti perluasan pelabuhan di kota Surabaya dan perluasan bandara di kota Semarang, ketimbang menjadi inisiatif swasta.

Lokasi	Area (dalam hektar)	Dalam rencana/dalam proses/selesai
South Aceh	6,305.82	Dalam rencana
Tangerang	7,500	Dalam rencana
Jakarta	5,155	Dalam proses
Semarang	204	Selesai
Surabaya	600	Selesai
Balikpapan	5,130	Dalam proses
Makassar	4,000	Dalam proses
Bali	700	Dalam rencana
Lombok	1,250	Dalam rencana
Palu	24.5	Dalam proses
Manado	114	Selesai
Bitung	2,000	Dalam rencana
Kendari	17.5	Dalam rencana
<i>Total (Selesai)</i>		<i>918</i>
<i>Total (Dalam proses)</i>		<i>14,254.50</i>
<i>Total (Dalam rencana)</i>		<i>12,103.32</i>
<b>Total (all)</b>		<b>27,275.82</b>

Tabel 1. Proyek Reklamasi di Indonesia

Dari semua proyek reklamasi yang tercantum dalam Tabel 1, proyek Teluk Jakarta dan Teluk Benoa Bali telah menjadi perhatian media. Meskipun reklamasi pulau-pulau buatan seluas 5.130 hektar yang tengah berlangsung di Teluk Jakarta dan 700 hektar di Bali bukanlah proyek terbesar, kedua kasus ini menjadi yang paling diperdebatkan karena kontras antara kepentingan pengembang swasta dan perlawanan lokal terhadap proyek-proyek tersebut, di tengah-tengah peran pemerintah pusat dan daerah dalam membuka jalan untuk reklamasi.

Meskipun rencana tata ruang terperinci dari proyek reklamasi berada di bawah wewenang pemerintah daerah, pemerintah pusat harus mengesahkan semua rencana reklamasi pantai sebelum perencanaan yang lebih terperinci dapat dilakukan. Reklamasi tanah Jakarta bergantung pada Keputusan Presiden 52/1995 yang ditandatangani oleh Presiden Suharto sebelum Era Reformasi, dan reklamasi Teluk Benoa bergantung pada Peraturan Presiden 51/2014 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tepat sebelum akhir masa jabatan keduanya.

### **Reklamasi Pantai Jakarta**

Jakarta telah menjadi kota pelabuhan yang penting selama ratusan tahun, termasuk menjadi salah satu pelabuhan perdagangan dan perikanan tersibuk di era kolonial. Hari ini, Jakarta terdaftar sebagai salah satu megacity dengan lebih dari 10 juta penduduk yang terancam oleh kenaikan permukaan laut, di samping Shanghai, Mumbai, Dhaka, Calcutta, Hanoi, dan Hong Kong (Pusat Iklim, 2015). Sebagai salah satu konsekuensi dari perubahan iklim, kenaikan permukaan laut menantang kemunculan historis kota-kota ini, yang tidak dapat dipisahkan dari perairan sebagai sumber daya alam, sosial, dan ekonomi mereka. Evolusi historis kota-kota ini telah dibangun di atas lokasi mereka di wilayah pantai, tetapi pandangan terhadap lokasi ini sekarang telah digarap ulang sebagai ancaman di era perubahan iklim. Wilayah-wilayah di Jakarta yang telah diidentifikasi oleh pemerintah sebagai rawan banjir pasang surut adalah Kamal Muara, Pluit, Penjaringan, Kalibaru, Cilincing, dan Marunda, yang mencakup permukiman pesisir dari barat ke timur (Pemprov DKI Jakarta, 2012). Populasi dan ekosistem pesisir, khususnya di negara berkembang, rentan terhadap banjir rutin dan dampak lain dari perubahan iklim (Bijlsma et al., 1996; Nicholls, Hoozemans, & Marchand, 1999).

Mengembangkan pantai utara menandai perubahan signifikan dalam perencanaan kota Jakarta. Rencana induk wilayah metropolitan 1985 menetapkan pantai utara sebagai zona lingkungan yang dilindungi yang tidak cocok untuk pengembangan. Namun, penandatanganan Keputusan Presiden 52/1995 mengubahnya menjadi Kawasan Andalan, atau Lokasi Utama dengan "nilai strategis dari perspektif ekonomi dan pengembangan kota" (Keppres, 52/1995). Meskipun Keputusan Presiden dikeluarkan pada tahun 1995, reklamasi pantai Jakarta telah didokumentasikan setidaknya sejak 1960-an dengan pengembangan taman rekreasi Taman Impian Jaya Ancol (Jaya Ancol Dreamland) di tanah hasil reklamasi pada tahun 1966.

Meskipun Kementerian Lingkungan Hidup menggugat reklamasi pada tahun 2003 karena dianggap berbahaya bagi lingkungan, Mahkamah Agung menolaknya pada bulan April 2011. Pengembangan pantai utara Jakarta benar-benar lepas landas pada tahun 2010 ketika pemerintah mengeluarkan Rencana Induk 2010-2030, yang mengandung reklamasi tanah yang luas. Sebagai amandemen atas Keputusan Presiden 52/1995, Master Plan memandang pantai utara sebagai area utama untuk kegiatan komersial, industri ringan, dan kegiatan ekonomi utama terpilih (Padawangi, 2012). Master Plan juga memasukkan dua rencana mitigasi perubahan iklim: Proyek Mitigasi Banjir Mendesak Jakarta (JUFMP) dan Strategi Pertahanan Pesisir Jakarta (JCDS). JCDS termasuk tembok laut raksasa yang diusulkan di Teluk Jakarta, 6-8 kilometer dari garis pantai, untuk melindungi Jakarta dari kenaikan permukaan laut dan mengubah mulut tiga belas sungai menjadi reservoir air tawar. JCDS akhirnya berkembang menjadi proyek National Defense Integrated Coastal Defense (NCICD) pada tahun 2014.



Rencana Pengembangan di Teluk Jakarta mencerminkan visi “pantai emas” tahun 1960-an. Sentimen kedua pengembang—dimulai dengan Ciputra pada 1960-an dan kemudian pada 1992 dengan proyek Pantai Indah Kapuk—dan pejabat pemerintah seperti argumen Basuki Tjahaja Purnama untuk reklamasi, selama masa ke gubernurannya (2014-2017) mencerminkan aspirasi untuk mengubah tanah “tak terurus” menjadi kapital. Nilai-nilai strategis ini juga dirangkum dalam visualisasi lanskap yang menggambarkan revitalisasi ruang yang telah tercemar selama bertahun-tahun (Kompas, 2016).

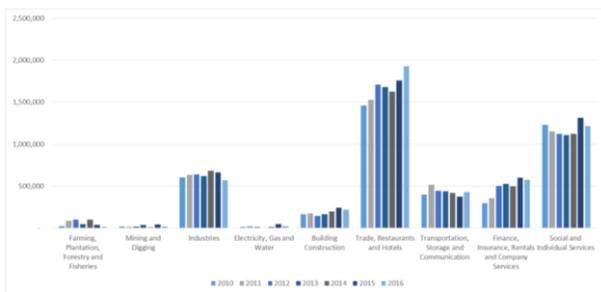
Rencana pengembang untuk properti yang dipasarkan secara komersial di 17 pulau konsisten dengan alur pengembangan Jakarta baru-baru ini yang mengutamakan proyek campuran skala besar, tetapi bertentangan dengan kebutuhan populasi yang lebih miskin. Daerah urban Jakarta berkembang pesat dari pertengahan 1980-an hingga 1997 melalui pengembangan kota-kota baru di pinggiran oleh pengembang besar. Pemerintah mengizinkan sektor swasta untuk menangani sebagian besar pasokan perumahan melalui mekanisme pasar, yang berkontribusi pada menjamurnya kantong-kantong perumahan di wilayah metropolitan tetapi yang sebagian besar gagal memenuhi kebutuhan perumahan kaum miskin (Kusno, 2013). Baru-baru ini, setelah pulih dari krisis ekonomi 1997, mega proyek baru di dalam batas kota dan di lokasi-lokasi pusat kota mencerminkan fenomena “kembali ke kota”, di mana pengembang super besar memilih membangun perumahan berpenghasilan menengah dan atas di dalam kota ketimbang di pinggiran kota, seperti pada dekade 1980-an (Herlambang, 2010).

Rencana-rencana ini dan gambar-gambar yang terkait dengan proyek-proyek itu tidaklah mewakili kondisi pemukiman dan

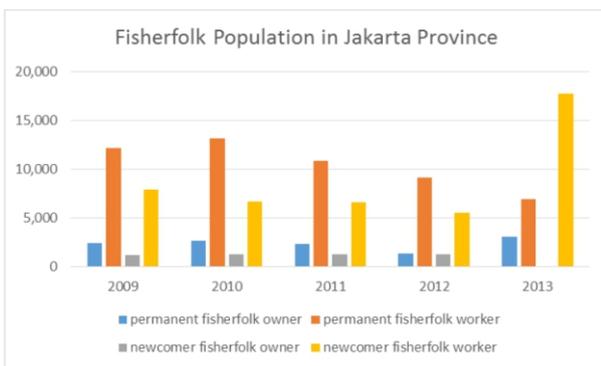
demografi Jakarta Utara saat ini. Kota administratif Jakarta Utara memiliki populasi miskin perkotaan yang lebih besar daripada empat wilayah administrasi lainnya, dengan lebih dari 48.000 rumah tangga miskin. Sebagian besar menempati rumah kurang dari 50 meter persegi dengan infrastruktur kebutuhan dasar yang tidak memadai. Permukiman miskin di Jakarta Utara berlawanan kondisinya dengan pemukiman mega proyek. Superblocks “mengatur ruang dan waktu mereka sendiri yang tidak cukup cocok dengan heterogenitas temporal dan spasial” dari lingkungan yang ada, yang telah bertumbuh dan menjalar dari waktu ke waktu dalam skala yang jauh lebih kecil (Kusno, 2013, hal. xxi). Sementara itu, pengembang besar di Jakarta juga menggunakan kekuatan politik dan ekonomi untuk menetapkan tema yang akan diperdebatkan (Winters, 1996). Pemerintah menekankan bahwa pulau-pulau reklamasi, seluas 5.155 hektar, akan memiliki 15% dari lahan yang dialokasikan untuk fungsi-fungsi penggunaan publik. Namun, peta pulau-pulau menunjukkan bahwa tanah yang dialokasikan untuk penggunaan publik ini sebagian besar ditetapkan sebagai ruang hijau dan bukan perumahan untuk kaum miskin.

Selain itu, pulau-pulau reklamasi terletak di antara nelayan yang ada di sepanjang pantai dan laut-sumber mata pencaharian mereka. Menurut statistik dari Kantor Kelautan dan Perikanan kota, ada 27.753 nelayan di Jakarta, yang terdiri dari penduduk jangka panjang (dianggap “permanen”), dan para pemukim yang lebih baru (Gambar 2 dan 3). Beberapa dari para nelayan ini telah berulang kali dipindahkan ketika Ancol direklamasi sebagai taman hiburan pada tahun 1966, dan ketika Muara Karang direklamasi untuk pembangunan pembangkit listrik bertenaga gas pada tahun 1979. Seperti yang dijelaskan oleh seorang warga miskin pada tahun 2016:

*Ibu dan ayah saya adalah nelayan. Saya lahir di Ancol, Hailai adalah tempat kelahiran saya. Dari Ancol saya dipindahkan ke Muara Karang, dan dari Muara Karang ke Muara Angke. Dan sekarang di Muara Angke kami akan dipindahkan lagi? Kami bukan binatang, pak, kami adalah manusia. (Wanita warga Muara Angke, dalam audiensi di DPRD DKI, 2016)*



Gambar 2. Profesi Terpilih di Jakarta, 2010-2016 (Sumber Data: BPS 2016, siklus data Februari)



Gambar 3. Populasi Nelayan di Provinsi Jakarta (Sumber Data: DKPKP Jakarta)

Dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, nelayan Muara Angke mengajukan gugatan pada tahun 2015 terhadap salah satu pulau buatan dalam proyek reklamasi, bernama Pulau G. Mengutip hilangnya pendapatan yang akan ditimbulkan, para nelayan menuntut agar reklamasi Pulau G dibatalkan. Dibandingkan dengan gugatan sebelumnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup, strategi gugatan nelayan berfokus pada satu pulau buatan, bukan pada proyek secara keseluruhan. Strategi ini dipilih karena fokus pada dampak ekonomi pada masyarakat lokal daripada dampak

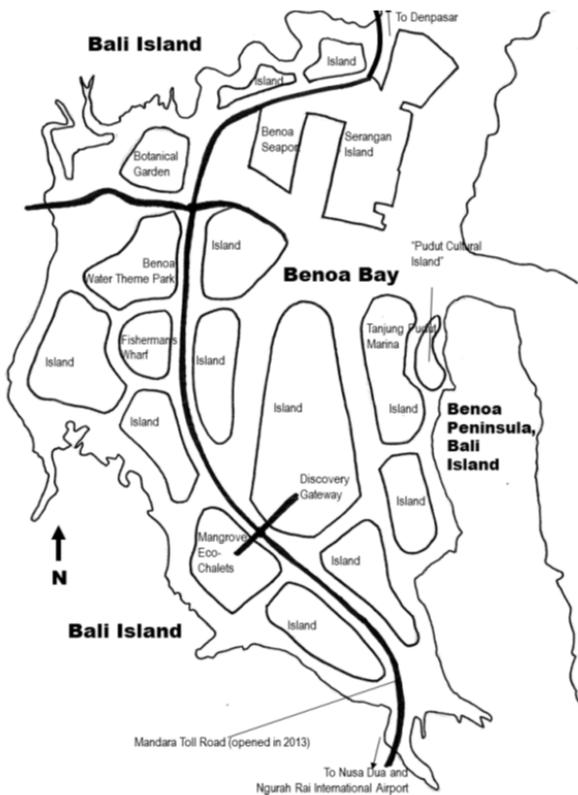
lingkungan skala besar proyek, meskipun argumen dampak lingkungan masih termasuk dalam gugatan. Sejak itu, tuntutan hukum lain telah diajukan pula terhadap tiga pulau buatan lainnya dalam proyek reklamasi - Pulau F, I, dan K -, juga dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Para Nelayan meraih kemenangan hukum pada 31 Mei 2016 yang memutuskan bahwa Islet G ilegal, tetapi keputusan itu dibatalkan di pengadilan banding pada 20 Oktober 2016. Selama proses gugatan, pembangunan Islet G berlanjut meskipun telah ditetapkan berlakunya moratorium. karena seorang anggota parlemen lokal ditangkap akibat menerima suap dari pengembang Islet G pada tahun 2016.

### Reklamasi Pantai Bali: Kasus Teluk Benoa

Proyek reklamasi Teluk Benoa relatif baru dibandingkan dengan reklamasi lahan di Jakarta. Pada Juni 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) 51/2014 yang merevisi Peraturan Presiden 45/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, Bali. Dua alasan dikutip untuk membenarkan revisi ini: (1) kebutuhan untuk merevitalisasi Teluk Benoa berdasarkan "kebijakan nasional strategis" dan "dinamika internal" daerah; dan (2) potensi untuk mengembangkan kegiatan ekonomi bersamaan dengan kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan (Perpres 51/2014). Daftar revisi menetapkan rencana kegiatan revitalisasi berdasarkan reklamasi 700 hektar lahan di Teluk Benoa. Peraturan Presiden juga menyebutkan bahwa ruang ini mungkin digunakan untuk "mitigasi bencana" (Perpres, 51/2014).

Dikemas sebagai "Revitalisasi Teluk Benoa," proyek reklamasi diberikan kepada PT Tirta Wahana Bali International (TWBI), anak perusahaan Artha Graha Company di Jakarta. Tanda-tanda proyek muncul setidaknya 3 tahun sebelum Peraturan

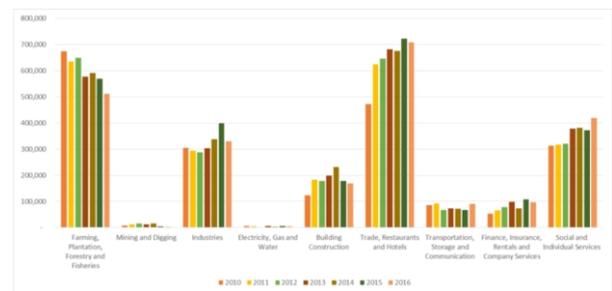
Presiden, pada 2011, ketika jalan tol sebagai penghubung kedua antara Bandara Ngurah Rai dan kota Denpasar selesai. Jalan tol memiliki pintu keluar di tengah teluk, tidak menuju ke mana-mana, tetapi rencana induk oleh PT TWBI menunjukkan bagaimana pintu keluar ini akan terhubung ke pulau-pulau buatan yang direncanakan (Gambar 4). PT TWBI mengumumkan minatnya atas Teluk Benoa pada akhir 2012, sedangkan Peraturan Presiden baru dikeluarkan pada Juni 2014. Berbeda dengan proyek reklamasi Teluk Jakarta, yang diberikan kepada sembilan pengembang, proyek reklamasi Teluk Benoa hanya melibatkan satu pengembang.



Gambar 4. Diagram akses Rencana Reklamasi Teluk Benoa (Sumber: penulis, berdasarkan informasi dari nusabenoa.com, 2016)

Alur pengembangan Bali agak berbeda dari Jakarta, karena hubungan pulau itu dengan ekonomi global sebagian besar bergantung pada pariwisata. Situasi pertanahan Bali mencakup porsi yang signifikan dari tanah dan tenaga kerja untuk pertanian,

perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Namun, proporsi tenaga kerja untuk pertanian terus menurun (Gambar 5). Antara 2010 dan 2016, populasi yang bekerja di sektor pertanian menurun sebesar 150.000 orang. Sebaliknya, mereka yang bekerja di perdagangan, restoran, dan hotel semakin meningkat. Perubahan dalam pekerjaan ini memiliki keterkaitan spasial dengan pengurangan sawah irigasi dan perluasan di area pemukiman (As-syakur, 2011). Sebagian besar pengurangan lahan pertanian telah terjadi di sekitar kota Denpasar, dan telah dikaitkan dengan pengembangan pariwisata (As-syakur, 2011; Sutawa, 2012).



Gambar 5. Profesi Terpilih di Bali, 2010-2016 (Sumber: BPS 2016, siklus data Februari)

Secara statistik, di wilayah Teluk Benoa, pertanian dan perikanan masih signifikan. Pada 2013, ada hampir 2.000 nelayan di daerah itu, dan pertanian tetap merupakan profesi yang dominan (Suantika, 2013). Dua nelayan menjelaskan,

*Tidak ada pekerjaan lain di sini selain memancing. Sudah seperti itu sejak dulu. Sekarang anak-anak mendapatkan pekerjaan di hotel, pantai. Orang-orang tua seperti saya, kami telah menjadi nelayan sejak lama, dari jaman kakek saya, nenek saya. (Ketut Linggih, Nelayan, 2015).*

*Lalu orang-orang lokal di sini, akankah kita diizinkan pergi ke sana [ke perairan di wilayah reklamasi]? Jika tidak, bagaimana cara kita bekerja? Tidak ada tempat untuk menaruh perahu kami, jika semua daerah ini direklamasi. Keadaan akan berbeda. Kami sudah diusir.*

*Kami ingin tinggal di sini, tetapi itu akan mustahil. (Fisherman, 2015).*

Teluk Benoa juga terbuka untuk pariwisata, dengan penyewaan kapal dan layanan terkait yang menyediakan kegiatan ekonomi yang signifikan di daerah tersebut. Pengusaha lokal di daerah itu menyatakan skeptis tentang dampak reklamasi terhadap mata pencaharian mereka, terutama ketika bisnis mereka saat ini melambat karena apa yang mereka anggap sebagai pasar pariwisata jenuh (WatchDoc 2015).

Berhadapan dengan penolakan di lapangan, wacana pemasaran PT TWBI diarahkan untuk menekankan ke-Bali-an proyek tersebut. Perusahaan menggunakan tagline seperti "Pembangunan berdasarkan P e m b e r d a y a a n R a k y a t" dan "Pengembangan Berbasis Budaya Bali," dan menampilkan kutipan wawancara singkat dengan orang Bali lokal dan para ahli yang mendukung gagasan revitalisasi Teluk Benoa, sebuah teluk yang digambarkan telah terdegradasi dengan sedimentasi dan lumpur dan tengah kehilangan sumber daya perikanan (Situs Web TWBI, 2016). Kerangka revitalisasi ini semakin diperkuat melalui klaim bahwa reklamasi ini diarahkan "Menuju Wisata Budaya yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan," dan perbandingan diambil antara area hutan bakau (1.400 hektar) dan air (1.400 hektar) yang harus dilindungi dibandingkan dengan area pengembangan. hanya 400 hektar.

Meskipun proyek Reklamasi Teluk Benoa di Bali secara signifikan lebih kecil dari Jakarta, gerakan sosial melawan reklamasi lebih terorganisir. Pengumuman proyek reklamasi, yang berencana untuk mereklamasi 700 hektar lahan dengan 23 juta m<sup>3</sup> pasir laut, mendapat perlawanan dari kelompok-kelompok lokal. Setelah mengetahui tentang rencana proyek, ratusan orang, organisasi nonpemerintah lokal (LSM), desa, badan mahasiswa,

organisasi pemuda, seniman, dan musisi membentuk aliansi masyarakat sipil yang disebut ForBALI (ForBALI, 2016). Selain argumen sosial dan ekonomi, gerakan ini sangat percaya bahwa reklamasi mengancam identitas Bali, baik etnis dan agama:

*Pertama, kita harus melihatnya bersama. Jangan bandingkan dengan, seperti yang Anda katakan tadi, Singapura, yang sudah dikembangkan. Sekarang, pertanyaan saya adalah, tanpa apa yang Anda tunjukkan kepada kami, kami telah mengembangkan, Pak. Bali masih menjadi tempat wisata. Mungkin Singapura masih belum ada bandingannya dengan Bali di objek wisata. Saya yakin Bali masih akan berkelanjutan dengan orang-orangnya yang masih memegang teguh tradisi. (Perwakilan Masyarakat, Konsultasi Publik Penilaian Dampak Lingkungan, 11 Maret 2015).*

Pemeliharaan budaya dan tradisi Bali tidak dapat dipisahkan dari basis ekonomi Bali karena industri pariwisata bergantung padanya. Menurut data dari biro statistik provinsi, Bali menarik lebih dari hampir lima juta wisatawan internasional pada tahun 2016, hampir satu juta orang lebih banyak dari jumlah wisman pada tahun 2015. Bali adalah tujuan wisata paling populer di Indonesia. Demonstrasi jalanan yang menentang reklamasi biasanya menampilkan pakaian dan tarian tradisional (Gambar 6). Selain itu, band-band musik lokal populer telah terlibat dalam penulisan lagu dan pementasan konser untuk mengkritik reklamasi dan pemerintah pusat, serta untuk mengumpulkan dana untuk gerakan anti-reklamasi.



Gambar 6. Sebuah demonstrasi oleh ForBALI, menampilkan atribut budaya seperti sarung hitam dan putih dan patung Batara Kala (dewa perusak) dalam bentuk backhoe, Agustus 2016 (Sumber: ForBALI, 2016)

## Keadilan Sosial dalam Rencana Reklamasi Jakarta dan Bali

	Jakarta	Bali
Area lahan (hektar)	66,152 (kota/propinsi) 640,071 (area metropolitan Jabodetabek)	578,000 (pulau/propinsi)
Rencana Reklamasi Lahan (hektar)	5,155	700
Porsi lahan publik dari pulau hasil reklamasi (hektar)	773.25 (15%)	300 (42.86%)
Pemanfaatan dominan atas pulau hasil reklamasi	Perumahan (kelas menengah ke atas) Taman hiburan Perdagangan Pelabuhan	Perumahan (kelas menengah ke atas) Taman hiburan Perdagangan Dermaga Nelayan Kebun Raya Hutan Bakau
Populasi	10,075,300 (2014)	4,152,800 (2016)
Populasi Nelayan	27,753	1,852
Kebijakan Reklamasi	Keppres 52/1995	Perpres 51/2014
Status Reklamasi	Dalam proses	Dalam perencanaan
Kerentanan pada Perubahan Iklim	Kenaikan permukaan laut	Kenaikan permukaan laut
Ancaman Lingkungan	Penurunan permukaan tanah (10x tingkat kenaikan permukaan laut) Intrusi air laut Banjir	Sedimentasi sungai dan teluk
Alasan lingkungan hidup yang dipakai dalam reklamasi	Revitalisasi Teluk Jakarta	Revitalisasi Teluk Benoa
Jumlah pengembang	9 (semua berkantor di Jakarta)	1 (berkantor di Jakarta)
Apakah masyarakat diberi tahu sebelumnya	Tidak	Tidak
Perencanaan spasial	Dalam proses (draft untuk disahkan DPRD)	Dalam perencanaan
Perlawanan	Gugatan Kementerian Lingkungan Hidup (dibatalkan 2011) Gugatan nelayan atas pulau G (dibatalkan 2016, tengah banding ke Mahkamah Agung) Gugatan nelayan atas pulau F (diajukan 2016) Gugatan nelayan atas pulau I (diajukan 2016) Gugatan nelayan atas pulau K (diajukan 2016)	Penolakan atas dokumen AMDAL (2015, 2016) Penolakan dari Parisada Hindu Dharma, Oktober 2015 Demonstrasi jalanan (berkali-kali, 2014-sekarang)

Tabel 2. Karakteristik Terpilih dari Proyek Reklamasi di Jakarta dan Bali  
(Sumber: bermacam-macam, disusun oleh penulis)

Meskipun jelas dalam Tabel 2 bahwa ada perbedaan penting antara kasus-kasus di Jakarta dan Bali, kedua lokasi tersebut rentan terhadap dampak perubahan iklim, khususnya kenaikan permukaan laut. Jakarta dan Bali secara geografis terpapar garis pantai dan secara sosial-ekonomi tergantung pada pantai. Permukaan laut regional diperkirakan akan naik 0,91 meter menjadi 1,18 meter pada tahun 2100 dan diperkirakan akan membanjiri pantai Jakarta serta mengurangi sawah Bali dan Jawa, di mana satu perkiraan menunjukkan bahwa 182.556 hektar sawah bisa hilang di Jawa dan Bali pada tahun 2050 (Förster et al., 2011). Dalam skenario ini, reklamasi lahan di lepas pantai untuk pasar properti kelas atas tampaknya akan menempatkan pulau-pulau buatan di garis depan kenaikan permukaan laut, membuat mereka rentan terhadap banjir. Risiko banjir di pantai utara Jakarta sudah jelas, karena kota yang tengah tenggelam ini secara teratur dilanda banjir pasang.

Namun demikian, dalam kasus Jakarta, NCICD mengklaim bahwa reklamasi lahan oleh pengembang properti adalah suatu keharusan untuk mengurangi risiko banjir dari laut. Di NCICD, konsesi untuk membangun pulau-pulau buatan di lepas pantai Jakarta akan dijual kepada pengembang swasta dan hasilnya akan berkontribusi untuk membiayai tembok laut raksasa sebagai skenario perlindungan banjir kota.

Dengan cara ini, mekanisme pembiayaan tanggul laut secara resmi menggunakan reklamasi tanah untuk menghasilkan sarana keuangan untuk mengurangi risiko banjir, sambil mempertahankan lintasan pembangunan yang mengintensifkan skala besar, proyek mega penggunaan campuran di kota yang memperbesar risiko banjir. Meskipun tren mega-proyek belum merajalela di Bali, resor-resor mewah telah menjamur di pulau itu untuk memenuhi

kebutuhan industri pariwisata yang berkembang, dan lahan pertanian terus berkurang sebagai akibat pembangunan, dan menipisnya air tanah (As-syakur 2011). Oleh karena itu, dalam kedua kasus, pengembang swasta adalah aktor dominan dalam rezim yang mampu mengubah ancaman lingkungan menjadi peluang pembangunan.

### **Sentralitas Jakarta dalam Proyek Reklamasi Tanah**

Peluang pembangunan ini menimbulkan konsekuensi yang tidak setara untuk populasi yang ada, menegaskan ketidakadilan pola pembangunan ini. Reklamasi 17 pulau buatan di Teluk Jakarta akan menyediakan perumahan di “kampung perkotaan serba guna menengah ke atas,” (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2016) tidak ada relevansinya bagi 27.735 nelayan yang tinggal di Teluk Jakarta dan lebih dari 48.000 rumah tangga miskin di Jakarta Utara yang tidak dapat membeli properti di pulau-pulau tersebut. Nelayan juga meratapi pengurangan perikanan di Teluk Jakarta, yang telah dikaitkan dengan polusi selama beberapa dekade serta berlangsungnya kegiatan pembangunan Pulau-Pulau hasil direklamasi (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2016).

Kasus reklamasi tanah di Jakarta menggambarkan bagaimana pihak berwenang membingkai ulang risiko bencana sebagai peluang untuk pengembangan lebih lanjut. Tetapi kasus Bali menjelaskan tentang ketidakadilan di tingkat kota atau daerah, dan juga antar lokasi geografis yang berbeda. Ini menunjukkan bagaimana pemegang kekuasaan dan pemilik modal beroperasi di luar batas teritorial tertentu. Ini, kemudian, mengarahkan kita untuk meninjau kembali persilangan antara ke-(tidak)-adilan sosial dan spasial. Pengembang yang mengejar reklamasi lahan di Teluk Benoa, PT TWBI, adalah anak dari perusahaan yang berbasis

di Jakarta. Selain itu, reklamasi lahan disahkan oleh Peraturan Presiden yang juga diputuskan di Jakarta. Aktor-aktor yang berkantor di Jakarta ini—pengembang dan pemerintah nasional—membentuk hubungan dengan aktor lokal, seperti gubernur, pakar, dan anggota masyarakat sipil dalam upaya melegitimasi proyek. Proyek reklamasi Teluk Benoa menggarisbawahi tidak hanya kesenjangan sosial di Bali, tetapi juga kesenjangan sosial dan politik antara Bali dan Jakarta, karena pembangunan di Bali tidak dapat dipisahkan dari aktor-aktor dominan di ibu kota.

Reklamasi lahan di Jakarta berkelindan dengan wacana perlindungan banjir dan mencerminkan legitimasi pembangunan melalui eksploitasi populasi kota yang paling rentan. Meskipun seluruh kota rentan terhadap risiko banjir, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang dimanifestasikan dalam lanskap perkotaan Jakarta menghasilkan dampak banjir yang secara tidak proporsional memengaruhi kaum miskin. Banjir tidak hanya lebih sering memengaruhi daerah-daerah di mana orang miskin terkonsentrasi, tetapi mereka juga kurang mampu menghindari banjir seperti itu (Padawangi, 2012). Sekalipun demikian, orang miskin mungkin juga lebih tahan terhadap banjir melalui berbagai mekanisme respon banjir berbasis masyarakat, sistem peringatan banjir akar rumput, adaptasi dalam struktur perumahan, dan pengetahuan tentang banjir yang diperoleh dari tahun-tahun hidup di daerah rawan banjir (Padawangi & Douglass, 2015; Texier, 2008).

Di media arus utama, orang miskin semakin dicap sebagai penyebab banjir—melalui penggambaran mereka sebagai penampung sampah yang tidak bertanggung jawab dan sebagai penghuni permukiman yang mencekik saluran air—dan digambarkan sebagai orang-orang keras kepala yang menolak tawaran untuk

dipindahkan ke rusun sewa di pinggiran (Kompas, 2016; MetroTV, 2016). Dengan pengecualian dua edisi majalah Tempo dan The Jakarta Post yang melaporkan tentang nasib para nelayan dan secara kritis melaporkan agenda yang digerakkan oleh reklamasi tanah di Jakarta, laporan media sering menggambarkan para pemodal dan pengembang membangun tembok laut raksasa sebagai pelindung utama Jakarta dari banjir. Terakhir, normalisasi atas pembangunan telah meredam wacana akan perlunya keadilan sosial. Tidak adanya partisipasi dari masyarakat pesisir yang terkena dampak dalam menyusun Rencana Induk Jakarta 2010-2030 dan Rencana Induk NCICD juga mencerminkan tantangan serius dalam keadilan prosedural. Kekalahan nelayan di pengadilan banding pada Oktober 2016 atas dasar "melindungi kepastian investasi" (Prosiding Pengadilan Banding, 2016) dari pulau-pulau buatan juga telah melestarikan ketidakadilan sosial dalam pembangunan perkotaan Jakarta.

### **Gerakan Sosial Anti Reklamasi di Bali**

Penggunaan wacana rehabilitasi lingkungan dalam melegitimasi pembangunan kota juga terlihat dalam kasus proyek reklamasi Teluk Benoa di Bali. Pengembang, PT TWBI, memasarkan proyek tersebut sebagai program "revitalisasi", dan bukan sebagai proyek "reklamasi". Klaim oleh para pendukung reklamasi bahwa Teluk Benoa telah hancur karena kelebihan sedimentasi dari sungai juga mereproduksi klaim bahwa Teluk Jakarta telah terlalu tercemar, tidak lagi cocok untuk perikanan, dan oleh karena itu perlu direhabilitasi melalui reklamasi. Meskipun proyek reklamasi Teluk Benoa tidak menyertakan soal mitigasi bencana, wacana rehabilitasi lingkungan yang digunakannya mengklaim adanya kemendesakan untuk intervensi cangguh atas wilayah teluk. Argumen untuk rehabilitasi juga didukung oleh alokasi 42,6% dari lahan reklamasi yang diusulkan untuk ruang hijau dan dermaga nelayan.

Kasus proyek reklamasi Teluk Benoa dan gerakan sosial menentanginya di Bali menampilkan solidaritas lintas kelas yang lebih signifikan dibandingkan dengan Jakarta. Berbeda dengan Jakarta, Bali masih memiliki populasi agraria yang signifikan, yang terpusat di desa-desa tradisional (Suantika, 2013), yang dapat bertindak sebagai komunitas untuk menyuarakan keprihatinan mereka. Meskipun kaum nelayan yang akan terkena dampak langsung dari reklamasi lahan mungkin miskin, gerakan sosial melawan reklamasi jauh lebih luas dan tidak hanya terbatas pada mereka yang terkena dampak langsung di lokasi, dengan ratusan organisasi bergabung dengan ForBALI. Melalui pengamatannya, Supriatma (2016) mencatat bahwa sebagian besar peserta ForBALI adalah pemuda yang terlibat dalam Sekeha Teruna Teruni (STT), organisasi pemuda yang ada di setiap banjar, unit organisasi tradisional terkecil di Bali. STT menjadi simpul mobilisasi massa untuk gerakan melawan reklamasi, dan keputusan untuk melakukan demonstrasi jalanan tidak hanya dari koordinator ForBALI tetapi sering dari node STT tertentu (Supriatma, 2016). Selain demonstrasi jalanan dari ribuan demonstran, gerakan ini melibatkan lobi aktor lokal dan nasional dalam pemerintahan, advokasi media sosial, pertunjukan lagu-lagu anti-reklamasi, dan perluasan ForBALI untuk membangun cabang di luar pulau (Lestari, 2016; Suardana, 2015; Supriatma, 2016).

ForBALI telah relatif berhasil dalam melakukan mobilisasi melawan reklamasi; tidak hanya karena mampu memobilisasi berbagai kelas ekonomi dan geografi, tetapi juga karena telah mempengaruhi wacana publik tentang reklamasi tanah yang disandingkan dengan budaya Bali, yang juga mencakup agama dan identitas. Selanjutnya, pengembang mulai menggunakan bingkai budaya Bali dalam strategi pemasaran dan komunikasi.

Strategi pengembang menanggapi argumen tentang tradisi dan budaya yang diajukan selama sosialisasi Penilaian Dampak Lingkungan pertama pada Maret 2015, tetapi rencana reklamasi tidak berubah sejak saat itu. Argumen budaya dan tradisi juga menyatukan ForBALI, karena reklamasi tanah dianggap melanggar tradisi Bali. Gerakan ini menerima dorongan ketika Parisada Hindu Dharma Indonesia, Dewan Dharma Hindu Indonesia, menyatakan pada Oktober 2015 bahwa Teluk Benoa adalah situs suci (Parisada Hindu Dharma Indonesia, 2015). Meskipun ditetapkan sebagai situs suci, rencana reklamasi belum berhenti sejauh ini.

### **Keadilan Sosial, Reklamasi Lahan, dan Kemungkinan di Depan**

Kasus reklamasi lahan di Jakarta dan Bali menunjukkan bahwa pembuat kebijakan nasional dan lokal memandang kebutuhan pembangunan lebih mendesak daripada tantangan perubahan iklim. Meskipun penelitian sebelumnya mengungkapkan bagaimana berlebihan pembangunan di Jakarta menyebabkan degradasi lingkungan, terutama banjir dan penurunan permukaan tanah, NCICD mengutip gejala-gejala ini sebagai alasan untuk mendukung pengembangan lebih lanjut dalam bentuk reklamasi lahan. Demikian pula, ketika Bali mengalami penurunan porsi lahan pertanian dan meningkatnya sedimentasi, pengembang swasta mengutip gejala-gejala ini sebagai alasan untuk pengembangan lebih lanjut. Proyek reklamasi tanah ini, didukung oleh kebijakan lokal dan nasional, dipasarkan untuk kelompok yang lebih kaya daripada mereka yang mata pencahariannya akan terkena dampak langsung, atau kelompok yang berpotensi akan dipindahkan, seperti nelayan.

Namun, argumen yang menyatukan orang dan menciptakan gerakan sosial melawan reklamasi tanah dalam dua kasus ini adalah

budaya dan tradisi, bukan kepentingan kelas seperti yang disarankan oleh diskursus keadilan sosial Marxis. Meski begitu, keunggulan budaya dan tradisi dalam gerakan anti-reklamasi di Bali juga tidak terlepas dari keterikatan antara identitas Bali dan industri pariwisata sebagai mesin yang mendorong Bali menuju keunggulan nasional dan global.

Kasus-kasus reklamasi tanah di Jakarta dan Bali, dan gerakan sosial melawannya, mengungkap setidaknya dua kemungkinan solusi kebijakan ke depan, terkait dengan pembangunan kota dan perubahan iklim. Pertama, keadilan sosial adalah konsep yang perlu dianut dalam konteks mitigasi perubahan iklim dan agenda adaptasi di daerah yang terurbanisasi dengan cepat. Dalam kasus Indonesia, ketidakadilan sosial yang dinormalisasi dalam kebijakan pembangunan perkotaan berjalan cukup dalam untuk mengacaukan penyebab dan dampak degradasi lingkungan, yang tercermin dalam membingkai masyarakat nelayan miskin dan tradisional lebih sebagai bagian dari masalah ketimbang kunci untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Kita melihat dalam kasus-kasus yang diuraikan di atas kegagalan untuk melacak sejarah ketidakadilan, yang memungkinkan penarikan koneksi temporal antara kondisi lingkungan dan sosial saat ini dengan pola eksploitasi di masa lalu. Sejarah ini akan dapat menggeser 'beban kesalahan' dari nelayan dan masyarakat kota kepada beberapa dekade pembangunan yang telah memprioritaskan kepentingan ekonomi daripada sosial dan lingkungan, yang kaya daripada yang miskin, dan orang luar daripada orang dalam (penduduk setempat). Kedua, keadilan sosial dapat menembus tirai kebijakan resmi melalui penilaian yang cermat terhadap kelompok-kelompok sosial yang paling terpengaruh oleh rencana pembangunan dan degradasi lingkungan, baik yang disebabkan oleh perubahan iklim maupun yang disebabkan

oleh pembangunan. Lebih jauh, gerakan sosial melawan reklamasi tanah dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi kelompok-kelompok tertentu yang terkena dampak secara tidak proporsional; karenanya, telaah atas suara perlawanan adalah salah satu cara mengidentifikasi kelompok yang terpinggirkan untuk menganalisis distribusi dampak lingkungan. Perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat akan membingkai kelompok-kelompok perlawanan tersebut bukan sebagai masalah untuk diredakan atau dilawan melalui pengadilan atau dengan paksaan, tetapi sebagai sarana dan mekanisme untuk membantu memastikan bahwa pembangunan itu adil secara sosial dan lingkungan.

### Kesimpulan

Apakah keadilan sosial penting dalam wacana pembangunan kota? Dua kasus proyek dan rencana reklamasi tanah di Jakarta dan Bali yang ditujukan untuk kelas menengah dan atas menunjukkan bahwa keadilan sosial jarang menjadi agenda pembangunan perkotaan. Tujuan dari proyek-proyek ini adalah untuk membangun kantong-kantong baru perumahan, areal perdagangan, dan bangunan serba guna mengikuti norma pembangunan perkotaan yang telah ditetapkan. Kerentanan lingkungan dari situs-situs tersebut, seperti kerentanan terhadap banjir di Jakarta, secara resmi ditanggapi dengan membingkai proyek reklamasi sebagai "rehabilitasi lingkungan." Namun demikian, mereka yang terpinggirkan oleh pola pembangunan ini dan wacana yang menginformasikannya telah berupaya untuk menolak melalui tuntutan hukum dan gerakan sosial lintas-sektoral. Argumen keadilan sosial lebih jelas terejawantah dalam gugatan nelayan terhadap pulau reklamasi, untuk membela hak-hak nelayan sebagai kelompok yang paling terpinggirkan dalam rencana dan proyek reklamasi.

Keadilan sosial juga tercermin dalam gerakan Bali melawan reklamasi yang mengkritik bagaimana orang Bali dikesampingkan dalam proyek reklamasi lahan.

Jika demikian, bagi siapa keadilan sosial itu penting, dan apa implikasinya bagi pembangunan kota? Meskipun gerakan sosial tampaknya menuntut keadilan sosial dalam berbagai cara, keadilan sosial tidak ditemukan sebagai prioritas dalam wacana resmi proyek reklamasi tanah. Akibatnya, kerentanan terhadap dampak lingkungan dari pembangunan terus terdistribusi secara tidak merata, dan besarnya ketergantungan pada aktor tertentu ketimbang reformasi struktural untuk mempromosikan agar keadilan sosial tetap ada. Rencana Induk NCICD dan PT TWBI mengklaim memberi perhatian pada populasi yang terkena dampak, terutama nelayan, tetapi jurang antara kepentingan proyek reklamasi dan kepentingan populasi yang terkena dampak langsung telah memicu tuntutan publik untuk didengar serta dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, terbatasnya akses gerakan-gerakan ini ke negosiasi resmi untuk kebijakan dan peraturan telah mengakibatkan makin lebarnya jurang antara proyek reklamasi dan populasi yang terkena dampak.

Ada tiga implikasi dari ketidaksesuaian ini. Pertama adalah kekacauan antara penyebab dan tanggapan. Solusi untuk permasalahan lingkungan hidup di Jakarta dan Bali digambarkan terletak pada perluasan aktivitas yang justru pada awalnya menyebabkan masalah ini. Kalaupun dianggap, orang miskin yang tinggal di daerah ini dipandang sebagai bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Kedua, dengan mengabaikan kepentingan kelas yang jelas berpotongan antara nelayan miskin dan penduduk miskin lainnya di dua lokasi, gerakan sosial hanya berhasil memobilisasi dengan

menggunakan slogan “budaya dan tradisi.” Terakhir, normalisasi pembangunan menyisakan sedikit ruang saja untuk alternatif. Pola pikir pembangunan-sebagai-modernisasi menyatakan bahwa penyebab masalah dan solusinya menempati ruang kebijakan yang sama. Ini menekankan betapa sulitnya merekayasa (secara kebijakan) atau menghasilkan (secara sosial) pendekatan yang dapat mengatasi perubahan iklim dengan cara yang memenuhi tuntutan keadilan sosial dan spasial.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis berterima kasih kepada Pembuat Film Dokumenter WatchDoc, khususnya Dandhy Dwi Laksono dan Suparta Arz yang telah melakukan Ekspedisi Indonesia Biru untuk mengumpulkan wawancara di Bali dan Jakarta. Kerja lapangan penulis untuk makalah ini didanai oleh hibah penelitian dari Singapore Ministry of Education AcRF Tier 2 “Governing Compound Disasters in Urbanizing Asia” (MOE2014-T2-1-017)

## Daftar Pustaka

- As-syakur, Abdul Rahman. (2011). Perubahan Penggunaan Lahan di Provinsi Bali. *Ecotrophic* 6, (1), 1–7.
- BeritaSatu. (2015, October 25). Reklamasi di Utara Jakarta Tidak Sebabkan Banjir. *BeritaSatu Megapolitan*. Retrieved November 8, 2016 from <http://www.beritasatu.com/megapolitan/317178-reklamasi-di-utara-jakarta-tidak-sebabkan-banjir.html>
- Bijlsma, L., Ehler, C. N., Klein, R. J. T., Kulshrestha, S. M., McLean, R. F., Mimura, N., . . . Warrick, R. A. (1996). Coastal zones and small islands. In R. T. Watson, M. C. Zinyowera, R. H. Moss, (Eds.), *Impacts, adaptations and mitigation of climate change: Scientific-technical analyses* (pp. 289–324). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Blaikie, P., & Muldavin, J. (2014). Environmental justice? The story of two projects. *Geoforum*, 54, 226–229.
- Climate Central. (2015). New report and maps: Rising seas threaten land home to half a billion. Retrieved November 7, 2016 from <http://sealevel.climatecentral.org/news/global-mapping-choices>
- Dikeç, M. (2001). Justice and the spatial imagination. *Environment and Planning* 33, 1785– 1805.
- Dobson, A. (1998). *Justice and the environment: Conceptions of environmental sustainability and theories of distributive justice*. Oxford, UK: Clarendon Press.
- ForBALI. (2016). Tentang Kami. Retrieved November 8 from <http://www.forbali.org>
- Padawangi, Rita (2019) "Urban Development, Vulnerabilities, and Disasters in Indonesia's Coastal Land Reclamations: Does Social Justice Matter?" In *People and Climate Change: Vulnerability, Adaptation, and Social Justice* (eds. Lisa Reyes Mason and Jonathan Rigg). New York: Oxford University Press.
- Förster, H., Sterzel, T., Pape, A. C., Moneo-Lain, M., Niemeyer, I., Boer, R., & Kropp, J. P. (2011). Sea-level rise in Indonesia: On adaptation priorities in the agricultural sector. *Regional Environmental Change*, 11(4), 893–904.
- Geoforum. (2014). Globalizing environmental justice? *Geoforum* 54, 151–157.
- Harvey, D. (1973). *Social justice and the city*. Oxford, UK: Blackwell.
- Herlambang, S. (2010) On city commercialization: A preliminary research. *International Colloquium Series 2010: The Strategy and Concept for Sustainable Future of Jakarta*. Jakarta, Indonesia: Tarumanagara University.
- HistorySG. (n.d.) Singapore's first land reclamation project begins. *Singapore History (HistorySG): An Online Resource Guide*. Singapore: National Library Board. Retrieved November 8, 2016 from <http://eresources.nlb.gov.sg/history/events/feddcf2a-2074-4ae6-b272-dc0db80e2146>
- Horton, C. (2014, May 6). Giant development in Cambodia hinges on Chinese buyers. *The New York Times*. Retrieved November 8, 2016 from <http://www.nytimes.com/2014/05/07/real-estate/commercial/giant-development-in-cambodia-hinges-on-chinese-buyers.html>
- Ikanubun, Y. (2016, May 23). Bahowo, Benteng Terakhir Mangrove dari Gempuran Reklamasi Manado. *Liputan6*. Retrieved November 8, 2016 from

<http://regional.liputan6.com/read/2513458/bahowo-benteng-terakhir-mangrove-dari-gempuran-reklamasi-manado>

Padawangi, Rita (2019) "Urban Development, Vulnerabilities, and Disasters in Indonesia's Coastal Land Reclamations: Does Social Justice Matter?" In *People and Climate Change: Vulnerability, Adaptation, and Social Justice* (eds. Lisa Reyes Mason and Jonathan Rigg). New York: Oxford University Press.

Keppres 52/1995. (1995). Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Jakarta: The President of the Republic of Indonesia.

KNTI. (2016). Reclamation projects in Indonesia." *Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia*.

Kompas. (2016). Perjalanan Panjang Reklamasi Jakarta. *Kompas Interaktif*. Retrieved November 8, 2016 from <http://interaktif.print.kompas.com/reklamasijakarta>

Kompas Online. (2016, April 28). Dilema Ahok Setiap Lakukan Penggusuran. *Kompas Online*. Retrieved November 8, 2016 from <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/28/11353781/Dilema.Ahok.Setiap.Lakukan.Penggusuran>

Kusno, A. (2013). *After the new order: Space, politics, and Jakarta*. Honolulu, HI: University of Hawaii Press.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Nelayan Muara Angke Antar Banding Reklamasi Pulau G. Gugatan. Retrieved November 8, 2016 from <http://www.bantuanhukum.or.id/web/tag/gugatan/>

Mariani, E. (2016, January 13).

Reclamation goes on despite controversy. *The Jakarta Post*. Retrieved November 8, 2016 from <http://www.thejakartapost.com/news/2016/01/13/reclamation-goes-despite-controversy.html>

MetroTV. (2016, September 29). Relokasi Warga Bukit Duri Tingkatkan Kualitas Hidup. *MetroTV News*. Retrieved November 8, 2016 from

Padawangi, Rita (2019) "Urban Development, Vulnerabilities, and Disasters in Indonesia's Coastal Land Reclamations: Does Social Justice Matter?" In *People and Climate Change: Vulnerability, Adaptation, and Social Justice* (eds. Lisa Reyes Mason and Jonathan Rigg). New York: Oxford University Press.

<http://news.metrotvnews.com/read/2016/09/29/590399/relokasi-warga-bukit-duri-tingkatkan-kualitas-hidup>

NCICD. (2014). *Master plan: National capital integrated coastal development*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Nicholls, R. J., Hoozemans, F. M. J., and Marchand, M. (1999). Increasing flood risk and wetland losses due to global sea-level rise: Regional and global analyses. *Global Environmental Change*, 9, S69–S87.

Nusa Benoa. (2016). Retrieved November 8, 2016 from <http://www.nusabenoa.com>

Padawangi, R. (2012). The right to flood-free homes: Urban floods, spatial justice and social movements in Jakarta, Indonesia. In J. Widodo, J. Rosemann, L. B. Liang, & A. Gonzalez-Brun (Eds.), *Global visions: Risks and opportunities for the urban planet* (pp. 199–211). Singapore: National University of Singapore.

- Padawangi, R. (2012). Climate change and the north coast of Jakarta: Environmental justice and the social construction of space in urban poor communities. In W. G. Holt III (Ed.), *Research in urban sociology* vol. 12 (pp. 321–339). Bingley, UK: Emerald.
- Padawangi, R., & Douglass M. (2015). Water, water everywhere: Toward participatory solutions to chronic urban flooding in Jakarta. *Pacific Affairs* 88(3), 517–550.
- Pemprov DKI Jakarta. (2012). RPJPD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2005–2025. Jakarta: Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Perpres 51/2014. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang
- Padawangi, Rita (2019) “Urban Development, Vulnerabilities, and Disasters in Indonesia's Coastal Land Reclamations: Does Social Justice Matter?” In *People and Climate Change: Vulnerability, Adaptation, and Social Justice* (eds. Lisa Reyes Mason and Jonathan Rigg). New York: Oxford University Press.
- Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Jakarta: The President of the Republic of Indonesia.
- Parisada Hindu Dharma Indonesia. (2015, October 15). Sastra Kuno Bali Sebut Teluk Benoa Kawasan Suci.. Retrieved November 8, 2016 from <http://phdi.or.id/berita/sastra-kuno-bali-sebut-teluk-benoa-kawasan-suci>
- Rimmer, P. J., & Dick, H. (2009). *The city in Southeast Asia: Patterns, processes and policy*. Singapore: NUS Press.
- Ruqoyah, S., & Mukti, F. G. (2014, June 12). Cegah Banjir, Proyek Reklamasi Pantai Jakarta Dibangun Tahun Depan. *Vivanews*. Retrieved November 8, 2016 from <http://metro.news.viva.co.id/news/read/511907-cegah-banjir-proyek-reklamasi-pantai-jakarta-dibangun-tahun-depan>
- Schroeder, R., Martin, K., Wilson, B., & Sen, D. (2008). Third world environmental justice. *Society and Natural Resources*, 21(7), 547–555.
- Sen, Amartya. (2009). *The idea of justice*. London, UK: Allen Lane.
- Simone, A. (2009). On provisional publics and intersections: Remaking district life in North Jakarta. Retrieved November 8, 2016 from <http://www.scribd.com/doc/17815978/Simone2UrbanGeo>
- Soja, E. W. (2010). *Seeking spatial justice*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- Suantika, W. (2015) *Resistensi Masyarakat Lokal Terhadap Kapitalisme Global*. Skripsi
- Sarjana, Airlangga University. Denpasar: Universitas Airlangga.
- Padawangi, Rita (2019) “Urban Development, Vulnerabilities, and Disasters in Indonesia's Coastal Land Reclamations: Does Social Justice Matter?” In *People and Climate Change: Vulnerability, Adaptation, and Social Justice* (eds. Lisa Reyes Mason and Jonathan Rigg). New York: Oxford University Press.
- Suardana, W. G. (2016, August 3). Orasi Wayan Gendo Suardana – Bali Tolak Reklamasi 3 August 2016. Public Speech August 3, 2016. Retrieved November 8, 2016 from <https://www.youtube.com/watch?v=Y1WL8uipwTA>
- Susilo, C. R. (2015). *Public space*

transformation: The role of collective space in the boulevard commercial project of Manado – Indonesia. Ph.D. Diss., Arenberg Doctoral School. Leuven, Belgium: University of Leuven.

Sutawa, G. K. (2012). Issues on Bali tourism development and community empowerment to support sustainable tourism development. *Procedia Economics and Finance*, 4, 413– 422.

Tan, T. S'pore's largest reclamation project.(2015, September 27). *The Straits Times*. Retrieved November 8, 2016 from <http://www.straitstimes.com/singapore/spores-largest-reclamation-project-begins>

The Jakarta Post. (2016, January 13). Developer-driven reclamation leaves public behind. *The Jakarta Post*. Retrieved November 8, 2016 from <http://www.thejakartapost.com/news/2016/01/13/developer-driven-reclamation-leaves-public-behind.html>

Texier, P. (2008). Floods in Jakarta: When the extreme reveals daily structural constraints and mismanagement. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 17(3), 358–372.

Walker, G. P., & Bulkeley, H. (2006). Geographies of environmental justice. *Geoforum*, 37(5), 655–659.

Padawangi, Rita (2019) "Urban Development, Vulnerabilities, and Disasters in Indonesia's Coastal Land Reclamations: Does Social Justice Matter?" In *People and Climate Change: Vulnerability, Adaptation, and Social Justice* (eds. Lisa Reyes Mason and Jonathan Rigg). New York: Oxford University Press.

WatchDoc. (2015). *Kala Benoa*. Jakarta, Indonesia: WatchDoc.

WatchDoc. (2016). *Rayuan Pulau Palsu*. Jakarta, Indonesia: WatchDoc.

Winters, J. A. (1996). *Power in motion: Capital mobility and the Indonesian state*. Ithaca and London: Cornell University Press, 1996.

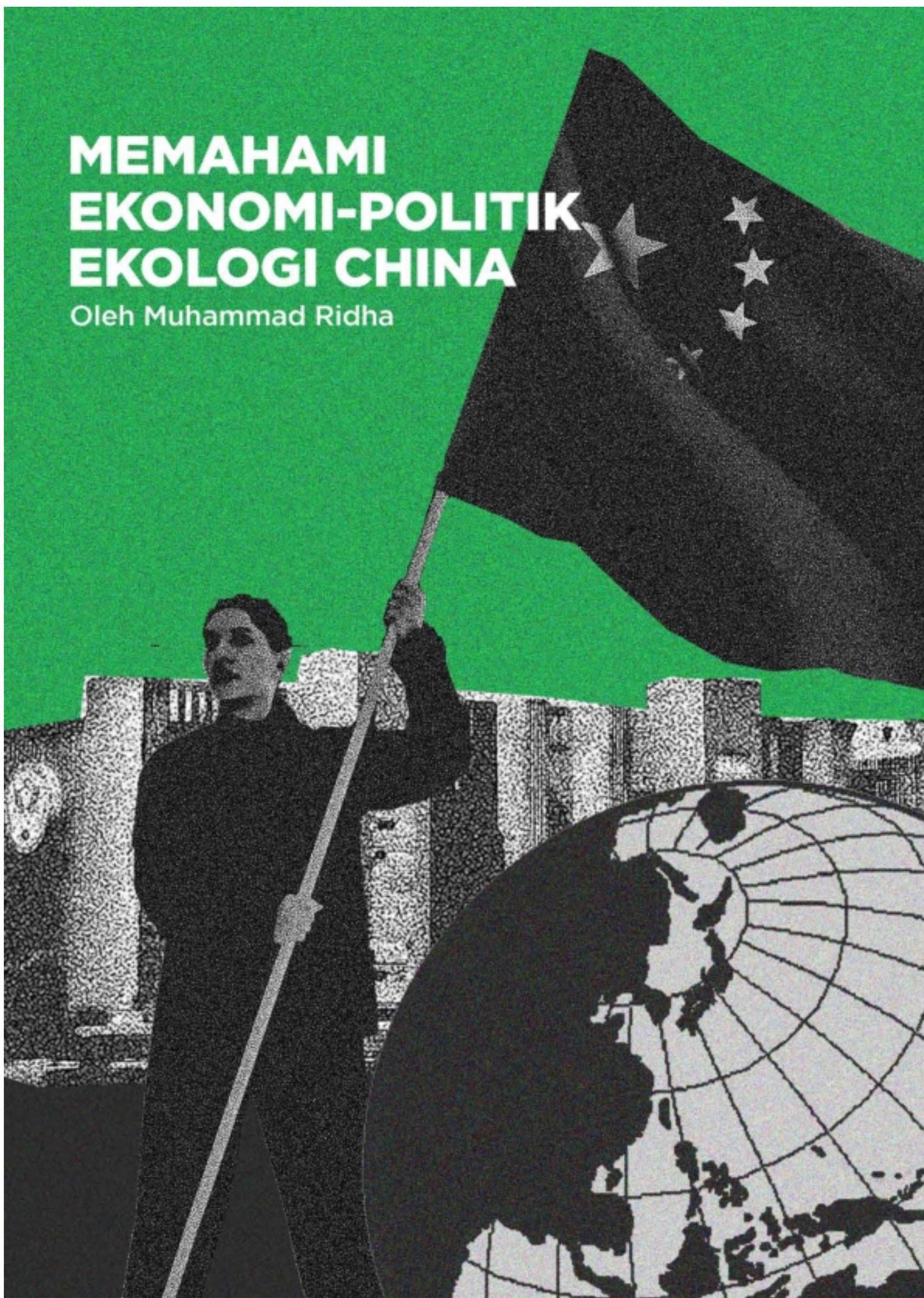
## **BAGIAN 2**

# **Ekonomi-Politik**



# MEMAHAMI EKONOMI-POLITIK EKOLOGI CHINA

Oleh Muhammad Ridha



## Memahami Ekonomi-Politik Ekologi “Sosialisme dengan Karakteristik Cina”: Suatu Perspektif Marxis

Muhammad Ridha<sup>1</sup>

Sebagai negara yang tengah menjadi kekuatan global baru, Cina seringkali disalahpahami oleh banyak elemen gerakan sosial Indonesia. Cina sering dilihat sebagai kekuatan imperialisme baru yang akan menggantikan hegemoni Amerika Serikat yang tengah meredup. Tidak heran jika kemudian dominasi perspektif ini membuat banyak elemen gerakan sosial Indonesia akan memandang hubungan dengan Cina lebih ditekankan pada hubungan yang bertentangan (antagonistik). Cina sebagai kekuatan baru harus dilawan selayaknya kekuatan imperialisme negara-negara barat lainnya.

Masalahnya kemudian perspektif ini tidak melulu tepat untuk memahami Cina sebagai kekuatan baru. Walau bagaimanapun juga, Cina masih mendeklarasikan dirinya sebagai negara yang mengusung agenda sosialisme. Di tengah semakin kuatnya aspirasi gerakan sosial Indonesia akan tatanan baru diluar kapitalisme, membangun sikap antagonistik dengan Cina hanya akan membuat kita menjaga jarak dengan praktek sosialisme yang dilakukan oleh kalangan komunis Cina. Implikasinya tentu sudah dapat ditebak. Perspektif yang dominan ini bukan hanya membuat kita gagal untuk menentukan siapa yang sebenarnya harus menjadi kawan aliansi kita dalam bersolidaritas, tapi dapat membuat kita abai akan keharusan belajar secara serius bagaimana sosialisme secara nyata dapat dibangun dengan berbagai tantangan material yang ada.

Artikel ini berupaya untuk memberikan cara pandang yang lain dalam memahami sosialisme yang berlaku di Cina, atau biasa disebut sebagai “sosialisme dengan karakteristik Cina.” Dengan menggunakan pendekatan ekonomi-politik Marxis, khususnya pendekatan teori nilai kerja dan Imperialisme Marxis, penulis berpendapat bahwa walau Cina mengadopsi beberapa elemen relasi produksi kapitalis dalam struktur ekonominya, seperti misalnya pengakuan atas kepemilikan pribadi, implementasi relasi buruh-upahan, dan dorongan untuk kompetisi pasar, relasi politik negaranya tidak dapat dikatakan beroperasi dalam logika kelas kapitalis. Trajektori pembangunan yang berbeda ini membuat walau Cina mengalami perkembangan ekonomi yang pesat seperti negara kapitalis di dunia Barat, trajektorinya tidak dapat dikategorikan dalam trajektori negara kapitalis yang imperialis.

Dalam hal ini, perkembangan ekonomi Cina masih dapat dijustifikasi sebagai bagian dari agenda politik Marxis yang mempromosikan pentingnya pembangunan kekuatan produktif dalam fase sosialisme. Dalam artian Cina mengupayakan peningkatan kekuatan produktif yang berbasis pada perencanaan negara dibandingkan pada ketentuan ekonomi pasar. Hal ini menunjukkan betapa Cina beroperasi di luar logika negara kapitalis dimana negara dikendalikan dalam kepentingan kapitalis yang menghendaki pengelolaan yang berdasar mekanisme pasar.

Walaupun tentu dari pemrioritasan agenda kekuatan produktif oleh Cina ini membuat agenda politik ketidakmerataan dalam promosi agenda perjuangan kelas. Kekuatan anti imperialis internasional dapat beraliansi dengan Cina untuk melakukan perlawanan terhadap dominasi AS.

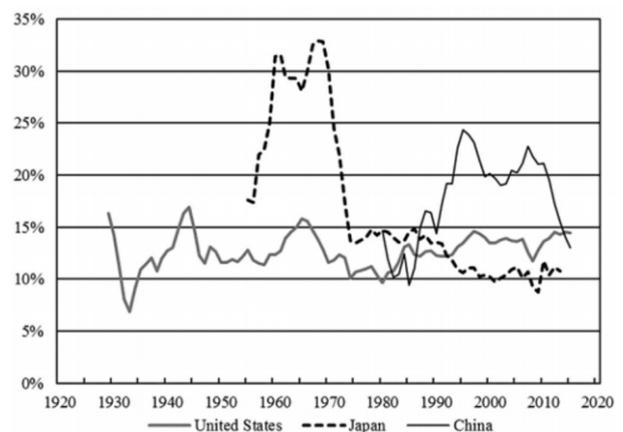
<sup>1</sup> Mahasiswa Doktoral Ilmu Politik di Northwestern University AS.

Sementara kekuatan sosial nasional masih mengalami keterbatasan untuk mendorong agenda kesejahteraan yang lebih adil dalam ekonomi Cina sekarang. Di sisi lain dari perjuangan kelas yakni kebutuhan lingkungan yang lestari dan adil, prioritas akan kekuatan produktif membuat pengelolaan alam dan lingkungan menjadi penuh tantangan. Inisiatif pembangunan kekuatan produktif dengan indikator pertumbuhan ekonomi tentu mendorong terjadinya penghancuran kondisi alam dalam skala besar. Namun karakter negara sosialis Cina memungkinkan munculnya inisiatif politik lingkungan yang mengupayakan perbaikan dan rehabilitasi lingkungan dalam skala yang tidak jauh besarnya pula.

**Struktur Ekonomi Cina: Pendekatan Teori Nilai Kerja Marxis**

Premis utama dari teori nilai kerja Marxis adalah kapitalisme sebagai modus produksi adalah sistem produksi yang berdasarkan keuntungan bersumber pada nilai lebih yang diproduksi oleh kerja manusia. Oleh karenanya analisa yang berdasar dari teori nilai kerja Marxis selalu berangkat dari pemeriksaan terhadap tingkat keuntungan yang beroperasi dalam proses produksi. Dalam kerangka Marxis, tingkat keuntungan menjadi hukum nilai yang mengendalikan dinamika ekonomi kapitalisme. Prinsip hukum nilai yang bersumberkan pada tingkat keuntungan adalah sederhana; modal akan selalu bergerak ke tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi tingkat keuntungan suatu negara maka dapat dipastikan ekonomi negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Prinsip ini tentu berlaku berlaku pada setiap negara yang mengadopsi kapitalisme. Mengingat Cina telah mengadopsi beberapa elemen produksi kapitalisme, hukum nilai juga berlaku di Cina. Dalam studi komparasi ekonomi kapitalis antara Cina, AS, dan Jepang yang

dilakukan oleh Li (2017)<sup>2</sup>, tingkat keuntungan Cina mengalami kenaikan yang lebih tinggi jika dibandingkan AS dan Jepang pada periode pertengahan 1980 sampai dengan 2010. Tingginya tingkat keuntungan ini ini setidaknya menunjukkan bagaimana ekonomi kapitalis Cina menjadi sangat atraktif bagi modal untuk berinvestasi bahkan dibandingkan oleh 2 negara kapitalis besar seperti AS dan Jepang. Tidak heran jika kemudian Cina mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan pada periode-periode tersebut.



Tabel I Perbandingan Tingkat Keuntungan Cina, AS, dan Jepang

Akan tetapi ada yang khusus dari gerak hukum nilai yang berlaku di Cina. Operasi hukum nilai di Cina tidak berlaku layaknya banyak negara kapitalis pada umumnya mengingat negara memiliki kuasa untuk mengendalikan denyut hukum nilai yang berlaku. Tidak heran jika kemudian ekonom Marxis seperti Roberts<sup>3</sup> berpendapat bahwa ekonomi Cina merupakan sistem kapitalis yang unik. Perkembangan ekonomi Cina harus dilihat dari kemampuan ekonomi untuk menghindari dampak hukum nilai yang tidak stabil sambil juga mengakui kekuatannya yang tak terhindarkan. Dalam hal ini Cina mengadopsi hukum nilai yang beroperasi di pasar bebas seperti perdagangan luar negeri dan investasi asing. Namun pada saat yang sama kekuatan dari hukum nilai ini dapat diblokir

2 Li, Minqi. (2017). Profit, accumulation, and crisis: Long-term movement of the profit rate in China, Japan, and the United States. *The Chinese Economy*, 50(6), 381-404.

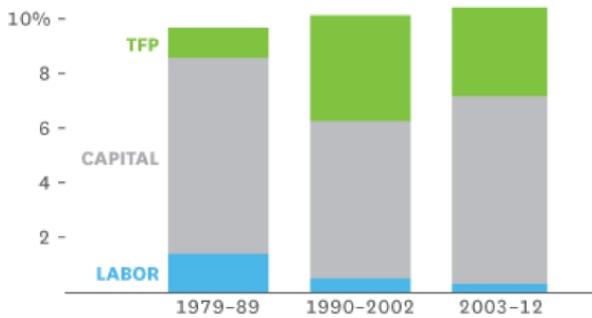
3 Roberts, Michael. (2018). "China Workshop: Challenging the misconceptions". Diunduh dari <https://thenextrecession.wordpress.com/2018/06/07/china-workshop-challenging-the-misconceptions/>

untuk kemudian ditertibkan dan dikendalikan oleh sektor besar milik negara, perencanaan pusat dan kebijakan makro serta pembatasan kepemilikan asing atas industri baru dan kontrol pada aliran modal masuk dan keluar dari negara.

Kerangka ini dapat menjelaskan karakter umum ekonomi Cina yang kompleks. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Oxford Economics, modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi Cina.

**CHINA'S SOURCES OF GROWTH**

Capital has been the major driver of China's growth over the last three decades, not labor or productivity increases (as measured by Total Factor Productivity, the ratio of output to inputs).

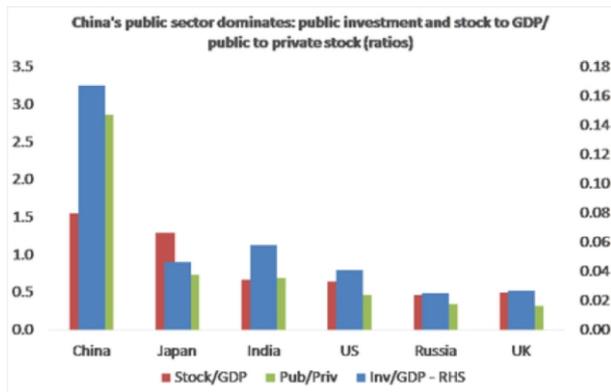


SOURCE OXFORD ECONOMICS

HBR.ORG

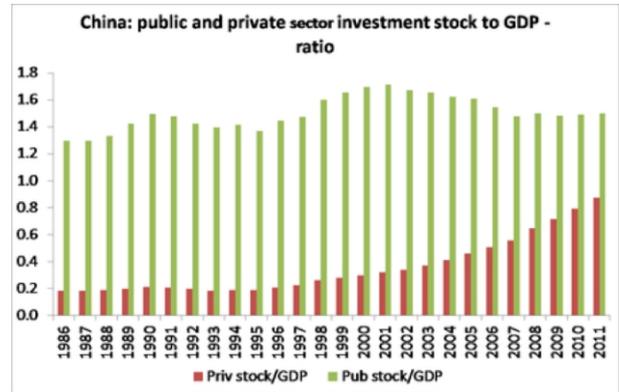
Tabel II Sumber Pertumbuhan Cina<sup>4</sup>

Namun pada saat bersamaan sektor publik-negara adalah aktor utama yang mengendalikan ekonomi Cina.



Tabel III Perbandingan Sektor Publik Cina, Jepang, India, AS, Rusia, dan Inggris<sup>5</sup>

Vidakovich<sup>6</sup> bahkan mencatat bahwa perbandingan antara sektor publik dengan swasta secara absolut bahkan mencapai rasio 3:1. Angka ini tentu lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang, India, AS, Rusia, dan Inggris.



Tabel IV Rasio Investasi Publik-Privat Cina<sup>7</sup>

Dengan konfigurasi struktur seperti ini, Cina memiliki kendali terhadap proses ekonomi yang terjadi. Alih-alih ekonomi bekerja sepenuhnya dalam logika kapitalisme, kapitalisme di Cina dikembangkan sejauh ia memenuhi kebutuhan politik yang ditentukan oleh pemerintah Cina sendiri yang berada dibawah kendali penuh Partai Komunis Cina (PKC). Kendali ini dapat dilihat pada bagaimana kemajuan ekonomi yang bersumberkan pada modal ini disalurkan untuk kemajuan teknologi Cina itu sendiri. Jika dibandingkan dengan negara kapitalis lain seperti AS dan Zona Eropa, alokasi anggaran negara untuk riset dan pengembangan teknologi meningkat secara eksponensial semenjak tahun 1996 sampai dengan 2017.<sup>8</sup>

Dengan anggaran riset dan pengembangan yang besar, Cina berhasil untuk mentransformasi industrinya untuk menjadi lebih inovatif. Transformasi ini mempengaruhi ekonomi global secara keseluruhan. Roberts mencatat bahwa dalam pertumbuhan produktivitas secara keseluruhan, produktivitas rata-rata yang

4 Ibid.

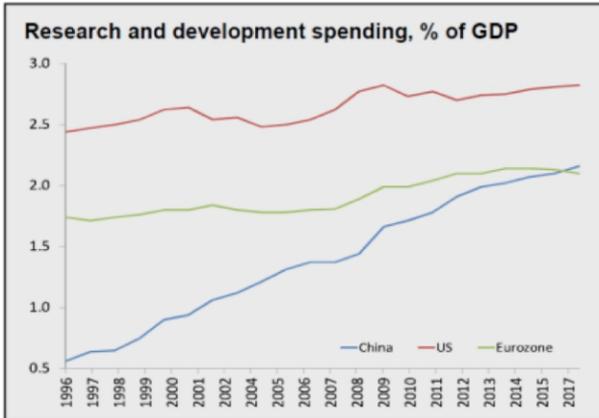
5 Vidakovich, Blair. (2018). "A Contribution to the Debate on the Class Character of China." Dalam SocialistAlliance.org. diunduh dari <https://socialist-alliance.org/alliance-voices/contribution-debate-class-character-china>

6 Ibid.

7 Ibid.

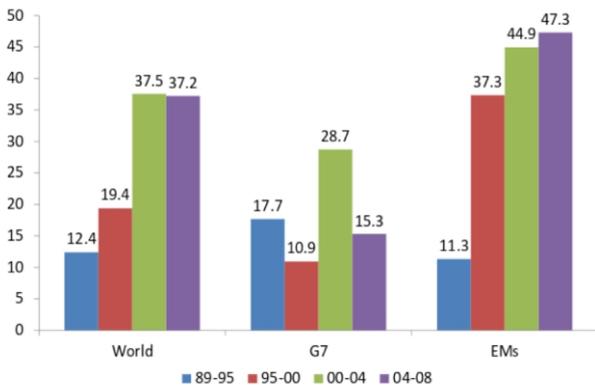
8 Roberts, Michael. (2018). "China Workshop: Challenging the misconceptions". Diunduh dari <https://thenextrecession.wordpress.com/2018/06/07/china-workshop-challenging-the-misconceptions/>

dicapai dari inovasi telah meningkat signifikan dibandingkan dengan input tenaga kerja dan modal sebagai sumber pertumbuhan dunia selama 20 tahun terakhir, kecuali di negara-negara G7, yang juga mengalami pertumbuhan jauh lebih lambat.



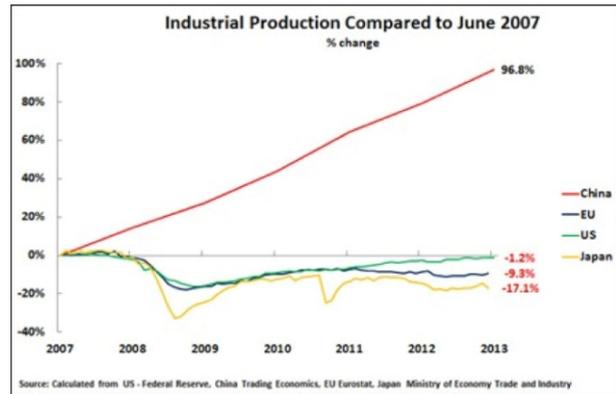
Tabel VI Pengeluaran Cina untuk Riset dan Pengembangan berdasar Persentase GDP<sup>9</sup>

Produktivitas rata-rata yang dicapai dari inovasi telah meningkat dari kontribusi 12% untuk pertumbuhan PDB dunia pada awal 1990-an menjadi 37% pada tahun 2008. Tetapi produktivitas rata-rata G7 yang dicapai dari kontribusi inovasi telah turun dari 18% menjadi 15%. Produktivitas rata-rata yang dicapai dari kontribusi inovasi dalam ekonomi baru (emerging market) telah meningkat dari hanya 11% pada 1990-an menjadi 47% pada 2008. Seiring dengan perkembangan ekonomi Cina, inovasi dan alih teknologi semakin penting bagi ekonomi baru atas input modal dan tenaga kerja ekonomi global.<sup>10</sup>



Tabel VII Perbandingan Produktifitas dan Inovasi Negara Ekonomi Baru terhadap Dunia dan Negara G7<sup>11</sup>

Tidak heran jika industrialisasi yang berbasis inovasi yang kuat ini membuat Cina memiliki kapasitas untuk mendorong industrialisasi. Jika dibandingkan dengan Uni Eropa, AS, dan Jepang produksi industrial Cina mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Cina mengalami perubahan 96.8% produksi industrial domestik.<sup>12</sup>



Tabel IX Produksi Industri dibandingkan pada Juni 2007,<sup>13</sup>

### Cina, Negara Imperialis Baru?

Masifnya perkembangan ekonomi Cina ketika mengadopsi kapitalisme menciptakan banyak pertanyaan tentang kekuatan Cina itu sendiri, terutama terkait dengan status apakah Cina tengah mengubah dirinya menjadi satu kekuatan imperialis baru. Untuk menjelaskan argumen ini kita perlu menelusuri terlebih dahulu apa yang sebenarnya kita maksud dengan imperialisme. Semenjak Cina masih mengklaim dirinya sebagai negara sosialis, evaluasi atas pandangan Cina sebagai kekuatan imperialis tentu harus dilihat dalam penjelasan teori Marxis tentang imperialisme.

Teori Imperialisme Marxis memulai analisisnya terhadap perkembangan khusus kapitalisme dimana dinamika kompetitif kapitalisme telah digantikan oleh perkembangan relasi modal yang

9 Ibid.

10 Vidakovich, Blair. (2018). "A Contribution to the Debate on the Class Character of China." Dalam SocialistAlliance.org. diunduh dari <https://socialist-alliance.org/alliance-voices/contribution-debate-class-character-china>

11 Ibid.

12 Roberts, Michael. (2015). "China: Three models of development." Diunduh dari <https://thenextrecession.files.wordpress.com/2015/09/china-paper-july-2015.pdf>

13 Ibid.

monopolistik.<sup>14</sup> Relasi modal yang monopolistik ini juga diiringi dengan peralihan bentuk akumulasi modal itu sendiri; dari bentuk modal yang berdasarkan pada akumulasi berbasis industri menjadi akumulasi berbasis keuangan (finance). Peralihan ini mengubah kondisi material dalam negara kapitalis itu sendiri. Motif utama akan akumulasi yang diiringi dengan karakter modal uang yang mudah untuk bergerak dan berpindah membuat setiap negara kapitalis memiliki insentif untuk memperluas ruang geografis akumulasi diluar dirinya sendiri. Metode utama dari perluasan ruang akumulasi ini dilakukan dengan cara ekspor modal dari negara kapitalis itu sendiri ke wilayah lain. Ekspor modal dari negara kapitalis ke wilayah lain memungkinkan terjadinya penghisapan kekayaan wilayah tersebut oleh negara kapitalis. Disinilah kita menemukan karakter umum dari imperialisme dimana terjadi ketimpangan distribusi kekayaan dimana negara kapitalis yang memiliki modal yang besar akan semakin kaya sementara wilayah lain yang mengimpor modal akan selalu miskin karena penghisapan.

Namun menjelaskan kapitalisme sekedar pada karakter umumnya tidak mencukupi. Penghisapan melalui perluasan ruang geografi modal selalu mensyaratkan suatu kondisi politik untuk menjamin proses akumulasi. Kondisi politik ini secara khusus adalah ketersediaan kekuatan militer untuk mengamankan modal serta akumulasinya di wilayah lain. Dalam hal ini, perkembangan kapitalisme yang semakin monopolistik mendorong terjadinya peningkatan kapasitas militer negara kapitalis sebagai upaya untuk mengamankan modal mereka yang diekspor ke wilayah lain. Hubungan antara modal monopoli negara kapitalis dengan kekuatan militer menjadi proposisi penting dalam kerangka imperialisme Marxis. Disinilah Lenin (1966, 326) menambahkan

cara pandang dialektis dimana imperialisme yang didukung oleh modal monopoli justru semakin memperkuat kompetisi, khususnya kompetisi antar negara kapitalis. Di sini, imperialisme dalam perspektif Marxis selalu melihat hubungannya dengan konflik militer antar negara kapitalis. Hal ini mengingat tiap negara kapitalis memiliki kepentingan untuk memastikan pengamanan modal monopoli yang diekspor ke wilayah lain.

Apa yang dapat disimpulkan dari perspektif Marxis terhadap imperialisme adalah adanya keterkaitan yang kuat antara agenda ekonomi dan politik dalam ekspansi ekonomi internasional negara kapitalis. Ketika modal monopoli semakin mendominasi kekuasaan negara kapitalis, adalah logis kemudian jika kekuasaan negara digunakan untuk mendukung dominasi modal monopoli. Masalahnya kemudian dalam terang cara pandang ini, menjadi sulit untuk mengkategorikan Cina sebagai negara imperialis. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, negara dibawah kepemimpinan Partai Komunis Cina (PKC) merupakan monopoli utama dari perkembangan kapitalisme yang ada alih-alih monopoli modal sektor keuangan. Dalam analisisnya mengenai kerjasama ekonomi Cina terhadap banyak negara berkembang (The Global South), Breslin (2013) mencatat bagaimana operasi ekonomi Internasional Cina sangatlah fragmentatif. Jika agenda ekonomi internasional negara barat AS dilakukan dengan dukungan institusional negara yang mumpuni dimana faktor politik juga menjadi perhatian dalam mendukung agenda ekonomi tersebut, maka agenda ekonomi luar negeri Cina sangatlah jauh dari dinamika yang seperti itu. Kementerian Luar Negeri Cina sangatlah lemah dalam mengendalikan agenda ekonomi internasional Cina itu sendiri. keberadaan aktor ekonomi swasta Cina lebih

14 Lenin, V. Illich (1966). *Imperialism: The Highest Stage of Capitalism*. Moscow: Progress Publishers.

mendominasi dalam melakukan hubungan ekonomi luar negeri yang seringkali merupakan agenda otonom untuk mengejar keuntungan mereka sendiri, terlepas dari kepentingan pemerintah Cina (Breslin 2013, 1273).<sup>15</sup>

Secara ekonomi, Cina juga masih memiliki ketergantungan finansial terhadap negara kapitalis barat. Misalnya, King (2018)<sup>16</sup> berpendapat banyaknya uang Cina yang digunakan untuk membeli surat hutang justru menciptakan kondisi uang murah di mana korporasi-korporasi besar AS memiliki sumber dana yang besar untuk kemudian menggunakannya untuk kepentingan akumulasi mereka. Menurut Norfield (2016), situasi ini merupakan buah dari keutamaan dolar AS dalam sistem keuangan internasional. Jika Cina harus bekerja keras untuk menghasilkan nilai dalam menopang valuasi mata uang mereka (melalui kerja, perdagangan, atau aktifitas ekonomi lainnya), maka AS tidak memerlukan aktifitas ekonomi tersebut dalam mendukung valuasi dolar karena bank sentral AS dimungkinkan untuk membuat nilai melalui pencetakan uang dolar.

Hal lain yang perlu ditilik secara lebih mendalam adalah bagaimana faktor politik internasional ikut berlaku dalam perkembangan keterlibatan Cina dalam pembangunan ekonomi internasional, kita menemukan bagaimana Cina cukup komprehensif untuk membangun kekuatan militer yang agresif dan ekspansional. Indikatornya dapat dilihat pada bagaimana basis militer internasional Cina hanya berada di tiga wilayah (Djibouti, Kamboja, dan Tajikistan). Bandingkan dengan AS dan Inggris dimana basis militer internasional mereka hampir berada di banyak wilayah di belahan dunia. AS memiliki basis militer di 36 wilayah, sementara Inggris memiliki basis militer di 14 wilayah.

Absennya agenda politik yang sistematis dalam agenda ekonomi internasional Cina membuat keterlibatan ekonomi Cina ke wilayah lain perlu dilihat secara proporsional. Dalam suatu observasi tentang kontribusi perusahaan Cina terhadap ekonomi Afrika, Xiaoyang (2016)<sup>17</sup> menunjukkan pada bagaimana operasi perusahaan Cina tidak berbeda dengan keberadaan banyak perusahaan lainnya. Logika perhitungan keuntungan-kerugian yang biasa diterapkan perusahaan berlaku juga dalam perusahaan Cina.

Dalam kaitannya investasi dan tenaga kerja di wilayah non-Cina misalnya, perusahaan Cina dihadapkan pada dilema khusus. Dilema ini sangat terkait dengan proses alih teknologi dari Cina ke negara non-(berbahasa) Cina. Untuk melakukan operasi organisasi, teknologi, serta proses awal produksi, perusahaan Cina tidak dapat menggunakan pekerja lokal karena adanya hambatan bahasa. Diperlukan waktu yang biasanya cukup lama untuk melatih serta memastikan pekerja lokal dapat berbahasa mandarin, khususnya untuk kepentingan operasional. Masalahnya kemudian, mempekerjakan pekerja dari Cina langsung memakan biaya yang lebih mahal. Banyak perusahaan tersebut Cina tersebut harus mengalokasi biaya pekerja yang lebih tinggi untuk dapat menarik minat pekerja Cina untuk bekerja di negara lain.<sup>18</sup> Tidak heran jika kemudian tren ketenaga-kerjaan pekerja Cina di Afrika akan cenderung untuk mengalami perubahan dalam jangka panjang. Banyak perusahaan Cina di Afrika akan menurunkan jumlah pekerja dari Cina hanya sampai maksimal 20% dari keseluruhan posisi kerja di perusahaan Cina tersebut.

### **Ekonomi Cina dan Perkembangan Kekuatan Produktif**

Lalu bagaimana kita mengevaluasi

15 Breslin, S. (2013). China and the South: Objectives, actors and interactions. *Development and Change*, 44(6), 1273-1294.

16 King, S. T. (2018). China and the Third World are not "catching up" to the rich countries. *Journal of Labor and Society*, 21(4), 447-470.

17 Xiaoyang, Tang, (2016). "Does Chinese Employment Benefit Africans? Investigating Chinese Enterprises and their Operations in Africa". *African Studies Quarterly*, Vol 16 (3-4). 107-128.

18 Ibid, hal. 110

perkembangan unik kapitalisme yang berlaku di Cina? Dalam evaluasinya terhadap praktek ekonomi-politik di Cina di bawah kepemimpinan PKC, Losurdo<sup>19</sup> beranggapan bahwasanya upaya untuk merealisasikan sosialisme tidak pernah bersifat final. Walau kelas kapitalis berhasil dijatuhkan, para komunis tetap harus menghadapi kapitalisme sebagai suatu sistem abstrak dengan segala gerak dan dinamikanya. Untuk itu, alih-alih melihat sosialisme sebagai agenda yang lengkap, sosialisme justru harus diakui sebagai politik yang penuh dengan eksperimentasi dalam menghadapi kelenturan abstrak dari kapitalisme.

Losurdo memberikan contoh pada bagaimana Uni Soviet mencoba untuk merealisasikan sosialisme. Komunis Soviet harus melakukan banyak penyesuaian agenda pembangunan dalam situasi yang riil mereka hadapi. Pasca revolusi, Rusia bukan sekedar dihadapi pada tingkat kemiskinan yang akut. Namun juga ancaman kontra-revolusioner yang muncul dari dalam maupun luar. Tidak heran jika dalam situasi ini agenda sosialisme era Soviet lebih serupa dengan suatu eksperimentasi perang. Pada fase awal sosialisme Soviet dibangun diatas gagasan "komunisme perang" (war communism) dimana pemerintahan revolusioner Bolshevik harus menghadapi ancaman kontrarevolusioner. Dalam situasi ini, sistem ekonomi dirancang guntuk memenuhi kebutuhan darurat perang. Dalam situasi ini kelas kaya berhasil disingkirkan, namun implikasinya populasi Rusia menjadi sepenuhnya didominasi oleh kelas miskin dan sangat miskin.

Losurdo mencatat keresahan Lenin bahwa perkembangan ekonomi ini justru bertolak-belakang dengan ideal awal sosialisme sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.<sup>20</sup> Pada Oktober 1920 di acara pertemuan

Komunis Muda, Lenin mendeklarasikan bahwa Partai Komunis berkeinginan untuk mentransformasi Rusia dari negara miskin menjadi kaya. dalam titik inilah kemudian Partai Komunis dibawah kepemimpinan Lenin beberapa tahun kemudian memperkenalkan Kebijakan Ekonomi Baru (New Economy Policy, NEP) yang pada dasarnya memberikan ruang bagi ekonomi kapitalis untuk beroperasi untuk mendorong kekuatan produktif Rusia.<sup>21</sup> NEP berhasil untuk meningkatkan ekonomi Rusia secara perlahan. Namun kebijakan ini belum mampu untuk menciptakan ekonomi negara yang kuat. Pasca kepemimpinan Lenin, Stalin berupaya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Rusia. Dibawah kepemimpinannya, ia menghentikan inisiatif NEP dan digantikan oleh kebijakan kolektifisasi serta modernisasi teknologi produksi.<sup>22</sup> Dengan kebijakan kolektifisasi dan modernisasi teknologi inilah kemudian Soviet Rusia mengalami percepatan ekonomi dalam jangka waktu beberapa dekade. Keberhasilan kebijakan ekonomi sosialis ini mampu pula mengantarkan Soviet menjadi negara dengan kekuatan besar yang dapat menghadapi hegemoni kapitalis AS.

Sosialisme Cina menghadapi situasi yang serupa tapi tak sama dengan Uni Soviet. Cina dihadapi pada masalah keterbelakangan ekonomi pasca memenangi perebutan kekuasaan melawan kelompok nasionalis. Sama seperti Lenin, Mao melihat bahwas sosialisme bukanlah sosialisasi kemiskinan dan kesengsaraan. Segera setelah komunis berkuasa, PKC melancarkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas ekonomi Cina. Mao memperkenalkan kebijakan reforma agrarian yang komprehensif yang didukung dengan inisiatif industrialisasi "lompatan jauh kedepan." Namun sayangnya kebijakan ini masih sangat terbatas untuk meningkatkan tingkat ekonomi Cina.

19 Losurdo, Domenico. (2017). "Has China Turned to Capitalism?—Reflections on the Transition from Capitalism to Socialism." *International Critical Thought* 7.1: 15-31.

20 Ibid. 16

21 Lenin, V. Illich. (1965). "The New Economic Policy and the Tasks of of the Political Education Department." Diunduh dari <https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1921/oct/17.htm>

22 Stalin, Joseph. (1972). "The Economic Problems of Socialism in the USSR." Diunduh dari <https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1951/economic-problems/index.htm>

Jawaban Mao terhadap keterbatasan ini adalah politik.<sup>23</sup> Sembari melakukan kritik terhadap Stalin yang dianggapnya terlalu deterministik-mekanistik dalam melihat perkembangan ekonomi sebatas kekuatan produksi, Mao berpendapat bahwa pembangunan ekonomi sosialis harusnya bersifat politis mengikutsertakan massa. Ide inilah yang kemudian menghantarkan PKC dibawah Mao melakukan kampanye revolusi kebudayaan. Revolusi kebudayaan bertujuan untuk menghancurkan kekuatan kontra-revolusioner yang menggerogoti tubuh politik PKC yang menjadi hambatan ideologi praktek ekonomi sosialis.

Revolusi kebudayaan era Mao adalah praktek politik yang penting dalam menghancurkan ilusi pembagian kerja yang berkembang dalam produksi kapitalisme melalui perlawanan terhadap birokratisme partai dan juga pengenalan solidaritas kelas lintas posisi sosial (mahasiswa-pekerja-petani). Namun sayangnya, revolusi kebudayaan belum mampu untuk mendorong peningkatan ekonomi Cina. Setelah wafatnya Mao, PKC mengalami konflik internal yang tajam terkait masa depan orientasi kebijakan partai pasca revolusi kebudayaan. Konflik internal partai kemudian dimenangkan oleh faksi Deng Xiaoping yang kemudian memperkenalkan reformasi ekonomi di Cina pada tahun 1978. Dalam fase inilah kemudian PKC menganulir revolusi kebudayaan dan kemudian memperkenalkan implementasi kapitalisme di Cina yang kemudian sekarang dikenal sebagai sosialisme pasar.<sup>24</sup>

Dari dinamika kebijakan sosialis dari Mao sampai Deng, munculnya praktek sosialisme pasar perlu dipahami sebagai eksperimentasi sosialis dalam menjawab keterbatasan ekonomi di Cina. Sosialisme pasar ala Deng memperkenalkan kembali model ekonomi yang sudah diperkenalkan sebelumnya melalui NEP di era Lenin. Deng

juga menggunakan gagasan modernisasi Stalin untuk meningkatkan kekuatan produksi Cina dalam agenda reformasi ekonominya. Mengingat ia adalah bagian dari eksperimentasi sosialisme, kita perlu memahami mengapa dalam model sosialisme pasar, masih digunakan istilah sosialis. Karena memang eksperimentasi ini bukan benar-benar praktek kapitalisme murni.

Dalam proses perkembangan kapitalisme seperti ini, kita dapat menemukan bagaimana Cina telah berhasil mentransformasikan ekonomi dan masyarakatnya sejak revolusi tahun 1949 dengan menghilangkan kekuatan kapitalis dan imperialis dan melalui kontrol negara atas ketinggian industri dan pertanian. Dan sekarang berhasil menerapkan teknologi baru untuk membawanya maju sebagai masyarakat urban modern di abad ini.

Namun pada saat yang sama negara Cina memungkinkan kapitalisme untuk beroperasi di dalam negeri. Tidak heran jika masalah-masalah sosial yang berlaku umum dalam sektor kapitalis dalam ekonomi sedang tumbuh juga terjadi di Cina. Muncul ada banyak kelas kapitalis baru di Cina. Terjadi ketimpangan pendapatan dan kekayaan telah meningkat antar kelas dan wilayah. Sementara kelas pekerja Cina masih harus berjuang melawan eksploitasi di tempat kerja. Namun yang perlu dicatat dari perkembangan sosial yang kapitalistik seperti ini adalah negara Cina sebagai masih mampu untuk mengisolasi kekuatan kelas kapitalis untuk mempengaruhi politik negara. Walau ekonomi pasar di Cina sangat hidup, sektor ekonomi masihlah didominasi oleh sektor publik yang dikuasai oleh negara. Selain itu pengaruh politik kelas kapitalis begitu terbatas di Cina. Kelas kapitalis tidak dapat mempengaruhi begitu saja keputusan politik yang telah ditetapkan oleh Politbiro PKC. Tidak heran jika dalam situasi pasar di

23 Tse Tung, Mao. (2004). "Critique of Stalin's Economic Problems of Socialism in the USSR." Diunduh dari [https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-8/mswv8\\_66.htm](https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-8/mswv8_66.htm)

24 Chungui, Yang. (2001). "Deng Xiaoping Theory and the Historical Destiny of Socialism" dalam *The Marxist* Vol. 17: 1 (April-Juni), diunduh dari [http://www.cpm.org/marxist/200102\\_marxist\\_deng\\_yang.htm](http://www.cpm.org/marxist/200102_marxist_deng_yang.htm)

Cina sangat terbuka untuk diintervensi oleh kekuatan negara, jika memang negara melihat koreksi ekonomi perlu dilakukan.<sup>25</sup>

### **Lalu, Dimanakah Letak Perjuangan Kelas?**

Saya mengakui bahwa pembacaan ini berkesan simpatik dalam melihat posisi politik sosialis PKC. Simpati ini cenderung untuk mengaburkan kenyataan bahwa politik sosialis Cina adalah politik sosialis yang bersifat satu dimensi. Karena sosialisme ilmiah Cina sepenuhnya hanya berurusan dengan masalah "ekonomi" atau "kekuatan produktif." Jika memang PKC adalah organisasi politik Marxis, lalu dimana letak agenda "relasi produksi," "perjuangan kelas," atau lebih tepatnya "politik proletariat" dalam politik sosialisme Cina sekarang?

Dalam menjawab pertanyaan ini, sekali lagi, kita tidak dapat memahami perjuangan kelas dalam sosialisme pasar di Cina terlepas dari dinamika historis kapitalisme secara keseluruhan, sebagai suatu sistem dunia. Sulit untuk menafikan bahwa model sosialisme pasar ala Cina adalah sistem ekonomi yang gagal. Dengan sosialisme pasar, Cina berhasil memunculkan dirinya sebagai kekuatan global baru. Hal ini tentu memiliki dampak terhadap konstelasi kuasa dunia dimana kekuatan imperialis global mendapat tantangan dari Cina sebagai kekuatan sosialis tersendiri.

Tentu kita tidak dapat melihat kemunculan kekuatan sosialisme Cina di ranah global berlangsung secara mulus. Kita masih menemukan bagaimana Cina masih menciptakan ancaman atau berkonflik dengan negara lainnya.<sup>26</sup> Akan tetapi pada saat yang sama, kehadiran Cina dan dukungannya dapat berguna bagi setiap kekuatan kiri progresif yang sedang melakukan konfrontasi dengan kekuatan imperialisme. Dapat kita lihat misalnya pada pengalaman negara-negara kiri Amerika Latin yang berhasil memenangkan serta

mempertahankan agendanya karena kedekatan politik dengan Cina.<sup>27</sup> Belum lagi pengalaman kemenangan Partai Komunis Bersatu Nepal dalam Pemilu 2018 dimana dukungan Cina mengubah konstelasi dukungan publik yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap Partai Kongres yang selalu didukung oleh India.<sup>28</sup> Contoh-contoh ini setidaknya memberikan gambaran nyata betapa kehadiran sosialis Cina sebagai kekuatan baru dapat berguna bagi perjuangan kelas dalam sistem kapitalisme global sekarang.

Masalahnya tentu pada tingkatan domestik, apa yang disebut sebagai sosialisme Cina masih sulit dikategorikan sebagai suatu bentuk "politik proletariat." Di bawah kekuasaan PKC sekarang, kelas pekerja Cina masih kesulitan untuk memenuhi hak-hak sosial-ekonominya. Hanya segelintir pekerja formal di Cina yang mendapatkan perlindungan sosial dari Negara. Sementara kehidupan banyak pekerja migran Cina juga sangat memprihatinkan di mana mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Keterbatasan pemenuhan hak-hak kelas pekerja diiringi dengan minimnya ruang pengorganisasian serikat buruh yang independen dari kendali negara. Dampaknya, setiap perjuangan buruh untuk mendapatkan hak ekonominya dapat berujung pada kriminalisasi. Tanpa adanya perimbangan kekuatan dari buruh terorganisir, pembangunan sosialisme pasar Cina justru menciptakan kondisi ketimpangan ekonomi yang tinggi di masyarakat.

Namun kita perlu melihat proses perjuangan kelas di Cina secara lebih mendetail. Ekspresi perjuangan kelas melalui perjuangan buruh dalam menuntut hak-haknya mungkin mengalami represi. Namun dalam ranah yang lain, upaya revitalisasi Marxisme dan agenda sosialisme dalam tubuh PKC sekarang ini membukakan ruang

25 <https://www.theguardian.com/business/2015/sep/07/chinese-market-interventions-yuan-stock-markets>

26 Selain itu mulai muncul perdebatan apakah dengan Cina menjadi kekuatan global baru ia menjadi bagian dalam imperialism itu sendiri. Lihat misalnya <http://my.internationalviewpoint.org/spip.php?article3468>. Untuk bantahan terhadap argument ini lihat Taylor, Ian, and Yuhua Xiao. "A Case of Mistaken Identity: "China Inc." and Its "Imperialism" in Sub-Saharan Africa." *Asian Politics & Policy* 1, no. 4 (2009): 709-725.

27 <https://www.jacobinmag.com/2016/07/pink-tide-latin-america-chavez-morales-capitalism-sosialism/>

28 <https://sputniknews.com/asia/201712291060395173-nepal-election-china-pivot-india/>

pertarungan untuk memenangkan agenda kelas pekerja. Salah satu bentuk konflik yang patut menjadi perhatian munculnya kembali berkembangnya tradisi pemikiran Maoisme dalam situasi Cina kontemporer.<sup>29</sup> Ada yang berpendapat bahwa kemunculan kembali gagasan Mao adalah bagian dari PKC untuk membangkitkan sentimen patriotik dan nasionalis dari warga Cina.<sup>30</sup> Akan tetapi pada kenyataannya, pemikiran neo-Maoisme ini justru digunakan untuk mengkritisi perkembangan kapitalisme di Cina yang justru menciptakan ketimpangan serta ketidakadilan. Kalangan Neo-Maois berkontribusi dalam melakukan kritik terhadap kekuasaan Xi yang dianggap menyimpang dari pemikiran Mao.<sup>31</sup> Tidak heran jika kemudian dalam beberapa kesempatan, aktifis yang mengusung gagasan Marxis-Maois ikut menjadi korban dari represi negara.<sup>32</sup> Menariknya di tengah perkembangan ini, PKC tidak dapat berbuat banyak untuk membatasi kebangkitan Maoisme karena gagasan ini adalah bagian integral dari keberadaan historis PKC itu sendiri.<sup>33</sup>

Dalam perkembangan kebangkitan Maoisme sekarang, kita dapat melihat setidaknya tengah terjadi perjuangan kelas melalui pertarungan ideologi dalam tubuh PKC sendiri sebagai organisasi sosialis. Secara resmi mungkin kita tetap dapat melihat bahwa kepemimpinan PKC sekarang tidak bisa dikatakan sepenuhnya bergaris Maois. Namun mengatakan bahwa PKC kebal terhadap kritik Maois dapat pula dikatakan keliru. Sedikit banyak perubahan sikap PKC yang kembali mendorong kebijakan “garis massa” sekarang tidak terlepas dari pertarungan ideologi dalam partai. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk melihat PKC sebagai organisasi politik yang dinamis yang mana pertarungan politik

merupakan proses yang tak terelakan.

Mungkin hal ini akan terdengar terlalu optimistis, namun pertarungan ideologi dalam tubuh PKC sekarang setidaknya membuat kita sadar bahwa garis politik PKC tidak dapat dilihat secara final. Tentu tidak ada yang pasti dalam setiap proses pertarungan. Namun bagi saya, pertarungan internal yang terjadi setidaknya membuka peluang bagi terjadinya perubahan garis politik partai, dari yang tadinya sebatas “kekuatan produktif” semata menjadi bergerak ke urusan “relasi produksi” yang mulai peduli pada memenuhi hak-hak sosial-ekonomi kelas pekerja Cina.

### **Tantangan Politik Lingkungan “Sosialisme dengan karakteristik Cina”**

Dimensi lain dari perjuangan kelas yang juga penting diperhatikan dari pemrioritasan agenda kekuatan produktif dalam pembangunan sosialisme Cina adalah munculnya kontradiksi dalam agenda politik lingkungan Cina. Adopsi relasi kapitalisme dalam ekonomi Cina mendorong terjadinya perubahan serta perusakan lingkungan di Cina dalam skala besar. Menurut Inclusive Wealth Report 2014 (IWR 2014) yang dikeluarkan oleh Universitas Persatuan Bangsa-bangsa,<sup>34</sup> antara tahun 1990 dan 2010, Produk Domestik Bruto (PDB) Cina tumbuh sebesar 523 persen, tetapi hanya 47 persen dalam hal “kekayaan inklusif,” Konsep kekayaan inklusif merujuk pada dalam artian kekayaan yang dapat dinikmati oleh seluruh warga negara yang mana termasuk dengan kualitas lingkungan hidup warga negara. Tingkat pertumbuhan rata-rata Indeks Kekayaan Inklusif yang disesuaikan untuk Cina adalah negatif selama periode ini. Kementerian Perlindungan Lingkungan China memperkirakan bahwa memperbaiki dan

29 <https://www.ft.com/content/63a5a9b2-85cd-11e6-8897-2359a58ac7a5>

30 <https://www.nytimes.com/2017/04/03/world/asia/maoists-for-trump-in-china-fans-admire-his-nationalist-views.html>

31 <https://medium.com/@dylanleviking/neo-maoist-reading-club-a-left-maoist-reaction-to-xi-jinpings-constitutional-amendments-f0c0a66c49ee>

32 Salah satunya adalah Zhang Yunfan. Seorang mahasiswa doctoral Universitas Peking yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena ia terlibat aktif dalam kelompok diskusi Marxis dan juga aktifitas pengorganisasian kelas pekerja lainnya. Lihat <https://www.quora.com/What-are-some-opinions-on-Zhang-Yunfan-being-arrested-in-a-reading-group-by-the-police-of-Panyu-Guangzhou-despite-his-being-a-pure-Marxist-and-Maoist-and-promoting-Marxism>

33 <http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2125541/chinese-scholars-sign-open-letter-calling-release>

34 International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change 2014, [Inclusive Wealth Report 2014: Measuring Progress Toward Sustainability](http://www.ihdp.unu.edu). Diunduh dari <http://ihdp.unu.edu>, hal. 220-213.

mencegah pencemaran air saja akan menelan biaya \$ 320 miliar dan memakan waktu setidaknya empat puluh tahun, dan para ahli memperkirakan bahwa merawat tiga situs kontaminasi paling parah—air, udara, dan tanah—akan menelan biaya \$ 960 miliar. Kontaminasi yang paling parah ini tidak hanya menimbulkan masalah biaya perbaikan, tetapi juga cara berbagai sektor sosial dipengaruhi oleh kontaminasi dan upaya responsif pemerintah. Belum lagi Investasi untuk pengendalian polusi sebagai proporsi dalam PDB ekonomi Cina terus menunjukkan peningkatan yang stabil dari 1,06 persen pada 2001 menjadi 1,51 persen pada 2014.<sup>35</sup>

Selain itu, antara tahun 1990 dan 2010, PDB Cina yang bertumbuh sebesar 523 persen, hanya 47 persen kekayaan ekonomi Cina yang tumbuh yang dapat dikategorikan sebagai "kekayaan inklusif". IWR 2014 menunjukkan bagaimana ekonomi Cina berdasarkan kekayaan inklusif menyusut dengan tingkat rata-rata yang disesuaikan dari 6,2 persen dari tahun 1991 hingga 1995, 2,0 persen pada tahun 1996-2000, 1,7 persen pada tahun 2001 - 05, dan 5,2 persen pada tahun 2006 - 10.28 Jadi, ketika biaya lingkungan dari pertumbuhan diperhitungkan, maka kenaikan PDB China yang spektakuler harus didemistifikasi upaya pencegahan pencemaran air saja akan memakan waktu setidaknya empat puluh tahun dan dua triliun yuan (\$ 320 miliar), menurut Kementerian Perlindungan Lingkungan Cina. Kementerian juga menghitung bahwa air, udara, dan tanah-tiga sumber daya yang paling terkontaminasi akan menelan biaya enam triliun yuan (\$ 960 miliar) untuk diolah.<sup>36</sup>

Untuk merespon situasi krisis lingkungan ini, negara Cina mendorong banyak pemerintahan negara bagian untuk melakukan kebijakan lingkungan yang bersifat rehabilitatif. Dalam Rencana Lima

Tahun yang dikeluarkan di Beijing periode tahun 2013–17, misalnya, negara mengupayakan penghilangan pembakar batubara untuk selesai pada Desember 2017. Selain itu Cina juga mendorong arahan birokrasi untuk membangun "zona tanpa-batubara" untuk Beijing, Tianjin, dan 26 Kota di Provinsi tersebut. Hebei, Shanxi, Shandong, dan Henan, yang melibatkan tiga juta keluarga, pada akhir Oktober tahun itu. Seorang pejabat dari Departemen Energi Provinsi Hebei menyatakan bahwa permintaan gas pada 2017 adalah 8,2 miliar meter kubik, meningkat 134 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dan bahwa provinsi menghadapi kekurangan pasokan gasnya sebesar 26 persen. Pada awal Desember 2017, ketika pemerintah melunakkan larangan yang sebelumnya tanpa kompromi pada semua pembakaran batubara, mengakui perlunya memprioritaskan pemanasan untuk populasi, sebagian besar pembakar batubara telah dihancurkan. Berita baiknya, setidaknya bagi mereka yang dapat menghangatkan rumah mereka, adalah bahwa kualitas udara di China utara tampaknya telah meningkat.<sup>37</sup>

Kemampuan Cina untuk mendorong inisiatif rehabilitasi lingkungan tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar agenda politik lingkungan PKC itu sendiri. Pada Kongres Nasional ke-17 pada tahun 2007, PKC secara resmi mengusulkan pembangunan "peradaban ekologis," menciptakan hubungan yang lebih berkelanjutan antara produksi, konsumsi, distribusi, dan pertumbuhan ekonomi. Tujuannya adalah untuk membentuk "struktur industri yang efisien energi dan sumber daya, ramah lingkungan, pola pertumbuhan, dan cara konsumsi." Gagasan ini mencerminkan perubahan penting dalam pemahaman Partai tentang pembangunan. Daripada menekankan konstruksi ekonomi sebagai inti pembangunan, seperti yang

35 Chi, Lau Kin. (2018). "A Subaltern Perspective of China's Ecological Crisis." Dalam MonthlyReview.org. diunduh dari <https://monthlyreview.org/2018/10/01/a-subaltern-perspective-on-chinas-ecological-crisis/>

36 Ibid.

37 Chi, Lau Kin. (2018). "A Subaltern Perspective of China's Ecological Crisis." Dalam MonthlyReview.org. diunduh dari <https://monthlyreview.org/2018/10/01/a-subaltern-perspective-on-chinas-ecological-crisis/>

terjadi di masa lalu, otoritas Partai telah menyadari bahwa pembangunan berkelanjutan harus didasarkan pada pemahaman tentang hubungan yang saling terkait antara manusia dan alam. Pada Kongres Nasional ke-18 CPC tahun 2012, "konstruksi peradaban ekologis" dituliskan ke dalam Konstitusi CPC. Presiden Cina pada saat itu, Hu Jintao, menyatakan, "Kita harus memberikan prioritas tinggi untuk membuat peradaban ekologis, bekerja keras untuk membangun negara yang indah, dan mencapai pembangunan bangsa China yang berkelanjutan dan berkelanjutan." Hu memberi konsep "peradaban ekologis" posisi yang menonjol dengan memasukkannya ke dalam rencana pembangunan keseluruhan negara bersama dengan kemajuan ekonomi, politik, budaya, dan sosial. Dalam laporannya, Hu menyerukan upaya untuk menjaga lebih banyak lahan pertanian bagi para petani, dan memberikan kepada generasi mendatang tanah air yang indah dengan ladang hijau, air bersih, dan langit biru. Bagi Xi Jinping, pemimpin presiden Cina sekarang membangun peradaban ekologis adalah suatu alasan "menguntungkan generasi kontemporer dan generasi masa depan." Singkatnya, gagasan peradaban ekologis dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah Tiongkok untuk generasi mendatang dan kepada dunia alami. Prinsip-prinsip ini dibangun ke dalam rencana lima tahun terbaru (2011-2015). Meskipun banyak yang mempertanyakan keseriusan komitmen BPK terhadap pembangunan peradaban ekologis, terbukti bahwa: (1) muncul dari kebutuhan nyata di Tiongkok, di mana telah terjadi kerusakan ekologis yang luar biasa; (2) merupakan respon terhadap pertumbuhan protes lingkungan besar-besaran di seluruh Cina; dan (3) telah ditindaklanjuti dengan upaya besar-besaran pemerintah di bidang perencanaan, produksi, dan pengembangan teknologi.<sup>38</sup>

Karena peran besar perencanaan negara, Cina telah mampu membuat perubahan cepat di sejumlah bidang, terkadang bertentangan dengan logika pertumbuhan ekonomi. Contoh upaya tersebut adalah: (1) pengurangan target pertumbuhan ekonomi yang dibenarkan dalam hal pertumbuhan yang lebih seimbang secara lingkungan; (2) promosi besar-besaran teknologi surya dan angin; (3) meningkatnya porsi konsumsi energi non-fosil; (4) pembuatan garis merah untuk melindungi minimal 120 juta hektar lahan pertanian; (5) pengurangan polutan udara utama sebesar 8-10 persen dalam Rencana Lima Tahun ke-12 (2011-2015); (6) penghapusan enam juta kendaraan berpolusi tinggi dari jalan pada tahun 2014; (7) peningkatan 700 persen dalam output mobil penumpang listrik pada 2014; (8) inisiasi kampanye pemerintah untuk gaya hidup hemat dan menentang pemborosan (konsumsi mencolok) oleh para pejabat; (9) kritik resmi yang berkembang yang terlalu mementingkan PDB; dan (10) janji untuk mengurangi intensitas karbon PDB sebesar 40-45 persen pada tahun 2020 dari tingkat 2005, ditambah dengan janji untuk mencapai puncak emisi karbon dioksida pada tahun 2030, jika tidak lebih cepat; dan (11) pengenaan pajak pada sumber daya baru untuk batubara.<sup>39</sup>

Melalui proyeksi "peradaban ekologis" ini dapat dikatakan Cina berupaya untuk memimpin agenda energi hijau di dunia sekarang ini. Menurut New York Times, Cina telah menjadi "pembuat turbin angin terbesar di dunia" dan "produsen panel surya terbesar di dunia." Pada 31 Desember 2007, pemerintah Cina mengumumkan larangan kantong plastik gratis, dan sejauh ini China telah mengurangi penggunaan kantong plastiknya sebesar 24 miliar, menghemat 4,8 juta ton minyak bumi. Baru-baru ini pemerintah Kota Beijing telah memutuskan untuk mendedikasikan 760 miliar yuan (\$ 125 miliar) untuk mengatasi kabut asap

38 Wang, Zhihe., He, Huili, and Fan, Meijun. (2014). "The Ecological Civilization Debate in China: The Role of Ecological Marxism and Constructive Postmodernism." Dalam Monthlyreview.org. diunduh dari <https://monthlyreview.org/2014/11/01/the-ecological-civilization-debate-in-china/>

39 Foster, John Bellamy. (2015). "Marxism, Ecological Civilization, and China." Dalam Monthly Review.org. diunduh dari <https://mronline.org/2015/06/12/foster120615.html/>

yang berat. Pada 18 Februari 2014, sebuah laporan resmi menunjukkan bahwa China bermaksud untuk melengkapi pengukuran PDB dengan indikator kualitas, dan dua pertiga dari provinsi China telah menurunkan target pertumbuhan mereka tahun ini. Selama pembicaraan iklim PBB September 2014 di New York, Tiongkok bergabung dengan tujuh puluh dua negara lain dalam mendukung penetapan harga emisi karbon—suatu langkah yang ditentang oleh Amerika Serikat.<sup>40</sup> Semua ini menunjukkan bahwa banyak pemimpin Cina siap mengambil lebih banyak tindakan serius dari sebelumnya, dan bahwa pemerintah mengambil tanggung jawabnya untuk melindungi lingkungan hidup dari imbas pembangunan ekonomi.

### Kesimpulan

Posisi Cina sebagai kekuatan dunia yang tengah bertumbuh perlu dilihat secara adil dan proporsional. Karakteristik pembangunan kapitalisme Cina tidak dapat disamakan dengan perkembangan kapitalisme dengan negara kapitalis lain. Menjadi tidak bijak kemudian jika kita melakukan generalisasi bahwa apa yang berlaku di negara kapitalis barat akan kemudian berlaku pula dengan Cina. Khususnya, kita akan melakukan penilaian yang sama bahwa Cina akan melakukan praktek penundukan yang sama yang telah banyak dilakukan oleh banyak negara kapitalis maju terhadap negara lain yang lebih lemah. Disini lah kita perlu menghilangkan bias yang berlebihan bahwasanya kebangkitan Cina adalah masalah bagi tatanan global mengingat kita akan menemukan negara imperialis baru dalam diri Cina.

Argumen ini bukan berarti menganggap bahwa Cina dengan sendirinya menjadi kebal terhadap setiap kritik. Dinamika kapitalisme yang berlaku di Cina masih valid untuk menjadi sumber kritik setiap

Gerakan yang menghendaki pembebasan. Namun bagi saya, posisi kritisismenya tidak dapat disamakan dengan posisi kritik terhadap negara kapitalis maju lainnya. Kritik harus didasarkan pada analisa yang adil terhadap kasus yang muncul dalam kontradiksi yang berlaku spesifik dalam kapitalisme Cina. Oleh karenanya, menjadi penting untuk melakukan investigasi yang mendalam terlebih dahulu untuk memahami masalah yang hendak dikritik. Investigasi yang tentunya harus dilakukan tanpa mengikuti bias yang seringkali berdasar pada asumsi yang tidak berdasar.

### Referensi

Breslin, S. (2013). China and the South: Objectives, actors and interactions. *Development and Change*, 44(6), 1273-1294.

Chi, Lau Kin. (2018). "A Subaltern Perspective of China's Ecological Crisis." Dalam *MonthlyReview.org*. diunduh dari <https://monthlyreview.org/2018/10/01/a-subaltern-perspective-on-chinas-ecological-crisis/>

Chungui, Yang. (2001). "Deng Xiaoping Theory and the Historical Destiny of Socialism" Dalam *The Marxist* Vol. 17: 1 (April-Juni). diunduh dari [http://www.cpim.org/marxist/200102\\_marxist\\_deng\\_yang.htm](http://www.cpim.org/marxist/200102_marxist_deng_yang.htm)

Foster, John Bellamy. (2015). "Marxism, Ecological Civilization, and China." Dalam *Monthly Review.org*. diunduh dari <https://mronline.org/2015/06/12/foster120615-html/>

<https://www.theguardian.com/business/2015/sep/07/chinese-market-interventions-yuan-stock-markets>

King, S. T. (2018). *China and the Third World*

40 Wang, Zhihe., He, Huili, and Fan, Meijun. (2014). "The Ecological Civilization Debate in China: The Role of Ecological Marxism and Constructive Postmodernism." Dalam *Monthlyreview.org*. diunduh dari <https://monthlyreview.org/2014/11/01/the-ecological-civilization-debate-in-china/>

are not "catching up" to the rich countries. *Journal of Labor and Society*, 21(4), 447-470.

Lenin, V. Illich (1966). *Imperialism: The Highest Stage of Capitalism*. Moscow: Progress Publishers.

Lenin, V. Illich. (1965). "The New Economic Policy and the Tasks of of the Political Education Department." Diunduh dari <https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1921/oct/17.htm>

Li, Minqi. (2017). Profit, accumulation, and crisis: Long-term movement of the profit rate in China, Japan, and the United States. *The Chinese Economy*, 50(6), 381-404.

Losurdo, Domenico. (2017). "Has China Turned to Capitalism?—Reflections on the Transition from Capitalism to Sosialism." *International Critical Thought* 7.1: 15-31.

Roberts, Michael. (2015). "China: Three models of development." Diunduh dari <https://thenextrecession.files.wordpress.com/2015/09/china-paper-july-2015.pdf>

Roberts, Michael. (2018). "China Workshop: Challenging the misconceptions". Diunduh dari <https://thenextrecession.wordpress.com/2018/06/07/china-workshop-challenging-the-misconceptions/>

Rousset, Pierre. (2014). Chinese ambitions: An imperialism in formation. Diunduh dari <http://my.internationalviewpoint.org/spip.php?article3468>.

Stalin, Joseph. (1972). "The Economic Problems of Sosialism in the USSR." Diunduh dari <https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1951/economic-problems/index.htm>

Taylor, Ian, and Yuhua Xiao. "A Case of Mistaken Identity: "China Inc." and Its

"Imperialism" in Sub-Saharan Africa." *Asian Politics & Policy* 1, no. 4 (2009): 709-725.

Tse Tung, Mao. (2004). "Critique of Stalins's Economic Problems of Sosialism in the USSR." Diunduh dari [https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-8/mswv8\\_66.htm](https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-8/mswv8_66.htm)

Vidakovich, Blair. (2018). "A Contribution to the Debate on the Class Character of China." Dalam *SosialistAlliance.org*. diunduh dari <https://sosialist-alliance.org/alliance-voices/contribution-debate-class-character-china>

Wang, Zhihe., He, Huili, and Fan, Meijun. (2014). "The Ecological Civilization Debate in China: The Role of Ecological Marxism and Constructive Postmodernism." Dalam *Monthlyreview.org*. diunduh dari <https://monthlyreview.org/2014/11/01/the-ecological-civilization-debate-in-china/>

Wang, Zhihe., He, Huili, and Fan, Meijun. (2014). "The Ecological Civilization Debate in China: The Role of Ecological Marxism and Constructive Postmodernism." Dalam *Monthlyreview.org*. diunduh dari <https://monthlyreview.org/2014/11/01/the-ecological-civilization-debate-in-china/>

Xiaoyang, Tang, (2016). "Does Chinese Employment Benefit Africans? Investigating Chinese Enterprises and their Operations in Africa". *African Studies Quarterly*, Vol 16 (3-4). 107-128.

#### **Berita internet**

<https://www.jacobinmag.com/2016/07/pink-tide-latin-america-chavez-morales-capitalism-sosialism/>

<https://sputniknews.com/asia/201712291060395173-nepal-election-china-pivot-india/>

<https://www.ft.com/content/63a5a9b2-85cd-11e6-8897-2359a58ac7a5>

<https://www.nytimes.com/2017/04/03/world/asia/maoists-for-trump-in-china-fans-admire-his-nationalist-views.html>

<https://medium.com/@dylanleviking/neo-maoist-reading-club-a-left-maoist-reaction-to-xi-jinpings-constitutional-amendments-f0c0a66c49ee>

<https://www.quora.com/What-are-some-opinions-on-Zhang-Yunfan-being-arrested-in-a-reading-group-by-the-police-of-Panyu-Guangzhou-despite-his-being-a-pure-Marxist-and-Maoist-and-promoting-Marxism>

<http://www.scmp.com/news/china/policie-s-politics/article/2125541/chinese-scholars-sign-open-letter-calling-release>

## **Laporan**

International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change 2014, [Inclusive Wealth Report 2014: Measuring Progress Toward Sustainability](#). Diunduh dari <http://ihdp.unu.edu>, hal. 220-213.

A hand holding a fan of Indonesian Rupiah banknotes against a green background with industrial silhouettes. The banknotes are fanned out, showing various denominations. The background is a solid green color with black silhouettes of industrial structures, including towers and cranes, suggesting a factory or refinery. The overall image has a high-contrast, graphic quality.

# **EKONOMI NUSANTARA: NARASI TANDING EKONOMI PERTUMBUHAN KAPITALISTIK**

Oleh Boy Sembiring & Abdul Ghofar

# Ekonomi Nusantara: Narasi Tanding Ekonomi Pertumbuhan Kapitalistik

Boy Jerry Even Sembiring  
& Abdul Ghofar

## Abstrak

*Economic growth* telah mengantarkan kita pada fase krisis berkepanjangan. Cara ukur kesejahteraan melalui PDB dan pendapatan per kapita meyakini kesejahteraan hanya dapat diukur secara ekonomi. Cara ini abai pada aspek sosial dan lingkungan. Secara ekonomi sekalipun ia hanya melahirkan bualan, pertumbuhan yang didewakan hanya memperbesar akumulasi dan ketimpangan. Hegemoni ini tentu harus dilawan. Lawan yang dipersiapkannya bernama konsep ekonomi nusantara. Konsep yang dipengaruhi ajaran *environmental justice* dan gerakan *degrowth*, namun ia tetap mempertahankan karakter lokal nusantaranya. Mengantarnya sebagai lawan *economic growth* tentu membutuhkan jalan panjang. Berangkat dari diskursus, menaikkan level kesadaran dan bertarung di proses politik elektoral. Meruntuhkan hegemoni lama dan menjadi hegemoni baru yang lebih adil dan lestari.

## Kata Kunci

*Ekonomi nusantara, pertumbuhan ekonomi/ economic growth; PDB; degrowth; dan environmental justice*

## A. Pendahuluan

Hegemoni sistem ekonomi kapitalistik mengantarkan publik pada tipuan tolok ukur kesejahteraan. Penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dijadikan ukuran kemajuan ekonomi. PDB dihitung berdasarkan hasil penjumlahan konsumsi,

investasi, belanja negara dan pengurangan ekspor impor. Metode ini diikuti dengan penghitungan pendapatan per kapita sebagai alat ukur kesejahteraan individu. Ia dihitung berdasarkan pembagian Produk Nasional Bruto (PNB) dengan jumlah penduduk suatu negara. Penggunaan cara ukur kesejahteraan melalui PDB dan pendapatan per kapita, abai terhadap aspek non ekonomi. Aspek ekologi dan sosial yang secara imperatif (harus) masuk sebagai kriteria kesejahteraan dinegasikan.

Kepercayaan pada PDB dan pendapatan per kapita tidak terlepas karena keimanan terhadap *economic growth* (pertumbuhan ekonomi). Semua hal diukur secara makro ekonomi. Persentase pertumbuhan tinggi dijadikan indikator kemajuan dan kesejahteraan. Dalam perkembangannya *economic growth* mencoba mengakomodasi prinsip hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan. Tujuannya agar terlihat humanis dan *green*. Negara dan Korporasi global menyusun instrumen pembangunan guna menciptakan investasi yang lebih baik. Terciptalah *Millenium Development Goals* (MDGs) yang belakangan diubah menjadi *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kedua instrumen pembangunan global tersebut memiliki cara kerja yang sama, mengandalkan kebaikan investasi dengan semangat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Praktik ekonomi besar diharapkan akan membawa kesejahteraan bagi kelas menengah dan bawah (*trickle down effect*).

Upaya memoles *growth*, tidak mengubah apapun. Dalam praktiknya kelas bawah tetap dipaksa menopang kesejahteraan kelas atas melalui serangkaian praktik buruk hubungan kerja (*trickle up effect*). Persoalan lingkungan dan sosial hanya menjadi elemen pelengkap dari pemenuhan keuntungan ekonomi. Keduanya penting untuk memastikan moda produksi kapitalisme terus berjalan. Pikiran awam

(*common sense*) kelas pekerja dan masyarakat pada umum seolah terakomodasi. Tipuan peningkatan upah tahunan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, pemberian ganti rugi lahan dan lainnya seolah membuat kelompok bisnis mengubah perilaku akumulatifnya. *Economic growth* berhasil mempertahankan hegemoninya.

Kedok humanis dan *green*-ekonomi pertumbuhan terbukti gagal melepaskan kita dari krisis, namun ia tetap dipaksa agar dipercaya sebagai jalan satu-satunya meraih kesejahteraan. Dunia pendidikan dijadikan ruang untuk menyebarkan kepercayaan tersebut, sehingga regenerasi *growth* terus bertahan. Ia tumbuh jadi konsensus pemikiran awam (*common sense*) kelompok masyarakat kelas menengah dan bawah. Mereka tidak sadar, pertumbuhan ekonomi sejatinya hanya melayani dan menguntungkan oligarki bisnis dan politik.

Guna meruntuhkan *hegemoni economic growth* dibutuhkan hegemoni tanding (*counter-hegemony*). Antonio Gramsci<sup>1</sup> menyebutkan untuk meruntuhkan kepercayaan terhadap suatu hegemoni kelas tertentu dilakukan dengan cara melahirkan kepercayaan tandingan. Ada sebuah diskursus yang dijadikan narasi tanding terhadap kepercayaan saat ini. Narasi hegemoni dan tandingannya akan mengalami *war of position* (perang posisi). Pertarungan ini bukan sekedar pertarungan kepercayaan ekonomi, tetapi masuk pada pertarungan politik dan kekuasaan. Kelompok masyarakat dengan kesadaran politik penuh dan oligarki politik-ekonomi saling bertarung memperebutkan kepercayaan kelas menengah dalam ruang politik formal. Pertarungan terjadi dengan prasyarat level kesadaran masyarakat masuk pada fase kesadaran politik dan

didukung oleh pengorganisasian pengetahuan tanding oleh kelompok intelektual.

Guna mendorong runtuhnya ekonomi kapitalistik dengan hegemoni *growth*-nya, WALHI menyusun sebuah narasi tanding yang disebut dengan ekonomi nusantara. Narasi ini didasarkan pada pengalaman belajar bersama di beberapa lokasi, seperti Bali, Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Pengalaman yang dipotret adalah praktik ekonomi lokal yang tidak semata mengejar keuntungan ekonomi, tetapi menaruhnya secara seimbang dengan aspek sosial dan lingkungan. Pengorganisasian dan pendefinisian ekonomi nusantara dalam temuan dan analisis didasarkan pada dua diskursus, yaitu "*environmental justice*" dan "*degrowth*."

## B. Permasalahan

Guna menjawab persoalan yang ada sekaligus membuktikan eksisnya praktik ekonomi nusantara, tulisan ini menyajikan dua hal fundamental, yaitu (1) ekonomi kapitalistik dengan *economic growth* sebagai akar masalah krisis multidimensi; dan (2) eksistensi praktik ekonomi nusantara, ekonomi yang tidak merusak, tidak akumulatif dan manusiawi dijalankan masyarakat berelasi dengan bertahannya kearifan dan kepercayaan lokal. Dari dua hal fundamental tersebut, bisa diuji sejauh mana kemungkinan narasi alternatif ini sebagai diskursus menantang kepercayaan terhadap *economic growth*.

## C. Konsep (*growth* dan *degrowth*) dan Praktik Ekonomi Nusantara

### 1. Persoalan *Economic Growth* dan Krisis di Indonesia

Lorenzo Fioramonti,<sup>2</sup> seorang pakar ekonomi politik Italia menyebutkan PDB merupakan angka paling digdaya sedunia

1 Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci, Insist dan Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2004, hlm. 13 dan 26-28. Diterjemahkan oleh Kamdani dan Imam Baehaqi dari Gramsci Political Thought.

2 Lorenzo Fioramonti, *Problem Domestik Bruto: Sejarah dan Realitas Politik di Balik Angka Pertumbuhan Ekonomi*. Marjin Kiri: 2017, hlm. 2-3

karena dianggap sebagai tolok ukur kemajuan dan kesejahteraan negara. Begitu prestisiusnya PDB mengakibatkan negara-negara berlomba mencapai target pertumbuhan ekonomi. Akumulasi produksi, peningkatan konsumsi dan perluasan investasi dikejar untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Persoalan lingkungan hidup, sosial dan ketimpangan kesejahteraan tidak menjadi faktor penting dalam upaya mengejar target capaian PDB.

Kritik lain terhadap *economic growth* disampaikan oleh Kent Klitgaard. Guru Besar Ekonomi dari Well College menyebutkan pertumbuhan ekonomi mempunyai tiga batasan.<sup>3</sup> Pertama, pertumbuhan ekonomi akan dibatasi dinamika akumulasi modal, khususnya pada investasi. Ketika batas-batas ini tercapai, ekonomi akan mengalami stagnasi *siklikal* (musiman) dan sekular (jangka panjang). Kedua, pertumbuhan ekonomi akan dibatasi daya dukung dan tampung lingkungan. Pertumbuhan ekonomi dengan corak produksi ekstraktif dan eksploitatif berdampak buruk pada keberlanjutan lingkungan hidup. Ketiga, pertumbuhan ekonomi memiliki batas stabilitas politik. Ketika kapasitas pertumbuhan ekonomi menurun, maka menurun pula legitimasi suatu pemerintahan.

Kritik Fioramonti dan tiga batasan pertumbuhan ekonomi yang disebut Klitgaard dapat dijadikan dasar untuk melihat kondisi krisis yang terjadi. Tipuan kesejahteraan karena akumulasi melahirkan ketimpangan dan kemiskinan. Laju ekstraksi guna mengejar produksi dan pertumbuhan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup sekaligus mereduksi ikatan sosial manusia dengan manusia dan peradabannya. Krisis dan persoalan yang ada melahirkan situasi manusia lepas dari posisinya sebagai makhluk sosial dan ekologis.

### Tipuan Kesejahteraan Pertumbuhan Ekonomi

Satu dekade terakhir, pertumbuhan PDB Indonesia berada dalam posisi yang relatif stabil di atas 5%. Bahkan Indonesia berhasil bangkit dengan cukup baik pasca resesi 2008. Sayangnya, pertumbuhan yang baik tidak berbanding lurus dengan capaian penurunan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Indonesia Investment<sup>4</sup> menyebutkan penduduk Indonesia memiliki karakteristik ketidaksetaraan yang tinggi dalam hal distribusi pendapatan. Dalam kurun waktu 2011-2015 diperlihatkan bahwa PDB per kapita disebutkan bahwa kekayaan 43.000 orang terkaya di Indonesia (yang mewakili hanya 0,02% dari total penduduk Indonesia) setara dengan 25% PDB Indonesia. Kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia setara dengan 10,3% PDB (yang merupakan jumlah yang sama dengan kombinasi harta milik 60 juta orang termiskin di Indonesia).

Oxfam International dan INFID<sup>5</sup> dengan merujuk pada data Credit Suisse menunjukkan hanya 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai setengah atau 49 persen total kekayaan pada tahun 2016, sementara hanya 10 persen yang menguasai 77 persen dari total kekayaan. Selanjutnya dengan merujuk berbagai sumber Oxfam International dan INFID menjelaskan empat miliarder paling kaya di Indonesia memiliki kekayaan \$ 25 miliar lebih banyak dari total kekayaan 100 juta penduduk miskin yang jika digabungkan yang mencapai \$ 24 miliar. Total kekayaan 40 persen penduduk paling miskin kalau digabungkan hanya mencapai 1,4 persen dari total kekayaan nasional. Orang paling kaya di Indonesia membutuhkan waktu 22 tahun untuk menghabiskan kekayaannya bila ia berbelanja \$ 1 juta per hari. Hanya dalam satu hari, orang paling kaya mendapatkan bunga dari kekayaannya

3 Kent Klitgaard. Secular Stagnation and the Failed Growth Economy. 2nd Conference on Economic Degrowth, Barcelona, 2010, hlm. 2.

4 <https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia> diakses pada 24 Maret 2020

5 Luke Gibson, Towards a More Equal Indonesia: How the Government can Take Action to Close the Gap Between the Richest and the Rest, Oxfam International and INFID Brief Paper, 2017, hlm. 9.

melebihi seribu kali jumlah yang dibelanjakan oleh penduduk miskin untuk kebutuhan dasar selama satu tahun. Studi ini menyebut enam faktor penyebab tingginya angka ketimpangan di Indonesia, yaitu fundamentalisme pasar, *political capture*, upah murah, ketidakadilan gender, ketimpangan akses desa dan kota, dan buruknya sistem perpajakan.<sup>6</sup>

Gambaran ketimpangan pendapatan antar penduduk Indonesia juga berelasi dengan ketimpangan penguasaan ruang untuk industri ekstraktif. WALHI mencatat ada 61,46% daratan dikuasai oleh korporasi sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan dan migas. Ketimpangan yang sangat tinggi tersebut ditegaskan data rasio gini penguasaan lahan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 yang mencapai angka 0,68.<sup>7</sup> Artinya 1% penduduk Indonesia menguasai 68% lahan. Afiliasi pemilikan perusahaan kehutanan, perkebunan dan pertambangan hanya dikuasai segelintir orang, seperti Sinar Mas Group yang dimiliki keluarga Eka Tjiba Wijaya, Salim Group yang dimiliki keluarga Antoni Salim, Bumi Resources dimiliki keluarga Bakri, Royal Golden Eagle dimiliki keluarga Soekanto Tanoto dan lainnya. Dominasi segelintir orang terhadap ruang kehidupan ini berbanding terbalik dengan capaian perhutanan sosial dan tanah objek reforma agraria. Lebih lima tahun kebijakan ini dijalankan capaian belum mencapai 4 juta hektar.

Buruknya angka ketimpangan pendapatan dan kekayaan juga diperburuk dengan statistik profil kemiskinan. Capaian penurunan kemiskinan yang disebut BPS<sup>8</sup> dalam rilisnya pada 15 Januari 2020 menyebut persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen, menurun 0,19 persen poin dibanding Maret 2019 dan menurun 0,44 persen poin terhadap September 2018. Jumlah

penduduk miskin disebutkan sebesar 24,79 juta orang. Ukuran garis kemiskinan pada periode ini tercatat sebesar Rp440.538,-/kapita/bulan. Dengan rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,58 orang anggota rumah tangga. Merujuk data tersebut garis kemiskinan rumah tangga miskin secara rata-rata sebesar Rp2.017.664,-/rumah tangga miskin/bulan. Data yang disajikan BPS diklaim sebagai catatan keberhasilan pemerintah. Bagi kami, klaim ini tentunya tidak tepat. Ketidaktepatan ini dapat diuji dengan beberapa data lainnya. Pertama, kami merujuknya pada riset World Bank. Dalam laporannya *Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class* disebutkan bahwa terdapat 115 juta orang atau 45% penduduk Indonesia yang baru lepas dari garis kemiskinan dan berpotensi kembali miskin.<sup>9</sup> Dalam laporan ini juga disebutkan bahwa *the upper class* di Indonesia hanya sekitar 2% dari jumlah penduduk.<sup>10</sup> Kedua, pada rilis BPS disebutkan salah satu yang mempengaruhi faktor kemiskinan dipotret dari pendapatan buruh tani dan buruh bangunan harian. Laju konversi lahan pertanian dan menurunnya jumlah proyek padat karya berpotensi semakin memperparah kehidupan penduduk miskin. Ketiga, merujuk pada penghitungan upah yang didasarkan pada kebutuhan hidup layak seorang pekerja/buruh lajang. Angka kebutuhan hidup layak secara otomatis akan tidak layak ketika seorang buruh yang digaji UMR memutuskan untuk menikah dengan pasangan yang tidak bekerja. Hal ini tentu berpotensi menambah jumlah penduduk miskin.

### **Krisis Ekologi di bawah Digdaya Pertumbuhan Ekonomi**

Kata kunci PDB dengan ambisi mengejar angka pertumbuhan mendorong laju ekstraksi sumber daya alam. Atas nama pembangunan, investasi diundang seluas-luasnya. Orientasi akumulasi keuntungan

6 *Ibid.* hlm. 12-22.

7 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia> diakses 20 Januari 2020

8 <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>, diakses pada 25 Maret 2020.

9 Wai-Poi dkk, *Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class*, The World Bank, September 2019, hlm xviii.

10 *Ibid.* hlm. 85.

sebesar-besarnya membuat investasi mengkomodifikasi sumber daya alam. Tujuannya meningkatkan kapasitas produksi dan melayani kebutuhan konsumsi global. Aktivitas merusak ini dibenarkan oleh negara melalui berbagai model perizinan. Hal ini membuat investasi tidak peduli aktivitasnya menghilangkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak generasi depan terhadap keragaman hayati pun tidak dipertimbangkan.

Industrialisasi hanya melihat kekayaan alam sebagai faktor produksi. Dampak ekologis dan sosial tidak jadi pertimbangan. Masyarakat kehilangan sumber mata pencaharian dan kehilangan perlindungan. Bencana ekologis, pencemaran dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan seperti sediaan jadi konsekuensi ekonomi kapitalistik. Hukum tidak dapat bekerja menghentikan kerusakan, ia malah menjadi alat melegitimasi kerusakan. Negara memberi pengecualian, kelonggaran hukum dan deregulasi. Hal ini menjadikan pertumbuhan ekonomi lebih dari sekedar alat ukur, ia menjadi alat politik yang penuh kuasa. Untuk melihat kerusakan yang terjadi, kami menyajikan tiga fakta terkait kerusakan lingkungan hidup, (1) kebakaran hutan dan lahan; (2) laju deforestasi; dan (3) pencemaran.

### **Investasi Hutan dan Kebun Berbuah Karhutla Berkepanjangan**

Kejadian karhutla dapat dibagi dalam dua fase, yaitu fase pertama karena aktivitas perizinan kehutanan HPH dan HTI dan fase kedua terjadi aktivitas perizinan kehutanan HPH, HTI dan ambisi perluasan industri kelapa sawit, baik perorangan maupun dari korporasi. Investasi mulai masuk ke ekosistem gambut. Pada fase pertama kami merujuk pada publikasi Sawit Watch.<sup>11</sup> Publikasi ini menyebutkan kebakaran hutan besar pada abad 20 di Indonesia terjadi

sejak 1982/1983. Total luas kebakaran di Sumatera dan Kalimantan sekitar 3,6 juta hektar konsentrasi titik api utama berada di Kalimantan Timur. Penyebab kebakaran adalah perubahan struktur vegetasi akibat pembalakan kayu yang dimulai sekitar 1970-an. Saat itu jutaan hektar kawasan hutan di Sumatera dan Kalimantan dibebankan perizinan HPH. Log yang tidak dimanfaatkan tergeletak di lantai hutan mengakibatkan penumpukan bahan bakar sehingga rawan api. Dalam skala yang tidak terlalu besar kebakaran hutan dan lahan kembali terulang pada 1987 seluas 66.000 hektar. Pengusaha tambang dan HPH saling tuding penyebab kebakaran. Selanjutnya, kebakaran kembali terjadi pada 1991. Luas kebakaran sekitar 500.000 hektar. Industri HTI penyebab utamanya.

Pada fase kedua, investasi kelapa sawit mulai berkontribusi signifikan. Kebakaran pada 1994 terjadi karena praktik tebas-tebang-bakar yang dilakukan oleh HPH/HTI dan perkebunan kelapa sawit, termasuk indikasi konflik agraria. Kerugian yang dipotret pemerintah dari hilangnya log yang ditaksirkan bernilai US\$ 15.4 juta. Pada 1997/ 1998 terjadi kebakaran paling besar dalam sejarah Indonesia. Tercatat 9,75 juta hektar lokasi yang dilahap api, dengan kerugian mencapai US\$ 2,3 miliar jika dinilai dengan uang (materiil) dan nonmateriil US\$ 2,6 miliar. Kejadian pada 1997/ 1998 mendapat sorotan besar karena mengakibatkan polusi udara. Ia menjadi penanda dimulai masifnya praktik pengeringan dan pembakaran ekosistem gambut.

Pasca reformasi, persoalan karhutla tidak berhenti. Laju investasi kehutanan, khususnya HTI dan kelapa sawit terus meningkat. Konversi dan pengeringan ekosistem gambut jadi sebab utama kebakaran hutan dan lahan. Kejadian ini masih terkonsentrasi di pulau Sumatera dan

<sup>11</sup> Tim Penulis Sawit Watch dkk, *Kebakaran Hutan dan Lahan Di Indonesia, Siapa yang Melanggengkan? Sebuah Analisis Singkat*, Sawit Watch, Bogor, 2014.

Kalimantan. Praktik pertanian cara bakar pasca 2013 mulai ditinggalkan warga karena ancaman penegakan hukum. Berbeda dengan praktik pembukaan lahan dan pengeringan ekosistem gambut untuk industri, masih terus berlanjut dan diberikan insentif khusus kebijakan. Intensitas titik api dan luasan kebakaran signifikan terjadi setiap tahun. Hanya pada 2001, 2007, 2008 dan 2010 intensitas titik api dan luas kebakaran tidak terjadi dalam skala besar. Pasca 2010, trend karhutla mengalami peningkatan. Titik puncaknya pada 2015 dan 2019. Karhutla dan kabut asap sempat mereda secara signifikan pada 2017.<sup>12</sup>

World Bank<sup>13</sup> menyebutkan kerugian akibat karhutla pada 2015 sebesar Rp 221 triliun (US\$ 16,1 miliar). Kerugian ini belum meliputi kerugian lingkungan akibat hilangnya biodiversitas. Contohnya ekosistem gambut yang dilahap api tidak mungkin dipulihkan. Gangguan kesehatan untuk jangka pendek, menengah dan panjang menjadi dampak yang tidak seluruhnya dapat diperhitungkan secara ekonomi. Lebih dari 500.000 orang yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut. Luas kebakaran pada periode ini 2,61 juta hektar, dimana 2,4 juta atau 94 persen diantaranya terjadi di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau, Jambi, dan Papua. Delapan provinsi ini merupakan pusat utama pemasok bahan baku industri kehutanan dan perkebunan kelapa sawit. Keuntungan yang diperoleh dari nilai tambah ekspor kelapa sawit pada 2015 sebesar US\$ 18,64 miliar hanya lebih besar US\$ 2,1 miliar dibanding kerugian ekonomi. Selisih US 2,1 miliar tidak sebanding dengan nilai kerusakan dan kerugian lingkungan yang terjadi.

Tidak belajar dari pengalaman kebakaran 2015 dan tahun sebelumnya. Pada 2019 karhutla besar kembali terulang. KLHK

menyebutkan luas kebakaran pada tahun tersebut adalah 1.649.258 hektar. World Bank<sup>14</sup> menyebut kejadian ini mengakibatkan 900.000 orang mengalami gangguan kesehatan, sekolah-sekolah diliburkan dan layanan publik terganggu. Ada 12 bandara internasional sempat terhenti aktivitasnya. Secara ekonomi kerugian yang dialami mencapai 5,2 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 72,95 triliun (kurs Rp 14.000). Kerugian ini belum memperhitungkan dampak kerusakan lingkungan.

### **Deforestasi Berujung Bencana Ekologis**

Buku Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018<sup>15</sup> menyebut luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia sampai dengan dengan Desember 2017 sekitar 125,9 juta hektar. Rinciannya 68,8 kawasan hutan fungsi produksi, 29,7 juta hektar fungsi lindung, 22,1 juta fungsi konservasi dan 5,3 juta hektar kawasan konservasi perairan. Dalam melihat deforestasi, yang jadi rujukan utama adalah 120,6 juta kawasan hutan hektar kawasan hutan yang berada di darat. Apabila merujuk pengertian kawasan hutan, maka seluruh lokasi yang ditetapkan negara sebagai kawasan hutan seharusnya berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dengan kekayaan biodiversitas lainnya. Selanjutnya, potret deforestasi yang disajikan termasuk hutan yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL).

Deforestasi bukan aspek tunggal yang akan diolah pada bagian ini. Ia akan direlasikan dengan dampak investasi. WRI<sup>16</sup> merujuk riset yang dilakukan L.W. Hannibal menyebutkan kondisi hutan Indonesia pada 1950 berada dalam kondisi yang sangat baik. 162.290.000 juta hektar atau 84 persen daratan Indonesia tertutup hutan primer dan sekunder serta perkebunan seperti teh, kopi dan karet. Selanjutnya, pada 1985 merujuk pada riset lainnya disebutkan hutan yang

12 Diolah dari Data Sipongi

13 Ann Jeannette Glauber dkk, Kerugian dari Kebakaran Hutan Analisa Dampak Ekonomi dari Krisis Kebakaran tahun 2015, The World Bank, Jakarta, Jakarta, 2006, hlm. 1 s/d 3.

14 The World Bank, Perkembangan Triwulan Perekonomian Indonesia Membangun Manusia, Desember 2019, Jakarta, hlm. 9.

15 Tim Penulis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018, Jakarta, 2019, hlm. 1 dan 2.

16 [https://wri-indonesia.org/sites/default/files/keadaan\\_hutan\\_bab\\_2.pdf](https://wri-indonesia.org/sites/default/files/keadaan_hutan_bab_2.pdf), diakses pada 25 maret 2020.

tersisa 119 juta ha. Dari tahun 1985 s/d 1997, Indonesia kembali kehilangan hutannya 20 juta ha. Deforestasi pada periode ini sekitar 1,7 juta hektar/tahun. Saat itu, hutan yang tersisa sekitar 100 juta ha. Namun Global Forest Watch menyebutkan luas hutan yang tersisa pada 1997 jauh lebih kecil seluas 95.628.800 hektar. Laju utama deforestasi pada periode ini karena faktor ekonomi, perizinan tebang kayu dan *illegal logging* meningkat drastis.

Forest Watch Indonesia (FWI)<sup>17</sup> melihat *trend* hutan alam yang tersisa dari 2010 s/d 2017. FWI menyebutkan sisa hutan alam pada 2010 seluas 106.411.422 hektar. Pada 2017, hutan alam kita tersisa 82.832.498 hektar. Periode 2000-2009 memperlihatkan angka deforestasi sebesar 1,5 juta hektare per tahun dan 1,1 juta hektare per tahun di 2009-2013. Sedangkan pada periode 2013-2017, laju deforestasi pada periode ini adalah 1,47 juta per tahun. Pada periode 2013-2017, laju deforestasi di konsesi kehutanan dan perkebunan mencapai luas 2,81 juta hektare atau sekitar 49 persen dari total deforestasi yang terjadi. Luas ini belum menghitung angka deforestasi akibat karhutla dan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit skala besar.

Fakta lain yang disajikan FWI adalah 82.832.498 hektar atau 38,66 persen hutan alam tersisa berada di konsesi perusahaan. Luasan ini dapat lebih besar apabila menghitung sisa hutan alam yang berada di wilayah kerja Perhutani di Jawa. Potensi deforestasi pada tahun-tahun berikutnya akan terjadi di lokasi perizinan, khususnya untuk aktivitas perizinan HTI dan perkebunan kelapa sawit yang membutuhkan lahan tanam.

Relasi laju deforestasi dengan bencana ekologis dapat dilihat dari *trend*

pertumbuhan bencana. Berdasarkan olah data BNPB tentang kebencanaan, dapat dilihat bahwa dominasi bencana hidrometeorologi sepanjang 2014 s/d 2019. Lebih dari 90 persen bencana yang terjadi merupakan bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang sangat erat dengan kerusakan lingkungan hidup. WALHI sering mensinonimkannya dengan bencana ekologis. Bencana ini terjadi dampak dari fenomena meteorologi seperti angin kencang, angin puting beliung, banjir, banjir bandang dan tanah longsor. Kerusakan lingkungan akan menjadi faktor utama meningkatnya bencana ini. Deforestasi merupakan faktor utama meningkatnya kejadian banjir bandang, tanah longsor dan kekeringan. Salah satu contoh deforestasi yang berujung bencana ekologis terkait dengan karhutla. Aktivitas tebang yang diikuti pengeringan gambut menjadi faktor utama karhutla terus terjadi tahun ke tahun. Banjir besar di Desa Pematang dan Hatapang Labura, Sumatera Utara yang terjadi 28 Desember 2019 diakui oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi akibat praktik tebang liar dan HPH. Kejadian ini mengakibatkan beberapa warga meninggal dan puluhan rumah hanyut.

### Pencemaran dan Investasi

Pada 2017 disebutkan bahwa 75 persen air sungai di Indonesia sudah tercemar berat.<sup>18</sup> Kondisi ini jauh lebih buruk dibanding kondisi 2015 dimana disebut 68% sungai di Indonesia berstatus cemar berat, 24% cemar sedang, 6% cemar ringan dan hanya 2% yang memenuhi status mutu baik.<sup>19</sup> Selanjutnya, per Desember 2018, WWF menyebut 82 persen sungai Indonesia dalam kondisi tercemar dan krisis.<sup>20</sup>

Asian Development Bank<sup>21</sup> menyebut sumber utama polusi air sungai di Indonesia

17 Forest Watch Indonesia, Angka Deforestasi Sebagai "Alarm" Memburuknya Hutan Indonesia, hlm. 2-4, diakses dari [http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2019/10/FS\\_Deforestasi\\_FWI\\_small.pdf](http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2019/10/FS_Deforestasi_FWI_small.pdf) pada 25 Maret 2020.

18 <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/09/28/owzx0t284-klhk-75-persen-air-sungai-indonesia-tercemar-berat>, diakses pada 20 Maret 2020.

19 Atlas Status Mutu Air Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2015.

20 <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/porsc1383/82-persen-sungai-di-indonesia-tercemar-dan-kritis>, diakses pada 25 Maret 2020.

21 Asian Development Bank, Indonesia, Country Water Assessment, Metro Manila, 2016, hal. 23 diakses dari

<https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/183339/ino-water-assessment.pdf>, pada 30 Maret 2020.

adalah penggunaannya untuk kebutuhan domestik, dimana terdapat 110 juta orang di kota dan 130 juta orang di desa memanfaatkan air sungai dan membuang limbahnya di sungai. Selanjutnya, pencemaran juga dilakukan oleh pelaku industri. Terdapat 12 ribu pelaku usaha menengah dan besar dan 82 ribu pelaku usaha kecil yang membuang limbahnya di sungai. Selain dua sektor kontributor pencemar utama sungai, pertambangan, pertanian, perikanan dan pembuangan sampah padat menjadi faktor buruknya kualitas air sungai di Indonesia.

Masyarakat sebagai kontributor utama pencemar air sungai tidak dapat dilepaskan dari faktor kemiskinan. Hal ini khususnya bagi masyarakat kota. Sedangkan bagi masyarakat desa, tradisi memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan rumah tangga juga jadi faktor pencemaran. Dua faktor ini tidak dapat dilepaskan dari kegagalan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan dorongan perbaikan sanitasi masyarakat. Fokus peningkatan investasi dan menaruhnya sebagai aktor utama untuk perbaikan kesejahteraan terbukti gagal. Kemiskinan dan kerusakan lingkungan menjadi dua hal yang saling berelasi dan tidak bisa dilepaskan.

### **Gerusan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Situasi Sosial dan Budaya**

Ekonomi kapitalistik dengan tujuan pertumbuhannya juga menggerus kehidupan sosial dan budaya. Bagi kelompok masyarakat lokal dan pedesaan, ekonomi kapitalistik yang mengejar pertumbuhan membawa mereka pada situasi krisis agraria dan ancaman kehilangan identitas lokal. Investasi masuk sampai pekarangan rumah, hadir untuk menggerus sumber kehidupan dan identitas lokal. Tiga lokasi riset WALHI di Jawa Timur,

Bali dan Kalimantan Timur bisa menjadi contoh. Cara kerja investasi yang sekedar mengejar akumulasi keuntungan abai terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat. Di Bali, aktivitas investasi pariwisata pada pertengahan 1990-an sampai awal 2000 meluluh lantahkan tradisi komunal dan ruang ritual di pantai Kedonganan. Pada 2007, inisiatif Desa Adat Kedonganan melalui lembaga ekonomi lokalnya berhasil memperbaiki kesemrawutan yang terjadi. Pengelolaan pantai dan kafe dikembalikan ke skema adat. Semua *krama* menjadi pemilik. Pantai di tata baik, sehingga ruang dan waktu ritual menyesuaikan dengan kearifan lokal. Tidak hanya itu, keuntungan yang diperoleh juga dialokasikan untuk menyelamatkan keberlanjutan praktik agama dan adat Bali.

Di Dusun Sendi, Jawa Timur dan Kampung Lung Isun, Kalimantan Timur hutan yang mereka jaga untuk keberlanjutan nafkah hidup dan identitas lokal diancam investasi kehutanan. Dusun Sendi diancam klaim Perhutani terhadap wilayah adat mereka. Kampung Lung Isun diancam keberadaan korprosi HPH. Kriminalisasi dan intimidasi menjadi ancaman nyata bagi mereka untuk menyelamatkan hutan dan wilayah adat karena kerakusan praktik industri kehutanan. Walaupun secara faktual mereka menguasai dan menjaga hutan dengan baik, keberadaan perusahaan masih mengancam sumber kehidupan dan identitas lokal mereka. Hutan bagi mereka bukan sekedar bermakna ekonomis, tapi menjadi roh keberlanjutan kepercayaan mereka terhadap leluhur. Sendi lebih beruntung, mereka mampu menjaga soliditas masyarakat adatnya, semua warga menolak keberadaan Perhutani. Sedang Lung Isun, terjadi konflik horizontal. PT. Karya Berkah Timber berhasil memecah warga, sebagian kecil warga percaya investasi kayu akan memberikan kesejahteraan.

Keberhasilan Kedonganan, Sendi dan Lung Isun hanya sedikit cerita keberhasilan lepas dari watak tamak investasi. Banyak daerah di Indonesia terpaksa kehilangan identitas lokal karena dikepeng konsesi migas, hutan, kebun dan tambang. Tidak sedikit pula yang melahirkan kondisi konflik horizontal yang demikian parah. Keberadaan Caltex Pacific Indonesia yang kini berubah menjadi Chevron meninggalkan cerita buruk bagi Suku Sakai di Riau. Mereka terusir dari wilayah adatnya. Tidak hanya itu, investasi juga menipu tokoh-tokoh adat untuk menjual tanah dan melupakan anak kemenakannya. Masyarakat Adat Papua pun demikian, masuknya investasi merusak tatanan sosial budaya mereka terhadap hutan. Kondisi perampasan tanah yang mengakibatkan konflik agraria terus terjadi. Eskalasi konflik agraria dan sumber daya alam tidak pernah berhenti tiap tahunnya. Selalu kuantitas dalam angka yang besar. Kemiskinan, kerusakan lingkungan dan gerusan sosial budaya menjadi konsekuensi yang tidak akan selesai. Membuka ruang investasi dan melegalkan perampasan tanah dan sumber kehidupan rakyat sama artinya merawat konflik agraria tetap subur.

## 2. Narasi Tanding Ekonomi Nusantara

Ekonomi nusantara merupakan sebuah konsep yang menggambarkan praktik ekonomi lokal yang memperhatikan tiga aspek penting kehidupan, yaitu keberlanjutan ekonomi, lingkungan dan sosial. Praktik ekonomi ini didasarkan pada empat nilai pengikat, yaitu (1) hubungan sejarah masa lalu; (2) keterikatan dengan ragam lanskap ekologis di nusantara; (3) praktik ekonomi tidak merusak, dilakukan secara humanis dan koheren dengan kearifan lokal; dan (4) berdimensi pemulihan dari kondisi sosial ekologis. Ekonomi nusantara sebagai konsep dibentuk dari dua pemikiran *environmental justice* dan *degrowth*. Ia dilahirkan sebagai kritik terhadap ekonomi kapitalistik dengan

*economic growth*-nya. Ekonomi nusantara tentunya tidak sekedar mengandalkan dua pemikiran tersebut, ia bercirikan keragaman nusantara, karakter keragaman Indonesia. keberagaman karakter, praktik dan kearifan lokal menjadi pembedanya. Di tengah hegemoni pertumbuhan ekonomi, ia mencari jalan transisi untuk lepas dari ekonomi kapitalistik yang dipercaya negara. Ekonomi nusantara dilahirkan bukan sekedar sebagai kesadaran keragaman dan nilai baik ekonomi lokal. Ia dilahirkan sebagai konsep yang harus jadi diskursus dan berjuang menjadi kekuatan otoritatif. Ekonomi nusantara merupakan hegemoni tanding penantang ekonomi pertumbuhan yang dengan watak kapitalistiknya mengantar kita pada kondisi krisis berkepanjangan.

Buah pikir *environmental justice* kami rujuk pada dokumen sederhana *Friend of the Earth* (FoE).<sup>22</sup> Pada prinsipnya ia merupakan turunan dari *green theoretical perspective*. *Environmental justice* sederhananya berjuang untuk pemenuhan hak dan keadilan terhadap lingkungan. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh tempat tinggal dan tempat bekerja yang sehat, hak untuk mendapatkan pembagian yang adil dari kekayaan alam seperti makanan dan air, serta mendapat kepastian bahwa bumi yang dipijak akan terjaga kelestariannya untuk generasi yang akan datang. Untuk mewujudkannya dibutuhkan perubahan sosial secara demokratis. Perubahan sosial yang didorong guna meruntuhkan tipu muslihat dominasi segelintir orang yang berkuasa secara ekonomi dan politik. Kami mengadopsi perlawanan *environmental justice* terhadap ketidakadilan lingkungan.

Aktor utama lahirnya ketidakadilan yang dilawan adalah korporasi perusakan lingkungan dan perampas hak rakyat. Entitas korporasi ini tidak sendiri, ia dibantu oleh kekuatan politik yang mendorong

22 Friend of the Earth. Economic Justice Resisting Neoliberalism. Diakses pada 24 Maret 2020, dari <https://www.foei.org/resources/publications/publications-by-subject/economic-justice-resisting-neoliberalism-publications/what-is-environmental-justice>

membentuk hukum yang pro terhadap investasi, abai terhadap aspek ekologis dan sosial. Kekuatan tersebut menyatu sebagai oligarki ekonomi politik. Kritik kelompok *environmental justice*<sup>23</sup> terhadap praktik ekonomi yang kapitalistik berangkat dari ide *ecological economics* (ekonomi ekologi).<sup>24</sup> Kelompok EJOs pada tahun 1972 mempergunakan kata *degrowth*<sup>25</sup> sebagai slogan melawan pertumbuhan ekonomi *growth*.<sup>26</sup>

Kemunculan *degrowth* sebagai sebuah gerakan sosial yang lebih tersistematis bermula di Lyon, Perancis pada tahun 2001. Selanjutnya, pada 2004, *degrowth* mulai memasuki debat publik yang lebih luas di negara-negara utara. Pada konferensi internasional pertamanya di Paris di tahun 2008, *degrowth* diperkenalkan sebagai lawan dari *economic growth*. *Degrowth* lahir sebagai diskursus guna melawan model ekonomi yang mengejar pertumbuhan ekonomi melalui PDB. Pendukung *degrowth* menghendaki masa depan dimana masyarakat hidup dalam kecukupan ekologis dengan perekonomian lokal yang terbuka dan sumber daya terbagi secara merata melalui kelembagaan demokratis. Pertumbuhan negatif seperti yang terjadi saat depresi atau resesi ekonomi harus terkelola agar membawa manfaat perbaikan ekologis. *Degrowth* mensyaratkan penghapusan PDB agar masyarakat bisa berfokus pada pola produksi dan konsumsi alternatif yang sejalan dengan batasan ekosistem.

*Degrowth* bukan hanya proyek keberlanjutan lingkungan, tetapi juga bagian dari rencana aksi untuk keadilan sosial dan lingkungan. Di tengah pandangan umum tentang pertumbuhan PDB sebagai ukuran kemajuan, *degrowth* mencoba menawarkan definisi ulang tentang kemajuan.<sup>27</sup>

Penghapusan PDB adalah langkah memberi tempat lebih luas bagi kerja sama antar manusia dan praktik ekonomi ramah lingkungan. Dimensi kehidupan lokal dan rural (pedesaan) yang tersisih oleh praktik ekonomi ekstraktif harus ditafsirkan ulang.<sup>28</sup> Pendukung *degrowth* membayangkan jaringan desa-desa ekopolis, bioregion, dan ekomunisipalisme swakelola dalam bentuk demokrasi ekologis.

Ukuran kemajuan dan kesejahteraan dirujuk pada *tools socially sustainable economic degrowth (SSED)*. "*The non-monetary part of satisfaction is more important than the monetary one.*"<sup>29</sup> Cara ini akan melihat kemajuan dan kesejahteraan tidak sekedar secara ekonomi. SSED jadi dasar mengukur kemajuan dan kesejahteraan. Hanya saja ia dimodifikasi, tidak sepenuhnya sama dengan cara ideal *degrowth*. Modifikasi ini melihat praktik dual economic. Terjadi dua kegiatan ekonomi, satu sebagai kelanjutan tradisi dan lainnya sebagai praktik bertahan dari hantaman ekonomi yang memaksa mereka masuk pasar. Di bawah ini kami uraikan 3 contoh praktik "ekonomi nusantara." 3 praktik tersebut kami anggap dapat menjadi *counter hegemony* atau lawan tanding dari praktik ekonomi yang berorientasi pertumbuhan (*growth*).

### 3. Ekonomi Nusantara dalam Praktik Ekonomi Lokal

#### a. Pariwisata Berbasis Masyarakat Adat di Kedonganan

Dibalik kisah dominasi investasi pariwisata di Bali, masih tersisa beberapa wajah baik praktik pariwisata. Praktik yang tidak sekedar mengejar keuntungan, tapi dilakukan dengan memastikan kondisi ekologi dan sosial berjalan seiring dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh. Ekonomi, sosial dan lingkungan dijalankan

23 Environmental justice organizations (EJOs)

24 Environmental Justice and Economic Degrowth: An Alliance between Two Movements

25 Degrowth berasal dari kata *décroissance*, bahasa Perancis yang berarti membusuk

26 Federico Maria, dll. What is Degrowth: From an Activist Slogan to a Social Movement. Hal.

27 Serge Lautoche. Farewell to Growth. Cambridge Polity Press: 2009, hlm. 55

28 Murray Bookchin, Toward an Ecological Society (Montreal Black Rose Books: 1980)

29 Marjolijn Bloemmen dkk., Microeconomic degrowth: The case of Community Supported Agriculture, Ecological Economic 112 (2015), hlm. 113.

Diakses dari [www.elsevier.com/locate/ecocon](http://www.elsevier.com/locate/ecocon) pada 2 Februari 2020.

secara seimbang. Salah satunya potretnya dapat dilihat di Desa *Pakraman*<sup>30</sup> Kedonganan. Mereka memanfaatkan dan mengelola kawasan pesisir secara bijak, dilakukan secara komunal tidak individualistik. Dahulunya Kedonganan jaya dengan hasil tangkapan ikan. Pariwisata yang *booming* membuat mereka bertransformasi secara ekonomi.

Sebelum sektor pariwisata *booming*, 90% *Krama*<sup>31</sup> Desa Adat Kedonganan bermata pencaharian sebagai nelayan tradisional. Pariwisata Kedonganan berawal dari inisiatif beberapa beberapa *krama* yang mereplikasi pengelolaan pantai secara individualistik di Jimbaran. Mereka membangun 5 kafe di pesisir pantai Kedonganan. Kelima kafe berhasil meraih keuntungan besar, sehingga memicu pertumbuhan jumlah kafe secara signifikan. Hingga 2006, jumlah kafe bertambah hingga enam puluh tujuh. Seluruh kafe menyajikan menu makanan laut dan variasinya. Kompetisi pun tercipta, tidak sekedar antar masyarakat, tapi melibatkan investor. Sebagian besar kafe tidak lagi milik *Krama* Desa Adat. Kaplingan selebar 5 meter per kafe sebagiannya telah menjadi milik investor luar Desa Adat. Kondisi ini melahirkan kesemrawutan, salah satunya gangguan terhadap aktivitas upacara yang dilakukan di pantai, seperti *Melasti*. Keberadaan kafe di pantai barat Kedonganan pada 1995 s/d 2006 tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Desa Adat dan *krama*. Keuntungan hanya diperoleh segelintir individu bahkan investor. Kebanyakan masyarakat kedonganan hanya sebagai buruh.

Pada 2005, Pemerintah Desa Adat Kedonganan mengambil inisiatif untuk

mengevaluasi tata kelola kafe dan pantai kedonganan agar mampu memulihkan kondisi pantai menjadi lebih baik. Aspek ekonomi, sosial dan lingkungan berjalan secara seimbang. Evaluasi dilakukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kedonganan dengan melibatkan Sekolah Tinggi pariwisata (STP) Nusa Dua Bali dan STP Badung. Hasil studi merekomendasikan jumlah 67 kafe harus dikurangi jumlahnya menjadi dua belas. Selain itu, direkomendasikan pula konsep penataan Pantai Kedonganan yang mengedepankan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dengan konsep pariwisata berbasis masyarakat. Rekomendasi disosialisasikan kepada *Krama* Desa Adat dalam forum *paruman banjar*. Masyarakat setuju dengan rencana penataan dengan syarat jumlah kafe ditambah menjadi dua puluh empat.<sup>32</sup>

Enam puluh tujuh kafe yang pun ditertibkan dan 24 kafe baru dibangun. Pemilik dan pengelolanya adalah 1.200 KK dari enam banjar di Kedonganan. Setiap banjar mengelola 4 kafe. Proses membangun 24 kafe tentunya membutuhkan modal yang tidak sedikit. LPD Kedonganan menyalurkan kredit senilai total Rp 12.000.000.000,-. Masing-masing kafe mendapat fasilitas kredit senilai Rp 500.000.000,-. Setiap *krama* diberikan fasilitas kredit tanpa agunan senilai Rp 5.000.000 s/d Rp 10.000.000. Dua puluh empat kafe mulai beroperasi pada Maret 2007.

Agar mencegah kesemrawutan yang sama terjadi, Pemerintah Desa Adat menerbitkan *perarem*.<sup>33</sup> Ada dua *perarem* yang diterbitkan. *Perarem* pertama menjadi aturan main dua empat kafe menjalankan usahanya serta kontribusi kepada Desa

30 Desa Pakraman merupakan Desa Adat. Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Perda Bali Nomor 4/2019) menyebutkan Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

31 Pasal 1 angka 10 Perda Bali Nomor 4/ 2019 menyebutkan *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat. Mipil adalah sistem registrasi keanggotaan *Krama* Desa Adat.

32 I Nyoman Darma Putra (ed), *Pariwisata Berbasis Masyarakat di Bali*, Program Studi Magister Pariwisata Universitas Udayana bekerjasama dengan Buku Arti, Denpasar, 2015, hlm. 72.

33 Peraturan yang hanya berlaku di suatu wilayah Desa Adat. *Perarem* menjadi panduan pelaksanaan awig-awig atau hukum adat yang berlaku di wilayah Desa Adat.

Adat. Perarem kedua diterbitkan setelah beberapa tahun kafe berjalan. Ada beberapa masalah yang dihadapi, yaitu pemberian komisi kepada *guide* yang membawa tamu melebihi ketentuan dan adanya timbangan ikan yang tidak menunjukkan bobot ikan yang sebenarnya. Pengaturan secara adat ini membuat usaha kafe dan usaha lain yang berelasi dengannya dilakukan secara adil dan meminimalkan kompetisi. Pemerintah Kabupaten Badung mendukung inisiatif yang dilakukan Desa Adat. Penataan ulang pantai Kedonganan diberikan dasar legalitas melalui Rekomendasi Bupati Nomor 603 Tahun 2006 yang isinya menunjuk Desa Adat Kedonganan untuk melakukan penataan terhadap Pantai Kedonganan. Rekomendasi diperkuat dengan penerbitan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 1238/I/HK/2008 yang isinya memberikan izin kepada Desa Adat Kedonganan untuk melakukan penataan terhadap Pantai Kedonganan. Saat ini, pantai Kedonganan dibagi dalam empat zona. **Zona I** diperuntukan guna aktivitas *cafe, fishing trip, sunbathing, dan massage*. Zona ini juga dimanfaatkan sebagai Bangsal kelompok Nelayan Putra Bali, yang beranggotakan sekitar 53 kepala keluarga. **Zona II** menjadi lokasi dari 24 kafe. **Zona III** di Pantai Utara yang juga menjadi pasar ikan segar higienis. Para nelayan melakukan bongkar muat hasil tangkapannya di zona ini. **Zona IV** merupakan *offshore* yang memiliki keindahan luar biasa saat matahari tenggelam.

Keberhasilan yang terjadi melahirkan dua keuntungan kepada *Krama* Desa Adat, yaitu sebagai sumber pendapatan individu dan komunal untuk kebutuhan sosial, budaya dan agama. Pendapatan individu diperoleh dari keuntungan yang didapatkan kafe berdasarkan jumlah saham yang ditanamkan. Keuntungan masing-masing masyarakat berbeda. Hal ini tergantung kebijakan kafe, ada memberlakukan kebijakan penanaman saham rata, ada juga

penanaman saham sesuai kemampuan. Keuntungan ini hanya sebagai keuntungan pasif, karena masyarakat juga memperoleh keuntungan dari aktivitas penunjang kafe, sebagai *guide, pekerja kafe, supplier* ikan atau bahan baku masakan, pemilik transportasi, *money changer, homestay* dan sebagainya.

Keuntungan kedua merupakan paling penting. Dana yang disetor ke Desa Adat dan Banjar dipergunakan untuk menjaga keberlangsungan adat, budaya dan agama. Keuntungan kafe dipergunakan untuk pembangunan pura, pembiayaan *yad-nya*, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, penyediaan fasilitas umum dan penataan lingkungan. Saat ini, masyarakat tidak lagi diminta *peturunan* (uang patungan) pembangunan atau perbaikan pura, urusan pembiayaan *yad-nya* serta upacara adat lainnya. Desa Adat juga mempunyai program ngaben dan nyekah setiap tiga tahun sekali. Desa Adat pun memberikan santunan kepada keluarga *Krama* Desa Adat yang meninggal.

#### **b. Hutan sebagai Identitas dan Sumber Kehidupan Masyarakat Adat Sendi**

Sendi pada masa lalu jaya dengan sumber daya alam. Air dan kebutuhan sehari-hari diperoleh cuma-cuma dari alam. Saat itu, Sendi dikenal sebagai desa penghasil kopi terbaik. Beberapa abad kemudian, Belanda menginjak kakinya di Nusantara, mereka merampas kebun kopi milik masyarakat. "Kopi lokal sebenarnya bukan tanamannya Belanda. Tanaman masyarakat, cuma dirampas Belanda," jelas Ki Demang. Belanda menjadikan persil kopi itu sebagai komoditas mereka. Suramnya masa penjajahan membuat banyak warga mengungsi dan meninggalkan desa.

Sayangnya, setelah merdeka, hak masyarakat tidak dipulihkan. Jawatan Kehutanan yang didirikan pada zaman penjajahan berubah nama menjadi

Perhutani. Perusahaan negara yang masih mempertahankan watak kolonialnya. Wilayah adat yang berada di kawasan hutan berkonsekuensi menjadikannya berada dalam wilayah kerja Perhutani. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (selanjutnya disebut PP 72/ 2010) menyebutkan *dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.*

Pada tahun 1971 terjadi perubahan lanskap di Sendi. Perubahan ini terjadi karena aktivitas tebang. Keragaman tanaman hutan di wilayah Sendi rusak, pohon-pohon besar diubah jadi kawasan perkebunan pinus untuk kebutuhan ekspor. Kejadian ini mengakibatkan banjir, longsor dan lainnya. Sendi kehilangan kejayaannya.

Pada tahun 2000, masyarakat mulai melakukan *reclaiming*. Semangat mempertahankan hutan dan identitas lokal menjadi simbol perlawanan Sendi. Kerusakan berhasil dipulihkan. Semuanya dilakukan secara swadaya. Saat itu, masyarakat menanam sedikitnya 365.000 jenis tanaman tegakan, yang mana di dalamnya terdapat sekitar 2.000 rumpun bambu. Hanya satu jenis tumbuhan yang tidak mau mereka tanam, yaitu pohon pinus. Bagi mereka pinus terlalu banyak menguras air dan berpotensi membuat sumer air kering. "Malah warga yang ga kebagian air," sebut Sunari, warga Sendi.

Kondisi lingkungan dan sosial yang membaik berdampak positif pada perekonomian warga. Tanah lebih subur dan hasil pertanian lebih produktif. Bambu

menjadi salah satu sumber pendapatan utama masyarakat. Ekonomi masyarakat bertumbuh bersama dengan bambu-bambu yang ditanam. Dari bambu masyarakat bisa membangun rumah, membangun warung, juga membangun wisata alam desa. Selain bermanfaat secara ekonomi, bambu juga mempunyai fungsi ekologis. Ia berfungsi sebagai areal serapan air dan menangkis angin. Karena itu pemanfaatan bambu juga dilakukan secara bijak, tidak sembarangan. Kini, perekonomian Sendi menyaingi desa induk dan desa sekitar. Kondisi ini kontras dengan keadaan 20 tahun lalu.

Guna memastikan kondisi lingkungan yang kembali pulih dapat berkelanjutan, masyarakat Sendi melalui sidang adat melahirkan kesepakatan bersama tentang tata guna lahan. Kesepakatan tersebut diantaranya menentukan lahan dengan kemiringan di atas 40° dijadikan kawasan lindung dan konservasi. Radius 100-200 meter dari sumber mata air tidak boleh dijadikan pemukiman. Penebangan tidak boleh sembarangan. Adat melarang masyarakat untuk memanen rebung atau anak bambu, ia hanya boleh ditebang sesuai umur tertentu. Penggunaan kayu diatur sedemikian baiknya. Alasan pembangunan tidak dapat dijadikan alasan memotong kayu sembarangan. Aktivitas potong kayu harus didasarkan kesepakatan. Pohon yang ditebang adalah pohon yang berukuran besar, tidak boleh yang masih muda. Dalam kurun waktu 15 tahun, tata kelola lahan yang disepakati mampu mengembangkan potensi ekonomi lokal tanpa mengesampingkan kelestarian ekosistem di lereng Gunung Welirang.

Kemajuan ekonomi tidak membuat mereka lupa pada corak hidup lama yang komunal dan kolektif. Pertanian dijalankan secara kolektif dengan metode pertanian alami. Kebutuhan pengairan ladang berasal sumber air di sekitar Sendi. Jenis tumbuhan yang ditanam berupa padi, sayur-sayuran

(tomat, kubis, bawang), buah-buahan (alpukat, nangka, durian) dan jenis tanaman lain (pete, kopi). Lahan pertanian dibedakan menjadi dua yaitu lahan komunal milik adat dan lahan milik pribadi. Peraturan adat juga melarang praktik jual beli lahan. Lahan dibolehkan untuk diwariskan secara turun temurun kepada keluarga tetapi tidak boleh diperjualbelikan kepada orang luar. Selain pertanian, pada 2005, keindahan wilayah adat Sendi dimanfaatkan warga dengan membangun rest area dan pusat kuliner. Selanjutnya, pada 2006 dibuka bumi perkemahan dan disusul pembukaan obyek wisata alam lain seperti Kucur Tabut, Goa Putuk Kursi, dan Gua Lowo.

Dulu masyarakat Sendi hanya tamatan SD dan SMP, kini hampir semua lulus SMA dan beberapa diantaranya lanjut ke level pendidikan tinggi. Lonjakan ekonomi dan pendidikan tidak mengubah kearifan dan cita-cita Sendi memulihkan identitas dan hak adatnya. Hingga saat ini mereka masih mempraktikkan kearifannya. Adat mengajarkan semua yang diperoleh saat ini merupakan titipan Sang Khalik. Hidup harus mengambil secukupnya, tidak boleh berlebihan. Saat ini, Masyarakat Adat Sendi masih terus berjuang mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari Negara. Mereka yakin adanya pengakuan dan perlindungan sebagai entitas masyarakat hukum adat memastikan adat baik terus berjalan.

### c. Praktik Ekonomi Berbasis Adat di Kampung Lung Isun

Masyarakat Lung Isun percaya bahwa kampung yang mereka tempati layaknya surga. Sebutan surga mereka peroleh dari tutur leluhur. Semua kebutuhan disediakan oleh alam dan diambil secara cuma-cuma. Alam memberikan kecukupan, tidak sekedar sandang, pangan dan papan. Lebih dari itu, Lung Isun memberikan ketersediaan kebutuhan ritual. "Tidak ada yang bisa mati kelaparan di sini. Babinya banyak, ikannya

banyak. Padi tanam sendiri," ujar Lusang Arang, Kepala Adat, Kampung Lung Isun. Yonas Tigang Jalung, Kepala Permusyawaratan Kampung bercerita hal yang sama. Krisis di kota yang ia lihat di televisi tidak pernah berpengaruh terhadap kondisi kehidupan masyarakat. "Krisis pangan, kata orang krisis moneter di Jakarta pada 98, tidak terjadi di sini. Semua ada di sini, disediakan alam," sebutnya.

Hutan juga menyediakan kebutuhan medis. Sebelum mereka mengenal dokter, kebutuhan obat-obatan sepenuhnya diambil dari hasil hutan bukan kayu. Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan masyarakat bersama Perkumpulan Nurani Perempuan diketahui terdapat 5 HHBK masih sering digunakan untuk perawatan tubuh, dimana sebagiannya bermanfaat untuk pengobatan luar, 9 HHBK penghasil aroma yang dimanfaatkan untuk bumbu dapur dan obat-obat. Selanjutnya, ada 41 HHBK yang sepenuhnya dipergunakan untuk kebutuhan medis.

Masyarakat Adat Lung Isun percaya mereka mempunyai hubungan spritualitas yang berkoherensi dengan alam. **Tanah, sungai dan hutan adalah satu-kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan mereka.** Secara filosofis **tanah dipercaya layaknya jantung.** Mereka percaya tanpa tanah masyarakat dayak tidak bisa hidup. Tanah sebagai tempat kehidupan, tempat untuk meninggal dunia, bahkan di tanah itu pula diyakini bersemayam para dewa-dewa pelindung dan roh para leluhur. **Sungai adalah darah,** karena sungai menjadi sarana utama lalu lintas untuk menghubungkan hulu dan hilir, ladang dan kampung, juga dimanfaatkan sebagai makan-minum, mencari lauk-pauk dan lainnya. **Hutan adalah tubuh** karena hutan segalanya, tempat mencari obat-obatan, kayu bangunan, binatang serta sumber penghidupan lainnya. Filosofi ini membuat mereka memanfaatkan sumber daya yang

ada secara bijak. Mengambil cukup dan sesuai dengan kebutuhan, tanpa berlebihan apa lagi merusak. Itulah kearifan yang secara turun temurun dipraktikkan dalam kehidupan.

Dalam perkembangannya, masyarakat tidak sepenuhnya lagi bergantung pada hasil hutan dan alam. Masyarakat melakukan aktivitas perladangan dan perkebunan. Aktivitas ladang padi dominan atau hampir dikerjakan seluruh warga kampung adalah Padi Ladang di Kampung Long Isun pada musim panen akhir 2017-awal tahun 2018 menghasilkan lebih dari 74,5 ton gabah kering. Hasil padi ladang rata-rata tidak dijual. Penjualan padi hanya dilakukan apabila dilakukan acara-acara besar. Pemilik gabah menjual dengan harga Rp. 100.000/Kaleng Gabah atau Rp. 10.000/Kg Beras.

Komoditas perkebunan yang paling banyak ditanam di Kampung Long Isun adalah cokelat atau kakao. Kemudian disusul kelapa, tebu, karet, tembakau, kapuk dan kopi. Cokelat mempunyai harga yang mahal, karena itu ia menjadi lokasi kebun paling luas. Pola pemasaran hasil perkebunan masyarakat Long Isun, terutama untuk kakao di jual kepada pengepul atau tengkulak yang datang ke kampung atau ke kebun masyarakat dengan harga Rp. 18.000,-/Kg. Jika dihitung secara ekonomi dalam tahun 2017-2018, jumlah Pohon 32.186 pohon, Hasil Panen 2017-2018 sebanyak 23.352 kg. Dengan asumsi harga 1 kg coklat 18.000 artinya keuntungan kotor yang diperoleh masyarakat adalah Rp. 420.336.000/panen.

Catatan dan sejarah apik Lung Isun yang mampu hidup mandiri, adil dan lestari malah dijawab pemerintah dengan penerbitan beberapa izin industri ekstraktif. Perizinan HPH dan kelapa sawit jadi ancaman nyata bagi keragaman biodiversitas, kekayaan alam dan adat istiadat Lung Isun.

Masyarakat berhasil mengusir korporasi kelapa sawit, namun belum berhasil sepenuhnya mengusir PT. Kemakmuran Berkah Timber (KBT)/Roda Mas Group yang melakukan bisnis tebang kayu. Walaupun aktivitasnya berhasil dihentikan, secara legal izinnya masih eksis di wilayah adat Lung Isun. Selain berhasil menghancurkan sebagian hutan alam Lung Isun, PT. KBT pun berhasil memecah warga, ada konflik horizontal. Sebagian kecil warga pro PT. KBT meyakini akan mendatangkan kehidupan modern yang membahagiakan. Sedangkan bagi mayoritas warga, termasuk perangkat kampung dan adat percaya bahwa perjuangan melawan investasi, termasuk PT. KBT merupakan suatu upaya mempertahankan kampung dan mempertahankan identitas sebagai orang Dayak Bahau Umaaq Suling. Saat ini, masyarakat berjuang mendapatkan pengakuan dan perlindungan sebagai subjek hukum masyarakat hukum adat melalui dorongan penerbitan kebijakan daerah. Pengakuan dan perlindungan subjek hukum akan mereka pergunakan untuk mengajukan Hutan Adat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

#### **d. Integrasi Ekonomi, Sosial dan Lingkungan**

Uraian dari tiga lokasi di atas mewakili kejayaan konsep ekonomi nusantara yang kami usung. Ketiga lokasi dianggap *visible* memenuhi kriteria yang kami tentukan. Visibilitas tersebut dapat dilihat dari sajian tabel di bawah.

Praktik ekonomi yang dilakukan masyarakat dilakukan dengan mengintegrasikan tiga aspek secara seimbang. Aspek ekonomi, sosial dan lingkungan seiring sejalan dan mempunyai porsi yang sama kuatnya. Tidak ada yang dapat ditinggalkan untuk mengukus standar sejahtera. Integrasi tidak dilakukan secara romantis, ia dilangsungkan secara transformatif dan

dual. Praktik ekonomi tradisional masih dijalankan, tapi bertransformasi sesuai perkembangan zaman, tidak statis.

	<b>Kedonganan</b>	<b>Sendi</b>	<b>Long Isun</b>
<b>Kejayaan</b>	Sejarah kejayaan masih eksis dengan transformasi ekonomi berbasis pengaturan adat.	- Jaya di masa Majapahit, runtuh di masa kolonial dan orde baru; - Kejayaan perlahan pulih pasca Orde Baru runtuh.	Sejarah kejayaan masih eksis dan didukung alternatif ekonomi modern;
<b>Relasi Lanskap</b>	Ada relasi sakral antara masyarakat dan alam:	Ada relasi sakral antara masyarakat dan alam:	Ada relasi sakral antara masyarakat dan alam:
<b>Keragaman Ekonomi</b>	- Aktivitas ekonomi tidak merusak; - Ekonomi pariwisata didukung praktik ekonomi lokal lainnya; - Kepemilikan dan pengelolaan secara komunal dengan distribusi keuntungan secara adil. - Berelasi dengan keberlanjutan praktik dan ritual adat dan agama.	- Aktivitas ekonomi berdaya pulih dan tidak merusak; - Distribusi ruang secara adil, baik secara komunal maupun individu; - Menjadi perikat sosial dan pemulihan identitas lokal.	- Aktivitas ekonomi berdaya pulih dan tidak merusak; - Distribusi ruang secara adil, baik secara komunal maupun individu; - Praktik ekonomi dilakukan secara turun temurun berdasarkan ketentuan adat.
<b>Daya Pulih</b>	- Kompetisi minim; - Koheren dengan aspek budaya dan agama;	Pemulihan kondisi lingkungan menjadi faktor penting pemulihan ekonomi, sosial dan budaya.	- Kompetisi minim; - Koheren dengan aspek budaya dan agama;
	<b>Kedonganan</b>	<b>Sendi</b>	<b>Long Isun</b>
<b>Sosial</b>	- Sistem komunal dan kolektif masih dipertahankan; - Koheren dengan aspek budaya dan agama; - Diikat dengan peraturan adat; - Mengalokasikan keuntungan untuk kebutuhan lingkungan, sosial, budaya dan agama.	- Menjadi perikat relasi sosial dan identitas lokal; - Sistem komunal dan kolektif masih dipertahankan; - Diikat dengan kesepakatan adat; - Mengalokasikan keuntungan untuk kepentingan organisasi.	- Ekonomi hutan sebagai identitas lokal; - Sistem komunal masih dipertahankan - Diikat oleh kepercayaan lokal; - Praktik komunal dan kolektif masih dipertahankan.
<b>Ekonomi</b>	- Kompetisi minim; - Kepemilikan secara komunal; - Pembagian keuntungan adil; - Berelasi dengan kegiatan ekonomi lain; - Memastikan standar kualitas dan kuantitas secara jujur;	- Hampir tidak ada kompetisi; - Pendapatan diperoleh dari aktivitas tidak merusak dan skala kecil;	- Kompetisi minim; - Mengambil secukupnya; - Aktivitas perkebunan dan pertanian dilakukan skala kecil, minim ekspansi;
<b>Lingkungan</b>	- Komitmen menjaga kondisi lingkungan; - Kondisi lingkungan menjadi faktor penting praktik ekonomi;	- Komitmen menjaga kondisi lingkungan; - Pemulihan lingkungan jadi kunci pulihnya ekonomi dan sosial budaya;	- Komitmen menjaga kondisi lingkungan; - Kondisi lingkungan menentukan keberlanjutan ekonomi dan adat;

Dalam pendekatan *environmental justice*, keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan dilakukan dengan praktik distribusi ruang dan pendapatan secara adil dan menguntungkan. Praktik ekonomi yang tidak merusak dilakukan agar generasi seterusnya memperoleh hal yang sama bahkan lebih dari mereka. Besarnya pendapatan ekonomi tidak jadi standar satu-satunya mengukur kesejahteraan. Ada kontribusi aspek ekonomi terhadap aspek sosial dan lingkungan. sejarah praktik pengelolaan secara individualistik di Kedonganan terbukti merusak tatanan sosial dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Investasi menjadi ancaman, karena abai terhadap nilai yang dipercaya masyarakat. Kompetisi meretakkan identitas sosial dan memperbesar ketimpangan. Keuntungan hanya diperoleh *krama* Desa Adat yang kaya atau yang mampu menjalin hubungan dengan investor.

Di dua lokasi lainnya, investasi masih eksis menjadi ancaman terhadap praktik ekonomi dan identitas lokal. Kemampuan mengelola dan memanfaatkan alam secara lestari, berdaya pulih dan mempunyai nilai ekonomi diabaikan negara. Dibutuhkan insentif khusus seperti di Kedonganan, adanya pengakuan terhadap entitas sebagai masyarakat adat dan ada legalitas terhadap wilayah adat. Tanpa insentif negara, mereka mampu menjaga tiga aspek terintegrasi secara seimbang, maka seharusnya tidak patut dan relevan untuk mempertahankan investasi yang abai terhadap aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Keberadaan investasi terbukti malah merusak dan mengancam lingkungan yang menjadi faktor utama keberlanjutan nafkah hidup dan relasi sosial budaya masyarakat.

#### **4. Ekonomi Nusantara dari Konsep Menuju Diskursus dan Pengetahuan Otoritatif**

Konsep ekonomi nusantara dengan sokongan *environmental justice* dan

gerakan gerakan *degrowth* jadi lawan yang layak bagi hegemoni ekonomi saat ini. Meminjam metode hegemoni tanding (*counter hegemony*) Gramsci, konsep ekonomi nusantara tentunya harus dikenalkan secara luas. Tumbuh dari kesadaran ekonomi menjadi kesadaran politik. Hanya saja perlu diingat bahwa kekokohan *economic growth* ditopang oleh otoritas politik, diproteksi hukum dan jadi sebuah *episteme* (pengetahuan) seperti yang disebut Michel Foucault.

Refleksi di atas bisa menggambarkan bahwa *counter hegemony* yang diusung Gramsci tidak cukup untuk melawan *economic growth*. Apabila *economic growth* dipercaya sebagai *episteme*, maka metode perluasan aliansi dan partai politik dalam pertarungan politik elektoral dengan dukungan intelektual organiknya<sup>34</sup> tidak cukup. Di sinilah adopsi diskursus/ wacana ala Foucault dibutuhkan. Pertarungan antara ekonomi kapitalistik dengan *episteme economic growth* melawan konsep ekonomi nusantara membutuhkan bantuan legitimasi intelektual kampus. Proses subjektifikasi melawan pengetahuan otoritatif melalui konsep ekonomi nusantara naik level menjadi diskursus/wacana. Dengan mengikuti wacana, lahir pembacaan-pembacaan lain dari kenyataan, yang menghasilkan pengetahuan-kekuasaan lain atau pengembangannya.<sup>35</sup>

Regenerasi akademisi dan praktisi ekonomi pertumbuhan telah dimulai dari level pendidikan menengah dan diperkuat pada pendidikan tinggi. Otoritas menjadikannya sebagai pengetahuan yang tidak terlokalisir dan menguasai seluruh ruang kehidupan. Ukuran-ukuran ekonomi makro begitu dipercaya dan dipertahankan, tidak peduli bahwa watak yang dibawahnya berbeda dengan semangat konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, konsep ekonomi nusantara harus mempunyai dukungan dari ilmuan

34 Menurut Gramsci intelektual organik adalah orang-orang dalam dalam partai revolusioner. Ia mengambil peran pendidikan dan intelektual untuk mendorong level kesadaran kelas pekerja naik pada level kesadaran politik.

35 A. Sudiarja, S.J, Michel Foucault (1926-1986), Bahan Ajar Extension Course Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, 11 November 2019, hlm. 5.

yang otoritatif. Kondisi ini mungkin menjadikannya harus dimodifikasi dan dikembangkan, tapi dengan semangat yang sama berdasar praktik ekonomi ekologis, anti konsumerisme dan anti kapitalisme. Memperkuat ekonomi nusantara dari sebuah konsep menjadi sebuah diskursus merupakan suatu keharusan sebelum menawarkannya sebagai hegemoni tanding.

Setelah posisinya kuat sebagai diskursus, perlahan ia masuk dan menjadi kepercayaan. Masa itu menjadi masa yang tepat baginya memperluas aliansi dan bertarung dalam proses politik elektoral. Ekonomi nusantara lahir sebagai kesadaran politik baru dan siap menjadi pengetahuan otoritatif. Pengetahuan yang mengantarkan Indonesia pada situasi adil dan lestari.

#### D. Penutup

Pertumbuhan ekonomi telah terbukti mengantar kita pada kondisi krisis. Indonesia diwarnai tipuan kesejahteraan, ketimpangan langgeng dan kerusakan lingkungan terus berlangsung. Kemiskinan, bencana ekologis dan konflik agraria jadi fakta dampak krisis. Ukuran PDB, pendapatan perkapita dan ukuran makronya hanya jadi alat legitimasi oligarki ekonomi-politik. Ditengah kondisi krisis, lahir secercah harapan dari praktik ekonomi lokal yang disebut sebagai ekonomi nusantara. Konsep ini didasarkan pada empat nilai pengikat, yaitu (1) hubungan sejarah masa lalu; (2) keterikatan dengan ragam lanskap ekologis di nusantara; (3) praktik ekonomi tidak merusak, dilakukan secara humanis dan koheren dengan kearifan lokal; dan (4) berdimensi pemulihan dari kondisi sosial ekologis.

Ekonomi nusantara tentunya harus diposisikan sebagai hegemoni tanding ekonomi pertumbuhan. Apabila dibiarkan terus berjalan sendiri tanpa dukunga, ekonomi nusantara tentu akan

terhegemoni. Ia akan berubah serupa dengan semangat ekonomi pertumbuhan yang kapitalistik. Semangat tumbuh, akumulatif, kompetitif dan terus memperluas kaki-kaki ekonomi, tidak lagi peduli dengan aspek sosial dan ekologis. Agar konsep ini tidak mati dan terus tumbuh hingga menjadi otoritatif, dibutuhkan suntikan pengetahuan yang lebih terstruktur hingga ia naik menjadi sebuah diskursus. Diskursus yang menjadi episteme baru. Tentunya ia tidak akan begitu mudahnya diterima negara yang dibajak kelompok oligarki. Dibutuhkan relasi keja bersama antar kelompok masyarakat sipil. Menjadi wacana, tumbuh sebagai kesadaran politik dan tangguh bertarung di medan elektoral.

#### Daftar Pustaka

- A. Sudiarja, S.J, Michel Foucault (1926-1986), Bahan Ajar Extension Course Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, 11 November 2019.
- Ann Jeannette Glauber dkk, Kerugian dari Kebakaran Hutan Analisa Dampak Ekonomi dari Krisis Kebakaran tahun 2015, The World Bank, Jakarta, Jakarta, 2006.
- Asian Development Bank, Indonesia, Country Water Assessment, Metro Manila, 2016 diakses dari <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/183339/ino-water-assessment.pdf>, pada 30 Maret 2020.
- Atlas Status Mutu Air Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2015.
- Federico Maria, dll. What is Degrowth: From an Activist Slogan to a Social Movement.
- Forest Watch Indonesia, Angka Deforestasi Sebagai "Alarm" Memburuknya Hutan Indonesia. diakses dari <http://fwi.or.id/wp->

[content/uploads/2019/10/FS\\_Deforestasi\\_FWI\\_small.pdf](#) pada 25 Maret 2020.

I Nyoman Darma Putra (ed), Pariwisata Berbasis Masyarakat di Bali, Program Studi Magister Pariwisata Universitas Udayana bekerjasama dengan Buku Arti, Denpasar, 2015.

Kent Klitgaard. Secular Stagnation and the Failed Growth Economy. 2nd Conference on Economic Degrowth, Barcelona, 2010.

Lorenzo Fioramonti. Problem Domestik Bruto: Sejarah dan Reaitas Politik di Balik Angka Pertumbuhan Ekonomi. Marjin Kiri: 2017.

Luke Gibson, Towards a More Equal Indonesia: How the Government can Take Action to Close the Gap Between the Richest and the Rest, Oxfam International and INFID Brief Paper, 2017.

Marjolijn Bloemmen dkk., Microeconomic degrowth: The case of Community Supported Agriculture, Ecological Economic 112 (2015). Diakses dari [www.elsevier.com/locate/ecocon](http://www.elsevier.com/locate/ecocon) pada 2 Februari 2020.

Murray Bookchin, Toward an Ecological Society, Montreal Black Rose Books, 1980.

Roger Simon, Gagasan-Gagasan Politik Gramsci, Insist dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004. Diterjemahkan oleh Kamdani dan Imam Baehaqi dari Gramsci Political Thought.

Serge Lautoche. Farewell to Growth. Cambridge Polity Press, 2009.

The World Bank, Perkembangan Triwulan Perekonomian Indonesia Membangun Manusia, Desember 2019, Jakarta.

Tim Penulis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Status Hutan dan

Kehutanan Indonesia 2018, Jakarta, 2019.

Tim Penulis Sawit Watch dkk, Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia, Siapa yang Melanggengkan? Sebuah Analisis Singkat, Sawit Watch, Bogor, 2014.

Wai-Poi dkk, Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class, The World Bank, September 2019.

<https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia> diakses pada 24 Maret 2020

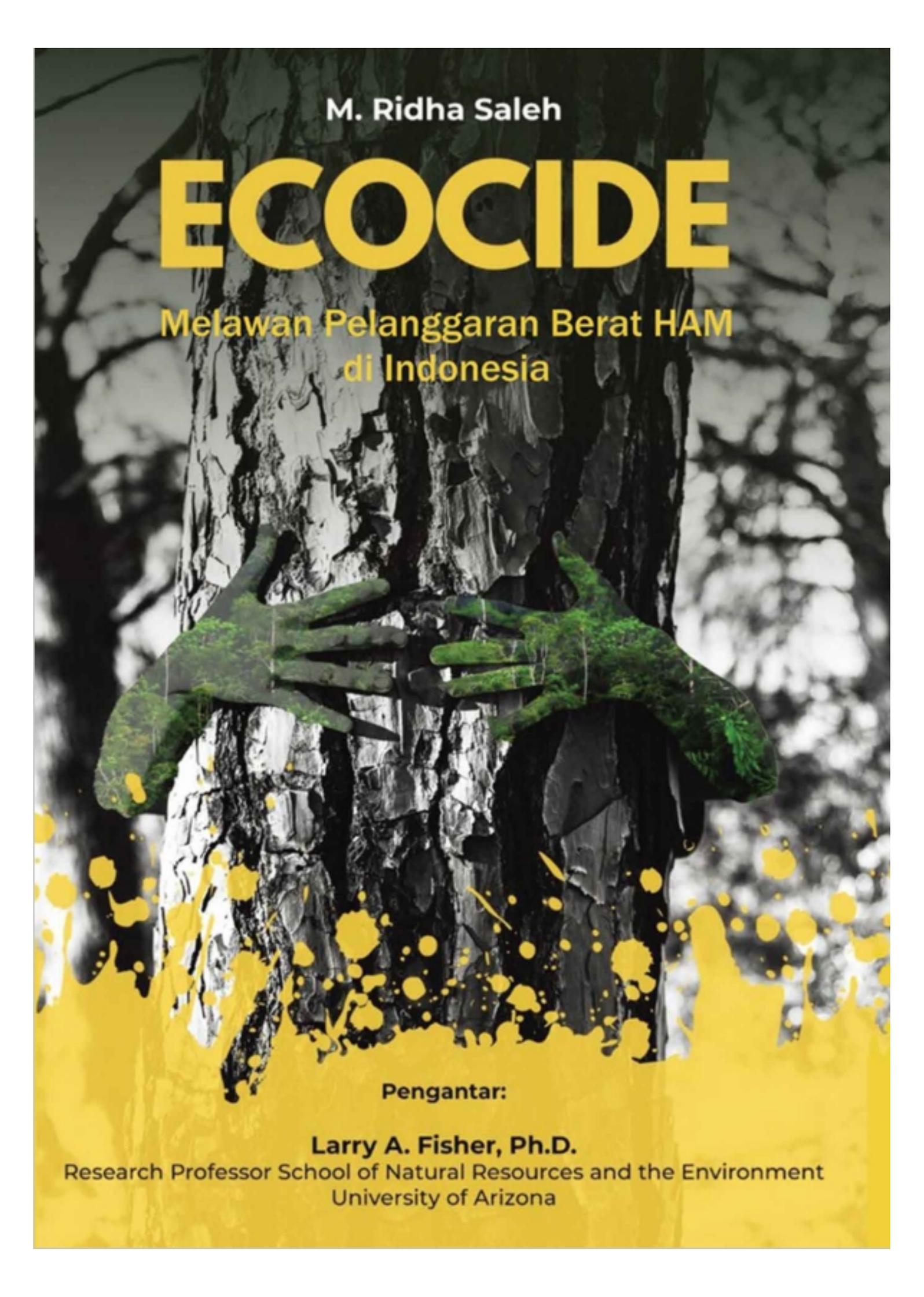
[https://wri-indonesia.org/sites/default/files/keadaan\\_hutan\\_bab\\_2.pdf](https://wri-indonesia.org/sites/default/files/keadaan_hutan_bab_2.pdf), diakses pada 25 maret 2020.

Friend of the Earth. Economic Justice Risisting Neoliberalism. Diakses pada 24 Maret 2020, dari <https://www.foei.org/resources/publications/publications-by-subject/economic-justice-resisting-neoliberalism-publications/what-is-environmental-justice>

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/porsc1383/82-persen-sungai-di-indonesia-tercemar-dan-kritis>, diakses pada 25 Maret 2020.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>, diakses pada 25 Maret 2020.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/ketimpangan-kepemilikan-lahan-di-indonesia> diakses 20 Januari 2020  
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/09/28/owzx0t284-klhk-75-persen-air-sungai-indonesia-tercemar-berat>, diakses pada 20 Maret 2020.



M. Ridha Saleh

# ECOCIDE

Melawan Pelanggaran Berat HAM  
di Indonesia

Pengantar:

**Larry A. Fisher, Ph.D.**

Research Professor School of Natural Resources and the Environment  
University of Arizona

Review Buku

### **ECOCIDE: Melawan Pelanggaran Berat HAM di Indonesia**

"Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup ini?" Pertanyaan ini muncul dari seorang aktivis lingkungan M. Ridha Saleh setelah melihat dan merasakan silih berganti atau bersamaan bencana seperti banjir, gempa bumi dan pandemi COVID-19 yang terjadi hampir di tiap negara. Keresahan Saleh juga merupakan keresahan umat manusia yang sangat tergantung pada lingkungan hidup di mana kualitas lingkungan sekitar kita semakin lama semakin terdegradasi akibat moda produksi kapitalisme 'sebagai akar kerusakan lingkungan hidup dan krisis ekologi'. Dua masalah tersebut sifatnya tidak hanya berdampak pada satu teritori tapi juga berdampak secara global, contoh fenomena climate change (perubahan iklim). Karena kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada penduduk di satu negara maka perlu adanya suatu hukum global yang menindak atau mengkriminalkan perusak lingkungan.

Membaca 'Ecocide: Melawan Pelanggaran Berat HAM di Indonesia' yang ditulis M Ridha Saleh menantang saya sebagai pembaca untuk lebih memahami 'ecocide'. Dalam buku ini, penulis memaparkan begitu jelas tentang ecocide, mulai dari istilah bahasa yang digunakan, dan awal mula kemunculan ecocide. Seperti 'ecocide' muncul setelah banyak kerusakan lingkungan sebagai

dampak dari perang, khususnya perang Vietnam' (hal:13). selain itu Saleh memberikan beberapa perdebatan definisi ecocide beserta tinjauan terhadap definisi-definisi tersebut antara lain: Arthur W. Galston mendefinisikan 'ecocide adalah upaya terencana untuk menghilangkan semua atau sebagian ekosistem' (hal:14). Menurut Saleh, definisi ini merujuk pada arti genocide yang tertulis di Statuta Roma. Namun Saleh sendiri menilai definisi ini terlalu luas dan menegaskan bahwa belum ada definisi yang baku pada ecocide. Saleh memberikan definisi umum bahwa ecocide 'satu tindakan pemusnahan sumber daya alam secara terstruktur, dan massif' (ibid). menurut saya definisi yang diajukan oleh Saleh berdasarkan kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia yang pelakunya adalah korporasi, yaitu: kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo, kasus 'PT Freeport Mc Moran di Timika, Papua' dan kasus-kasus pengrusakan lingkungan lainnya (hal:51). Saleh menambahkan dalam analisisnya bahwa kerusakan lingkungan yang selama ini terjadi akibat akumulasi 'sistem ekonomi politik kapitalisme'(hal:52)

Selain itu, Saleh mengikuti dan meninjau lebih jauh tindakan Polly Higgins, seorang pengacara berkebangsaan Inggris yang memperjuangkan agar ecocide masuk dalam Statuta Roma atau Mahkamah Pidana Internasional dengan mengajukan atau mendesak Komisi Hukum PBB, memasukan ecocide sebagai kejahatan kelima terhadap perdamaian (hal:85), atau mensejajarkan ecocide dengan genocide, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Saleh menerangkan bahwa 'tindakan dan pelibatan dan dampaknya (kerusakan lingkungan dan krisis ekologi) mempunyai hubungan erat terhadap esensi damai dan perdamaian penduduk, hak hidup manusia dan tata keberlangsungan hidup masa kini dan masa mendatang' (hal:53). Dampak rusaknya

lingkungan hidup mempunyai hubungan erat dengan keber-langsungan hak hidup manusia sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Seperti yang dikutip Saleh tentang Deklarasi Stockholm 1970 'lingkungan hidup manusia adalah penting untuk kesejahteraan penikmatan hak asasi manusia-bahkan untuk hidup sendiri' (hal:65)

Hingga saat ini ecocide belum masuk dalam Statuta Roma. Namun saya menilai, ketika ecocide masuk dalam Statuta Roma atau pengadilan internasional pun akan memiliki kelemahan, karena pengadilan kejahatan lingkungan hanya akan memvonis individu, tanpa menjamin serta mengubah sistem ekonomi politik mainstream yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Menurut saya, tanpa mengubah inti masalah kerusakan lingkungan hidup dan krisis ekologi yaitu sistem ekonomi politik kapitalisme sama halnya dengan berusaha membunuh benalu tanpa mencabut akarnya.

Sebagaimana tujuan penerbitan buku ini yang merupakan buku seri kampanye WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), semestinya buku ini juga bisa menjadi referensi yang cukup memberikan banyak informasi mengenai ecocide secara nasional dan global. Karena menurut saya, buku ini bisa memantik pembaca untuk menjadikan ecocide sebagai diskursus, bahan diskusi serta kampanye di Indonesia, yang tidak hanya untuk para aktivis lingkungan hidup seperti kawan-kawan WALHI tapi juga masyarakat pada umumnya sebab kualitas lingkungan hidup kita semakin lama semakin memprihatinkan sedangkan 'upaya perbaikan dan pemulihan lingkungan hidup kalah cepat dibandingkan laju kerusakan dan pencemaran' (hal:40)

**Aip Saifullah**



### Zaki Hussein

Zaki biasa dia disapa adalah aktivis cum intelektual yang aktif di Partai Rakyat Pekerja. Zaki juga merupakan alumnus Magister Sosiologi di Universitas Indonesia. Selain itu, Zaki juga tercatat pernah menjadi penulis dan editor di Indoprogress, satu media pemikiran kritis yang menjadi wadah bagi gerakan sosial di Indonesia. Tulisan-tulisannya khusus mengulas teori-teori ekonomi-politik Marxis klasik dan perdebatan kontemporer.



### Rita Padawangi

Rita Padawangi merupakan doktor sosiologi di Singapore University of Social Sciences. Dia juga merupakan Associate Professor di Centre for University Core, Singapore. Perempuan asal Bandung ini juga aktif mengisi diskusi-diskusi kritik terhadap pembangunan kota yang berorientasi “pasar” di forum organisasi masyarakat sipil dan seminar ilmiah politik baik di Indonesia maupun luar negeri.



### Muhammad Ridha

Muhammad Ridha adalah mahasiswa doktoral di Northwestern University, Amerika Serikat yang mengambil kajian perbandingan politik Amerika Latin dan Asia. Ridha juga merupakan penulis dan editor di jurnal Indoprogress. Artikel yang ditulisnya berkaitan dengan isu-isu ideologi, politik, dan gerakan sosial. Ridha juga pernah tercatat sebagai bagian dari Partai Hijau DKI Jakarta yang terlibat aktif mengkampanyekan calon Dewan Perwakilan Daerah di tahun 2014.



### Boy Even Sembiring

Boy adalah nama panggilan akrabnya. Pria kelahiran Riau ini merupakan aktivis cum intelektual WALHI. Pernah menjadi Deputy di Eksekutif Daerah WALHI Riau dan kini menjadi Manajer Kajian di Eksekutif Nasional WALHI. Selain itu juga, Boy adalah alumnus Magister Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang. Boy juga menulis beberapa buku sejak bergiat di WALHI, diantaranya buku “Cerita dari Sungai Tohor” di tahun 2015, buku yang berisi pengalaman advokasi dan kerja bersama warga. Saat ini Boy sedang mempersiapkan terbitan buku baru yang diberi judul “Ekonomi Nusantara.”



### Abdul Ghofar

Abdul Ghofar pernah menjadi koordinator advokasi dan kampanye Eksekutif Daerah WALHI Jawa Tengah tahun 2017-2019. Saat ini dia aktif bergiat di Eksekutif Nasional WALHI dan menjadi koordinator Aliansi Zero Waste Indonesia, satu organisasi jaringan kerja yang mengkampanyekan isu-isu pengelolaan sampah ramah lingkungan.



### Aip Saifullah

Aip Saifullah baru saja menamatkan kuliah masternya di ISS Hague Belanda yang mengambil kajian Agrarian Food dan Environment Studies. Saat ini dia juga aktif sebagai staf Sekjen KPRI (Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia)